

IR. MARTINUS PUTUHENA

Karya dan Pengabdiannya



Oleh
R.Z. Leirissa

an Direktorat
Kebudayaan

.0598

LEI

m

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

IR. MARTINUS PUTUHENA

Karya dan Pengabdiannya

Oleh
R.Z. Leirissa

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985

Penyunting :

1. P. Wayong

2. M. Soenjata Kartadarmadja

Gambar kulit oleh :

M.S. Karta

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Agustus 1985
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain mengerjakan penulisan biografi tokoh yang telah berjasa dalam masyarakat.

Adapun pengertian "tokoh" dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan seni budaya nasional di Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahir, melainkan juga mengejar kepuasan batin, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional budaya yang bertujuan menimbulkan perubahan yang membina serta meningkatkan

mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri, kebanggaan nasional, dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Agustus 1985
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYA- AN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I : Anak Nelayan di Ihamahu	1
Bab II : Pengalaman Pendidikan	14
Bab III : Insinyur Sipil di Masa Penjajahan ...	34
Bab IV : Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia	40
Bab V : Likuidasi Negara Indonesia Timur ...	59
Bab VI : Sekretaris Jenderal Kementerian Peker- jaan Umum dan Tenaga	78
Bab VII : Masa Purna Bakti	96
Bab VIII : Mahaputra Utama	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
CATATAN-CATATAN	115
SUMBER-SEJARAH	120

KATA PENGANTAR

Biografi ir. Martinus Putuhena ditulis dalam rangka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Setelah mengalami keterlambatan dua bulan, akhirnya naskah ini selesai juga. Pada kesempatan ini pertama-tama saya menyampaikan banyak terimakasih kepada pemimpin proyek yang telah memberi kelonggaran selama dua bulan untuk menyelesaikan naskah ini. Terimakasih saya sampaikan pula kepada drs. Didi Tjahjadi yang telah membantu mencari bahan informasi dari surat kabar *Pedoman* dan buku *20 Tahun Indonesia Merdeka*, serta mencari foto-foto pada Ipphos..

Terimakasih saya terutama disampaikan pula kepada Ny. Putuhena Wattimena yang telah berbaik hati membiarkan saya mengutip pelbagai informasi yang relevan dengan tugas ini dari naskahnya yang berjudul *Ir. Martinus Putuhena yang Kukenal*. Naskah ini sangat banyak membantu saya dalam menyusun dua bab terakhir, dan sebagian dari bab enam. Bahan-bahan yang beliau kumpulkan itu terutama berdasarkan cerita-cerita yang pernah didengarnya sendiri dari almarhum ir. Putuhena sewaktu masih hidup. Juga kesempatan berkali-kali yang diberikan oleh Ny. Putuhena-Wattimena bagi saya untuk mewawancarai beliau sangat saya hargai dan sangat membantu dalam penyusunan naskah biografi ini.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada Ny. Corry Wardojo, putra kedua Ir. Martinus Putuhena. Wawancara yang saya lakukan dengan beliau sangat membantu merekonstruksi masa-masa ketika ir. Putuhena sedang bertugas di *Verkeers en Waterstaat* (zaman penjajahan) serta pelbagai keterangan yang menyangkut masa revolusi dan ketika almarhum ir. Putuhena bertugas di Ujungpandang. Kepada Bapak C.P.F. Luhulima yang telah memberikan kesan-kesannya mengenai ir. Putuhena, terutama mengenai wataknya, dan demikian pula keterangan beliau mengenai situasi Ujungpandang menjelang pembubaran NIT, sangat membantu saya menafsirkan data yang saya kumpulkan melalui surat kabar. Juga kepada drs. Frans Hitupeuw yang dua kali memberi kesempatan bagi saya untuk mewawancarainya mengenai situasi di Desa Ihamahu dan keadaan ir. Putuhena di sana sangat membantu dalam menyusun bab pertama. Dari Bapak J.D. de Fretes almarhum yang saya wawancarai dalam tahun 1983 berhubungan dengan masalah lain, saya berhasil mendapat keterangan mengenai keadaan Jakarta di tahun 1945. Juga wawancara dengan Bapak Dr. Siwabessy banyak memberi gambaran mengenai hubungan kerja beliau dengan ir. Putuhena di tahun-tahun 1962-1965.

Jakarta, 10 Pebruari 1985

BAB I ANAK NELAYAN DI DESA IHAMAHU

Martinus Putuhena dilahirkan di suatu desa kecil yang terletak nun jauh di bagian timur Nusantara. Desa yang bernama Ihamahu itu terletak di Pulau Saparua, yang di masa silam pernah terkenal sebagai daerah penghasil cengkih yang utama di Maluku. Penduduk Saparua juga sangat dikenal karena di pulau itulah perlawanan Pattimura berawal.

Pulau Saparua kini merupakan satu kecamatan, dengan Kota Saparua sebagai ibukotanya. Di kota ini pernah berdiri pusat kekuasaan Belanda, yaitu benteng *Duurstede* yang pernah direbut pasukan Pattimura itu. Pulau Saparua sebenarnya terbagi dua bagian. Jazirah utara yang dinamakan Jazirah Hatawano, dan jazirah selatan yang sering dinamakan Honimoa. Desa Ihamahu terletak di pantai timur Jazirah Hatawano. Di pantai utara jazirah itu terdapat Desa Itawaka dan Nolot; di selatannya terletak Kampung Mahu dan Desa Tuhaha; sedangkan di sebelah baratnya terdapat dua desa, yaitu Pia dan Kulor. Seluruh wilayah ini pernah menjadi daerah yang kaya karena cengkihnya. Malah sekarang pun keadaan itu tidak banyak berubah.

Desa-desa tersebut sebenarnya baru terbentuk karena campur-tangan pihak Belanda (VOC) dalam abad ke-17. Masyarakat Maluku sebelum pengaruh Barat itu memang tidak banyak di-

ketahui karena sumber sejarahnya sangat langka. Hanya cerita-cerita rakyat setempat masih menyimpan kenangan tentang masa yang jauh itu, sekalipun samar-samar. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa organisasi sosial dari masa pra-penjajahan itu sangat berlainan dengan bentuk desa atau negeri.¹ Pemukiman penduduk pada masa itu diorganisasi berdasarkan asas keturunan (genealogis). Selain itu pemukiman-pemukiman itu juga diorganisasi berdasarkan suatu asas lain yang berdasarkan hubungan penduduk dengan tempat tinggalnya. Dengan demikian ada pemukiman yang terbagi dalam sembilan bagian, pemukiman semacam ini dinamakan *hena*. Ada pula pemukiman yang terbagi dalam empat bagian yang dinamakan *aman*. Penguasa setiap *hena* atau *aman* dihitung sebagai satu bagian tersendiri. Dalam suatu *hena* yang rakyatnya terbagi delapan bagian, terdapat suatu kelompok penguasa (*tamaela* = 'pemimpin') yang mewakili bagian-bagian lainnya. Tidak selalu keadaannya demikian karena migrasi dan peperangan bisa menyebabkan bagian-bagian penduduk melepaskan ikatan-ikatannya. Jadi jumlah sembilan bagi bentuk *hena* dan jumlah lima bagi bentuk *aman* merupakan bentuk ideal.

Ketika VOC mengubah organisasi sosial tersebut dalam abad ke-17 dan membentuk negeri-negeri, sisa-sisa struktur lama itu masih nampak di sana-sini. Orang masih dapat menunjukkan mana desa yang bersifat *hena* atau desa yang bersifat *aman*. Struktur yang mengandung ciri *hena* itu sekarang sering dinamakan *patașiwa* ('sembilan bagian'), dan yang mengandung ciri *aman* dinamakan *patalima* ('lima bagian'). Kerukunan masyarakat antar desa sering dinamakan pula *siwalima*. Karena masih kuatnya unsur-unsur asli ini, sampai kini keutuhan masyarakat masih dapat terjamin.

Jazirah Htawano di bagian utara Pulau Saparua pernah merupakan suatu wilayah yang mengandung ciri-ciri *patașiwa*. Sebelum dihancurkan oleh Gubernur Arnold de Vlaming pada tahun 1652, *hena* yang bernama Iha rupanya berhasil menguasai

daerah-daerah pemukiman lainnya.² Daerah ini di waktu itu merupakan lawan yang kuat baik bagi VOC maupun Portugis sebelumnya. Penduduknya kebanyakan sudah masuk Islam. Hubungan mereka lebih erat dengan Kerajaan Ternate yang di abad ke-16 berhasil meluaskan wilayahnya ke Maluku Tengah. Daerah yang terletak di selatannya, daerah Honimoa, pada masa yang sama telah dipengaruhi Barat. Penduduknya telah banyak menganut agama Katolik, dan kemudian ketika Belanda datang pada tahun 1605, beralih menjadi Protestan.³

Iha memang berhasil dipatahkan oleh VOC. Namun sebagian besar penduduknya meninggalkan desa mereka karena tidak bersedia dijajah. Sebagian besar melarikan diri ke Hoamoal (sebuah jazirah di ujung barat Pulau Seram) dan mendirikan Desa Iha di sana. Ada pula yang melarikan diri ke desa-desa Islam di Seram seperti Latu, Hoaloi, dan Sepa. Di masa Martinus Putuhena bersekolah di Saparua, Iha yang demikian megah hanya kenangan saja dari sebagian penduduk pulau itu.

Sesudah Perang Iha⁴, Belanda berhasil mengatur kembali sistem pemukiman penduduk Htawano. Maka muncullah ketujuh desa atau negeri tersebut, masing-masing dengan cirinya sendiri. Berangsur-angsur setiap desa memiliki tradisi dan legenda-legendanya sendiri yang mengikat penduduk desanya dengan tempat kelahirannya. Kenangan akan suatu persatuan di bawah Iha di masa lampau itu masih nampak dari nama adat dari Negeri Ihamahu, yaitu *Noraito Amapati*, 'pemimpin kami disebut "pati"'. *Pati* adalah gelar kepala desa yang dipakai sejak masa penjajahan Belanda. Dalam hierarki yang disusun Belanda, seorang kepala desa yang bergelar *pati* mempunyai status yang lebih rendah dari kepala desa yang bergelar *raja*. Rupanya gelar *raja* bagi penduduk Ihamahu hanya dihubungkan dengan Iha di masa lampau.⁵

Masyarakat Desa Ihamahu terbagi dalam sembilan bagian yang dinamakan *soa*. Kesembilan *soa* itu adalah Iha, Hatala, Mahu, Matalete, Hatulesi, Pia, Tomarala, Kulor, dan Lelima. Se-

perti lazimnya desa-desa di Maluku yang dibentuk sejak abad ke-17, setiap *soa* terdiri atas beberapa keluarga yang menganggap diri mereka masih seketurunan. Keluarga Putuhena sendiri termasuk dalam *soa* Hatulesi.

Kalau masyarakat desa terbagi dalam *soa* yang masing-masing dipimpin oleh kepala *soanya*, maka desa sebagai keseluruhan mempunyai pimpinan pula. Golongan pemimpin di desa di masa lampau itu sering juga dinamakan *bangsa raja*. Kedu-dukan mereka diperkuat, dan hak prerogatif mereka untuk memerintah desa dipertahankan oleh Pemerintah Belanda. Pengangkatan kepala desa harus mendapat persetujuan penguasa yang mengesahkannya dengan suatu piagam dan tongkat. Golongan kepala desa itu di masa lampau merupakan penghubung antara rakyat dengan penguasa asing itu.

Di Desa Ihamahu terdapat empat keluarga yang memiliki hak prerogatif untuk diangkat menjadi kepala desa. Keluarga pertama adalah keluarga Pati Iha, yang menganggap diri pewaris Iha dari masa pra-penjjajaan. Kemudian karena perkawinan keluarga ini, berturut-turut muncul tiga keluarga lain yang mendapat hak prerogatif itu, yaitu keluarga Haulusi, Lilipali, dan Sapulete. Jadi jelas keluarga Putuhena bukan dari golongan *bangsa raja*. Bahkan dari golongan bangsa kepala *soa* pun bukan

Keluarga Putuhena dari Desa Ihamahu sebenarnya adalah keluarga nelayan. Tetapi karena mereka pun memiliki warisan kebun-kebun cengkih, mereka juga bisa digolongkan keluarga petani. Ini merupakan ciri umum dari penduduk desa di Maluku Tengah.

Keluarga Putuhena sesungguhnya tergolong keluarga yang terpendang dalam masyarakat desa. Ini pertama-tama disebabkan mereka memiliki suatu jaring besar yang di Maluku Tengah dinamakan *jaring job*. Panjangnya bisa mencapai 150 m sampai 200 m. Jelas tidak semua keluarga nelayan bisa memiliki jaring besar itu. Keluarga yang memilikinya termasuk orang yang kaya di desa. Selain itu, keluarga Putuhena juga memiliki

perahu pengangkut besar yang di daerah itu dinamakan *arumbai*. *Jaring job* tersebut tidak dapat dikerahkan bila tidak digunakan perahu besar tersebut.

Di masa kecilnya Martinus Putuhena sering turut bersama ayah dan paman-pamannya menangkap ikan dengan jaring dan perahu besar itu. Awak perahunya biasanya terdiri dari 30 sampai 40 orang. Kebanyakan berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mereka akan mendapat 1/40 dari hasil penangkapan ikan pada hari yang bersangkutan. Salah seorang paman Martinus biasanya bertindak sebagai juru mudi, seorang paman lainnya bertindak sebagai *juru muka* (yang menentukan arah), sedangkan ayah Martinus, sebagai pemilik perahu dan jaring, mengawasi seluruh kegiatan.

Tugas *juru muka* terutama menunjukkan ke arah mana perahu harus diarahkan. Tujuan utamanya adalah kelompok ikan yang dapat diketahui apabila burung-burung elang rajin menukik-nukik untuk mematak ikan yang bergerombol itu.

Untuk menarik kawanan ikan ke permukaan, biasanya digunakan semacam alat yang terbuat dari daun kelapa dan berbentuk payung yang terbalik. Kelompok ikan akan tertarik kepada benda itu yang diletakkan di dekat perahu. Kemudian jaring akan ditarik melingkar menjadi makin sempit sehingga kelompok ikan bisa ditimba ke dalam perahu.

Martinus bisa merasakan kegembiraan para *masnait* ('pe-ngayuh') apabila di pagi buta mereka bergerak kembaldi ke desa. *Tifa* akan dibunyikan tanda kegembiraan, disertai lagu-lagu gembira. Penduduk pun akan berduyun-duyun menuju pantai, terutama yang anggota keluarganya ikut dalam perahu itu. Tradisi gotong-royong di Maluku mengharuskan hasil penangkapan itu dibagi antara keluarga pemilik jaring dan para *masnait* (1 : 40). Selain itu para janda di desa itu juga mendapat bagian, seorang satu piring. Sering tugas mengantarkan ikan itu diserahkan kepada Martinus. Demikian pula kepala desa dan pendeta harus mendapat bagian kecil dari penangkapan itu.

Penangkapan ikan hanya bisa dilakukan para musim timur yang relatif tenang. Kalau musim barat mulai bertiup, Laut Banda seakan murka. Tak ada nelayan yang berani melaut. Pada saat-saat seperti itu *arumbai* dari keluarga Putuhena berubah fungsi menjadi "perahu pos", mengangkut penumpang ke Pulau Ambon. Hal ini membawa keuntungan juga karena para penumpang gitu diharuskan membayar. Banyak pula yang membawa hasil kebunnya ke Ambon untuk dijual di pasar.

Dengan demikian keluarga Putuhena merupakan salah satu sokoguru di Ihamahu. Sering para pedagang Makasar dan Bugis, yang mendatangi desa-desa di Maluku dengan perahu yang bermuatan barang dagangannya, singgah di rumah keluarga Putuhena. Ini pun membawa banyak keuntungan. Hubungan persahabatan antara ayah Martinus dengan para pedagang Makasar mempunyai arti tersendiri bagi penduduk setempat. Demikian dekatnya ia dengan kaum pedagang keliling itu sehingga pernah ia mendapat julukan raja Goa.⁶

Dengan kedudukan sebagai *tuan manara* atau pemilik *jaring job*, banyak keluarga lain bergantung pada ayah Martinus. Di Ihamahu sendiri ada empat keluarga yang memiliki status *tuan manara*. Boleh dikatakan bahwa perekonomian desa berputar di sekitar empat keluarga tersebut.

Keempat keluarga itu merupakan sokoguru yang non-formal di Negeri Ihamahu. Hal ini bisa dilihat pula dari sumbangan-sumbangan mereka kepada gereja maupun pemerintah negeri. Ada kebiasaan di Maluku Tengah untuk menyerahkan 1/10 bagian dari hasil tahunan kepada gereja, dinamakan *sepersepuluhan*. Selain itu setiap enam bulan setiap keluarga harus menyerahkan *mangkok negeri* atau sumbangan kepada pemerintah negeri. Sumbangan-sumbangan keluarga Putuhena untuk gereja saja setiap tahunnya bisa mencapai \$ 30.000,00.

Seperti penduduk desa lainnya, keluarga Putuhena juga memiliki kebun. Pembagian tanah di Maluku Tengah berasal dari pengaturan VOC di abad ke-17. Pada dasarnya pembentukan

desa atau negeri oleh VOC di kala itu, juga sejalan dengan pembagian tanah. Negeri yang biasanya terletak di pantai itu memiliki bidang-bidang tanah yang luas menuju ke pertengahan pulau, di pegunungan. Wilayah negeri yang terdiri atas daerah pemukiman dan tanah-tanah itu dinamakan *pertuanan*.

Pemilikan tanah pada umumnya terdiri dari dua macam. Setiap keluarga sejak abad ke-17 disertai sebidang tanah oleh VOC untuk ditanami dengan cengkih yang hasilnya dijual kepada VOC. Tanah keluarga semacam ini dinamakan *tanah dati*. Tetapi karena sistem VOC itu dihapuskan pada tahun 1862, *tanah dati* kemudian bisa ditanami dengan apa saja oleh yang bersangkutan. Pada umumnya tetap dipertahankan tanaman cengkih. Biasanya kepala keluargalah yang menentukan cara penggarapan *tanah dati* itu, sehingga ia sering juga dinamakan *kepala dati*. Ayah Martinus Putuhena adalah salah seorang *kepala dati*.

Selain itu ada pula jenis tanah *pusaka*. Jenis ini adalah tanah milik karena dibeli oleh yang bersangkutan. Apabila *tanah dati* tidak dapat diperjualbelikan, tanah *pusaka* bebas pindah tangan. *Tanah dati* yang tidak mempunyai pemilik lagi (keluarganya punah), akan dikembalikan kepada negeri untuk diserahkan kepada keluarga lain yang membutuhkannya. Tanah *pusaka* dapat pula diwariskan menurut keturunan lelaki. keluarga Putuhena pun memiliki jenis tanah ini.

Kehidupan penduduk desa ditandai oleh tradisi gotong-royong yang dinamakan *masohi*. Di masa Martinus masih berada di desanya, ada beberapa perkumpulan gotong-royong di Ihamahu. Salah satunya bernama *Ormutz*, kemudian *Simon Kiriwane*, *Perkumpulan Mara* (tukang jahit), dan lainnya. Pelbagai tradisi juga mengikat penduduk menjadi suatu kesatuan yang bulat. Untuk menunjukkan keunggulan Ihamahu atas negeri-negeri lain, penduduk negeri itu sering menamakan dirinya *orang Marhuno*. Marihunu adalah suatu suku penduduk pegunungan di Seram barat yang terkenal karena pengayauannya.

Selain itu mereka sangat menentang penetrasi Belanda ke Seram.

Salah seorang cikal-bakal Ihamahu yang sangat dibanggakan sampai kini dinamakan *Kakek Mello*. Ia dikatakan sebagai pahlawan di masa Perang Iha melawan Belanda di abad ke-17. Dalam bentuk makluk halus ia sagnat dihormati sebagai pelindung negeri. Hampir setiap negeri di Maluku Tengah memiliki seorang tokoh legendaris semacam ini. Di Negeri Porto (pulau Saparua) terdapat *Kakek Nolis*, di Negeri Haruku (Pulau Haruku) ada *Nenek Dorsila*, di Kota Ambon ada *Nenek Luhu*. Banyak pula yang mengenal *Kakek Yongkor*, terutama di kalangan militer KNIL di masa penjajahan.

Selain itu penduduk masidh mengingat tempat yang pertama kali digunakan orang Ihamahu. Tempat itu terletak di tepi pantai yang sangat baik untuk dijadikan pelabuhan perahu (*air salobar*). Di tempat itulah perahu-perahu yang datang dari Seram memasuki Ihamahu. Karena ada arus laut tertentu, rakit-rakit yang memuat kayu dari Seram pun mengapung ke sana. Sebab itu tempat itu juga dinamakan *gosepa talempar* (*gosepa* 'rakit'; *talempar* 'hanyut'). Di tempat itu konon pernah ada suatu *baileu* ('balai sidang') dari penduduk Ihamahu. Pada umumnya suatu *baileu* mempunyai sifat sakral. Sebab itu tidak mengherankan bila tempat itu pun disakralkan oleh penduduk Ihamahu.

Penduduk Ihamahu seluruhnya beragama Kristen. Ini sudah terjadi sejak Iha dikalahkan pada tahun 1652. Proses pengkeristenan ini berjalan lancar sejak abad ke-17 ketika di setiap desa dibangun sebuah gedung gereja dan dilengkapi oleh seorang *guru jemaat*. Guru jemaat ini bertindak pula sebagai guru sekolah (*guru midras*). Sampai pertengahan abad ke-19, sekolah di desa-desa pun merupakan alat penyebaran agama Kristen.

Salah satu ciri yang menonjol dari penduduk Ihamahu adalah kebersihan mereka. Ini sebabnya produk-produk mereka sangat laku di pasar di Kota Ambon. *Sagu Ihamahu*, yaitu sagu

yang telah dimasak dalam bentuk segi empat, sangat digemari penduduk Kota Ambon maupun penduduk Saparua. Demikian pula *kue bagia* dari Ihamahu (*bagia* adalah kue yang terbuat dari campuran sagu dan kenari). *Sagu tumbuk* dari Ihamahu (satu yang dimasak di atas ditumbuk lalu dicampuri gula aren) juga sangat digemari.

Dalam situasi yang serba menyenangkan itulah Martinus Putuhena dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1901. Ia anak ketiga dari keluarga *Tuan Manara* di Ihamahu. Selain itu ia masih mempunyai tiga orang adik. Dengan demikian seluruh saudaranya berjumlah lima orang.

Suatu kebiasaan di Maluku adalah memberi singkatan bagi nama baptisan seseorang. Frans sering dijadikan *Banci*; Willem menjadi *Bing*; Juliana menjadi *Uling*; Nora menjadi *Oya*, dan lainnya. Martinus mendapat nama panggilan *Inong*. Inilah nama yang dipakai oleh sanak-keluarga dan kerabatnya senegeri. Malah sampai ia menjadi menteri pun, nama itu masih dipakai oleh keluarganya, sekalipun di kalangan sahabatnya ia dikenal sebagai *Mas Putu*.

Ada cerita yang lucu mengenai nama itu. Ketika menjabat sekretaris jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, ir. Putuhena sering ke luar negeri. Dalam suatu kunjungan ke San Fransisco, ia menggunakan waktu luang untuk berjalan-jalan menikmati keindahan kota. Tiba-tiba dari belakangnya ia mendengar seorang berteriak, "*Bung Inong*". Mendengar namanya di sebut jauh di rantau, tanpa dugaan ada anggauta keluarga atau orang Ihamahu, timbul perasaan kaget sedikit padanya. Tetapi segera ia ingat bahwa bukan orang sembarangan yang menggunakan nama itu. Apalagi setelah ia mencapai pangkat yang sedemikian tinggi. Ketika ia menoleh ternyata memang si pemanggil itu adalah orang Ihamahu pula yang sudah puluhan tahun tidak dijumpainya.

Ayah Martinus atau Bung Inong bernama Petrus Putuhena, sedangkan ibunya berasal dari keluarga Luhulima yang bernama Nelltje, tetapi dipanggil Aba.

Sejak lahir Martinus berdiam di rumah pusaka keluarga Putuhena. Rumah itu sangat besar dan sudah berusia sekitar 100 tahun. Bangunan itu terbuat dari bahan kayu yang istimewa. Dindingnya terbuat dari *gaba-gaba* atau pelepah daun sagu yang diatur rapi. Atapnya terbuat dari daun sagu pula yang disusun rapi. Lantai rumah itu tanah. Di situlah anak-anak sering bermain kelereng dengan cara membuat lubang di tengah-tengah kamar tamu.

Tidak jarang Inong yang masih kecil itu menatap cara ibunya menyiapkan makanan bagi keluarganya. Menu pokok adalah *papeda* atau sagu yang diolah dengan air mendidih sehingga menjadi semacam bubur. Tanpa kuah yang lezat *papeda* memang kurang menyenangkan. Tetapi ibunya pandai menyiapkan pelbagai macam lauk yang terbuat dari ikan.

Ketika saat makan tiba seluruh keluarga duduk mengelilingi meja makan. Ayah memulai dengan doa makan. Kemudian ibu menuang *papeda* (*tuang papeda*) bagi setiap anggota keluarganya. Masing-masing menunggu gilirannya dengan sabar. Saat makan adalah saat yang khushuk, sebab menghormati rahmat Tuhan adalah salah satu ajaran agama.

Setelah setiap anggota keluarga makan sepuasnya, ibu membenahi lagi meja makan tersebut. *Sempe* atau tempat *papeda*, dicuci bersih bersama piring dan mangkuk, kemudian diletakkan di atas *para-para* ('balai-balai untuk dikeringkan')

Waktu malam tiba, setiap orang mencari tempatnya masing-masing. Inong sering tidur bersama ibunya, terutama ketika adik-adiknya belum lahir. Setelah lampu pelita dipadamkan, ibunya sering mendongenginya sebagai pengantar tidur. Dalam kesempatan seperti itulah Inong mendengar cerita tentang Matahaal, penjaga Kampung Ihamahu. Menurut cerita, pada suatu hari muncul seekor kuda putih yang ditunggangi seorang. Kuda dan penunggangnya itu cepat mengelilingi kampung. Penduduk yang menyaksikannya menjadi takut. Namun tiba-tiba kedua makhluk itu menghilang begitu saja seperti

ketika muncul. Orang kampung lalu mengerti bahwa Matahaal telah memberitahukan, akan terjadi malapetaka. Dan memang benar. Tidak lama kemudian penyakit cacar merajalela. Tidak ada obat yang mujarab ketika itu kecuali pencacaran oleh mantri dan dokter Jawa. Tetapi kebanyakan orang mencari dukun.

Pada saat-saat tertentu Inong yang masih kecil itu diperkenankan ikut *arumbai* untuk menjaring ikan. Pada saat-saat itulah ia merasa sangat gembira menyaksikan paman-pamannya berserta para *masnait* ('pengayuh') yang dikoordinasi ayahnya. Oom Ocang adalah seorang *jurumuka* yang berpengalaman. Perawakannya yang tangguh menyebabkan ia tahan panas dan hujan.

Inong pernah bertanya kepada paman yang dikaguminya itu, apakah pamannya pernah karam. "Sudah empat kali, Inong" jawab paman. "Apakah paman tidak takut?" tanya Inong lagi. "Hidup dan mati, nak, ada di tangan Tuhan". Jawaban itu sangat mengesankan Inong. Kemudian semuanya diperintahkan diam. Perahu telah mendekati kelompok ikan. Suara manusia akan menghalau ikan-ikan itu. Hanya pecahan ombak pada badan perahu yang sekali-sekali terdengar. Saat yang tidak kurang menggembirakan Inong adalah ketika waktu makan tiba di tengah laut. Makanan yang disediakan memang istimewa. *Papeda* yang telah dingin dibungkus dengan daun pisang. Lauknya sederhana, yaitu ikan yang baru ditangkap. Setelah dicelup dalam air laut, kemudian dimakan mentah-mentah bersama *papeda dingin* tersebut. Makanan sederhana ini rupanya memberi kekuatan yang cukup bagi para nelayan di laut lepas itu.

Pada hari Minggu sering Inong diajak orang tuanya ke gereja. Gedung gereja yang telah tua itu merupakan monumen tersendiri dalam desa. Dengan khidmat ia mengikuti kebaktian. Sekalipun khotbah pendeta belum dipahaminya benar, ada perasaan senang di hatinya. Lagu-lagu yang dinyanyikan jemaat juga sudah tradisional. Kebanyakan diambil dari buku

lagu-lagu rohani susunan para pendeta setempat. Lagu-lagu itu memberi perasaan khusuk baginya. Keterikatan agama dengan adat-kebiasaan penduduk memang nampak pada saat-saat itu.

Agama Kristen yang kalvinistis itu memang memberi warna tersendiri pada penduduk. Agama itu pada mulanya diajarkan oleh kaum Zending dalam abad ke-19, setelah pihak VOC tidak banyak berhasil sebelumnya. Memang banyak usaha dilakukan kaum pendeta untuk menentang adat-istiadat yang bertentangan dengan agama, namun banyak unsur tradisi yang berhasil melebur dengan kepercayaan baru itu. Salah satu yang menonjol adalah penghormatan kepada nenek moyang. Bagi penduduk di Maluku Tengah, roh yang tertinggi adalah tuhan dalam bentuk trinitasnya, tetapi sesudah itu menyusul nenek moyang. Keduanya dihormati sebagai pelindung kampung, keluarga, dan individu.

Ajaran-ajaran kalvinisme yang dibawa gereja memang menghendaki penolakan atas adat yang dianggap tidak bersifat Kristen. Berkali-kali para pendeta berkhotbah di mimbar gereja mengenai hal itu. Namun agaknya, bagid masyarakat pedesaan, pemisahan yang ekstrim antara "yang dimiliki Allah" dan "Yang dimiliki kaisar" itu tidak terlalu penting. Bagi mereka makin banyak unsur-unsur kekuasaan yang bisa diandalkan untuk perlindungan, makin baik pula. Sebab itu baik *Allah* maupun *kaisar* (dalam hal ini dapat dimasukkan sistem adat) perlu diperhatikan untuk terselenggaranya kesejahteraan dan ketentraman.

Hal itu sangat nampak dalam apa yang di Maluku dinamakan sistem *pela*, yaitu ikatan antara satu desa dengan desa (atau desa-desa) lain. Ikatan-ikatan itu bertujuan gotong-royong dan telah dicipta jauh di masa lampau, ada yang sudah tercipta sebelum VOC datang di abad ke-17. Dalam rangka ikatan *pela* itu desa-desa yang bersangkutan bisa mendapatkan bantuan ekonomis (di masa dahulu juga bantuan dalam peperangan antar

desa) dari desa *pelanya*. Ikatan-ikatan itu demikian sakralnya sehingga banyak yang disejajarkan dengan hubungan keluarga. Salah satu akibatnya adalah larangan saling mengambil calon istri atau suami. Seluruh Maluku Tengah saling kait melalui sistem *pela* itu. Ihamahu, umpamanya, mempunyai hubungan *pela* dengan desa-desa di Seram, yaitu Ihaluhu (tempat penduduk Iha yang melarikan diri pada tahun 1652), Kairatu, Kaibobo, dan Amahai. Selain itu ada pula ikatan dengan desa Liliboi di pulau Ambon.

Dari saat ke saat ikatan-ikatan itu diperbaharui lagi, *panas pela*. Dalam acara-acara itu selain diceritakan kembali asal-usul *pela* antara kedua desa, juga dikisahkan mengenai nenek-moyang dan kekuatan gaib lainnya yang menjadi jaminan ikatan itu. Di situlah nampak berapa percampuran antara unsur-unsur adat dengan agama sangat mendlam, sehingga ada peneliti yang menganggapnya sebagai *agama Ambon*.

Selain gereja yang mencoba menolak unsur-unsur adat dalam kehidupan jemaatnya, juga sistem pendidikan banyak berpengaruh dalam melebarkan jurang antara adat dan kehidupan intelektual. Tetapi sistem pendidikan di Maluku bersifat hierarkis. Ada bentuk sekolah yang mencoba memelihara lingkungan sang murid, termasuk adatnya, dan ada yang menjauh dari lingkungan sang murid. Hal ini nampak jelas dalam pengalaman pendidikan Martinus Putuhena.

BAB II PENGALAMAN PENDIDIKAN

Sejak abad ke-17 desa-desa di Maluku Tengah telah mengenal sistem pendidikan Barat. Namun sampai pertengahan abad ke-19 sistem pendidikan yang diasuh Belanda ini semata-mata bertujuan membina kehidupan keagamaan pemeluknya. Harus diakui sistem pendidikan dalam masa VOC tidak banyak membawa hasil yang memuaskan.⁷ Sekolah-sekolah yang dibangun di desa-desa yang berpenduduk Kristen kurang dibina. Pada waktu itu belum dikenal lembaga pendidikan guru. Guru-guru di masa VOC hanya mendapat latihan sekadarnya di rumah seorang pendeta, dan dilepaskan ke suatu desa yang kebetulan tidak mempunyai guru. Alat-alat sekolah pun sangat minim. Beberapa pendeta Belanda mengambil inisiatif untuk menerjemahkan Kitab Suci. Kemudian pemerintah mengambil alih tugas itu sehingga lahirlah terjemahan oleh Leydekker pada akhir abad ke-18. Versi Leydekker itulah yang dipakai di desa-desa sampai awal abad ke-20.

Sejak awal abad ke-19 sistem pendidikan yang dikelola VOC itu diserahkan kepada badan Zending Belanda karena Pemerintah Belanda kekurangan dana. Sejak itulah di Ambon dibangun suatu lembaga pendidikan guru yang melahirkan ber-puluh-puluh guru sekolah yang disebar ke desa-desa. Namun di masa Zending itu sistem pendidikan tetap bertujuan menun-

jang pembinaan agama. Memang ditambahkan pelbagai mata pelajaran "duniawi" lainnya seperti ilmu bumi dan sejarah di samping yang sudah ada seperti membaca, berhitung, dan menulis. Sekolah-sekolah desa yang dikelola Zending itu pun menggunakan bahan-bahan pelajaran yang dihasilkan pihak Zending. Boleh dikatakan pada masa itu pendidikan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat desa.

Pendidikan yang dikelola pihak Zending di Maluku Tengah selama setengah abad itu tidak menghasilkan perubahan sosial di pedesaan.⁸ Anak desa sedapat-dapatnya tidak direnggut dari lingkungan kehidupannya. Tidak dibina hasrat-hasrat untuk mengubah cara hidup melalui sistem pendidikan. Pendidikan ketika itu semata-mata bertujuan menyadarkan masyarakat desa akan kewajiban-kewajiban agamanya. Kurikulum sekolah memang sengaja diatur agar tujuan itu bisa tercapai sebaik-baiknya.

Namun keadaan di kota, khususnya Kota Ambon, sangat berlainan dengan keadaan di pedesaan. Kota Ambon adalah pusat pemerintahan Belanda. Kota itu juga menjadi pusat pengumpulan cengkik yang dihasilkan di daerah pedesaan. Bentuk fisik Kota Ambon jauh berbeda dengan bentuk desa, juga komposisi penduduknya. Kalau di daerah pedesaan hanya terdapat penduduk desa yang secara turun-temurun berdiam di situ, di Kota Ambon selain orang Belanda dan orang Ambon, ada pula pelbagai sukubangsa lain. Orang Melayu, Jawa, Bugis-Makasar, Buton, dan lainnya mendiami tempat-tempat tertentu di kota itu. Kegiatan sehari-hari mereka juga sangat berbeda. Apabila orang Belanda khususnya menjadi golongan Pemerintah, suku-suku lainnya banyak yang bergerak dalam bidang perdagangan. Orang Ambon sendiri banyak yang bertukang, berjualan, atau menjadi pegawai. Selain itu ada pula orang Arab dan Cina yang juga berdagang. Pendeknya di Kota Ambonlah terdapat kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak terdapat di daerah pedesaan di Maluku.

Salah satu golongan lainnya dalam Kota Ambon adalah apa yang dinamakan golongan *burger* (*aurang beybas*). Mereka umumnya bekas pegawai atau tentara Belanda yang tidak kembali ke tanah airnya, dan memilih berdiam terus di sana. Mata pencaharian golongan itu terutama berdagang. Sejak abad ke-18 pemerintah memberi izin khusus bagi mereka untuk mengadakan perdagangan antar pulau di Maluku. Karena golongan Arab dan Cina termasuk pedagang pula, mereka pun secara hukum tergolong *burger*. Demikian pula pelbagai suku dari Nusantara lainnya.

Sejak masa pendudukan Inggris (1810 – 1817), banyak penduduk desa yang mengalir ke kota diberi status *burger* pula. Untuk itu mereka harus mendapatkan surat izin khusus dari pemerintah. Kemudian ketika Belanda kembali ke Maluku pada tahun 1817, arus migrasi desa-kota itu ternyata tidak bisa dibendung. Banyak penduduk desa, khususnya dari Pulau Ambon juga, yang meminta izin untuk menetap di kota sebagai tukang, pedagang, pegawai, dan lain-lain. Salah satu syarat yang dikemukakan Pemerintah Belanda ketika itu adalah keharusan bagi yang bersangkutan untuk memiliki suatu pekerjaan tetap, atau yang mempunyai keluarga di kota. Dengan demikian para pendatang itu tidak akan menjadi unsur kecacauan dan kriminal di kota. Sampai pertengahan abad ke-19 jumlah golongan *burger* di Kota Ambon hampir separuh dari jumlah penduduk kota itu.

Di antara golongan *burger* itu terdapat suatu sub-golongan khusus, yaitu para *meztizo*. Mereka adalah keturunan dari seorang Belanda yang menikah dengan wanita setempat. Dalam kehidupan sehari-hari mereka mencoba meniru gaya hidup golongan sang ayah. Dalam berpakaian sedapat-dapatnya mereka berpantalon, dan tidak lupa pula topinya. Di luar rumah mereka menggunakan bahasa Belanda antara mereka sendiri.⁹

Golongan meztizo ini menjalankan gaya hidup yang berbeda apabila berada di rumah. Rumah mereka pun sering tidak

jauh berbeda dengan penduduk setempat lainnya, yaitu sangat sederhana. Selain itu di rumah pun mereka menggunakan bahasa Melayu seperti penduduk kota pada umumnya. Jenis makanan, mainan, kegemaran, kebiasaan, seluruhnya tidak berbeda dengan lingkungannya. Pendeknya, golongan *meztizo* ini hidup dalam dua dunia yang berbeda dan nampaknya makin lama dunia rumah makin mendesak dunia lainnya. Ini terutama terjadi tatkala perdagangan cengkih mulai menurun sehingga banyak orang Belanda tidak bersedia lagi menetap di Kota Ambon.

Untuk membantu mempertahankan status sosial golongan *meztizo* khususnya, dan golongan *burger* umumnya, pada tahun 1858 pemerintah Belanda membuka suatu bentuk sekolah khusus bagi mereka. Sekolah itu dinamakan *Ambonsche Burger School*, atau sekolah untuk *burger* di Kota Ambon. Sebenarnya sejak tahun 1818 di kota Ambon telah dibuka sekolah dasar bagi orang Belanda, seperti yang dilakukan juga di pelbagai kota besar di Nusantara ini. Pada tahun 1864 dikeluarkan peraturan bahwa *Europeesch Lagere School* terbuka pula bagi *inlander* dan *burger*, namun rupanya di Ambon tidak banyak yang menggunakan kesempatan itu. Sebagian besar golongan *burger* tetap mengirimkan anak-anaknya ke ABS.

Seperti halnya dengan ELS, *Ambonsche Burger School* menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pelajaran-pelajaran yang diberikan juga tidak jauh berbeda dari ELS. Tetapi guru di ABS tidak semuanya tergolong guru yang baik seperti halnya di ELS, malah banyak yang tidak pernah mendapat pendidikan khusus sebagai guru. Sering seorang bekas perwira, bintara atau pegawai diangkat sebagai guru di ABS. Selain itu yang membedakan ELS dan ABS terutama adalah para muridnya. Yang pertama berbangsa Belanda, yang kedua kaum *burger*.

ABS rupanya memenuhi syarat sebagai sarana pendidikan untuk penduduk kota. Para lulusannya bisa bekerja sebagai pe-

gawai rendahan di kantor-kantor pemerintah. Mereka malah tidak hanya digunakan di Ambon, tetapi juga di pelbagai tempat di luar Ambon. Selain itu ABS merupakan sarana untuk perubahan sosial bagi penduduk desa yang berhasil pindah ke kota. Karena ABS sama sekali tidak mempunyai landasan pendidikan keagamaan seperti sekolah desa, melalui sekolah itu banyak unsur baru yang diterima para murid. Kebudayaan Barat adalah salah satunya. Keinginan atau hasrat-hasrat untuk memasuki dunia kehidupan Barat menjadi konsekuensinya. Banyak penduduk desa melalui ABS bisa berubah menjadi pegawai kantor.

ABS selama kurang-lebih setengah abad merupakan satu-satunya sekolah "sekuler" di Maluku. Karena kedudukannya yang sama dengan ELS, ketika di Indonesia dibentuk sekolah-sekolah model ELS untuk bumiputra, yang dinamakan HIS, di Ambon hal itu tidak dianggap perlu. ABS sudah dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan jaman *Ethische Politiek* itu. Baru pada tahun 1922 ABS dinyatakan sama dengan HIS tetapi berhak terus menggunakan nama lamanya.¹⁰

Sebagai anak desa, Inong pun pada mulanya menjadi murid sekolah desa yang terdapat di Ihamahu. Gedung sekolah itu sederhana sekali, dan berlindung di bawah pohon mangga yang besar dan rimbun. Mungkin pada usia 7 atau 8 tahun Inong mulai memasuki sekolah itu. Pelajaran yang diberikan di sekolah itu tidak berbeda dengan di sekolah lain di daerah pedesaan. Membaca, menulis, dan berhitung merupakan bagian yang utama. Selain itu tentu ada pula pelajaran menyanyi, olah-raga, dan lain-lain. Sekolah desa berbahasa Melayu yang tiga tahun itu memang bertujuan untuk mendidik anak desa untuk tetap menjadi anak desa. *Dalam hal ini* Bentuk sekolah desa di Maluku tidak jauh berbeda dengan *Sekolah Ongko Loro* yang dibangun di desa-desa di Jawa pada akhir abad ke-19. Secara historis *Sekolah Ongko Loro* adalah perkembangan baru di Jawa, dan sekolah desa di Maluku Tengah adalah warisan dari sekolah Zen-

ding diparuh pertama abad ke-19. Sejak dikeluarkannya peraturan-peraturan "sekularisasi sekolah", sekolah desa di Maluku pun dibebaskan dari tugas mengajarkan agama.

Petrus Putuhena, ayah Martinus atau Inong, rupanya tidak merasa puas jika anak-anaknya akan mengalami nasib yang sama dengan dia. Sejak awal abad ke-20 sudah banyak orang Saparua yang meninggalkan dusunnya untuk berdiam di Kota Ambon. Melalui ABS anak-anak mereka bisa menjadi "orang" dengan cara bekerja di kantor-kantor pemerintah. Terutama sejak ABS mendapat izin untuk mengeluarkan ijazah *Klein Ambtenaars Examen* banyak orang tertarik oleh sekolah itu. Dengan memiliki ijazah tersebut, orang bisa bekerja pada pemerintah, tidak saja di Ambon tetapi juga di tempat lain.

Apalagi ketika pada tahun 1911 di Saparua (kota utama pulau Saparua) didirikan sebuah sekolah model ABS dengan nama *Saparoemasche School*. Sekolah itu dinyatakan sederajat dengan HIS dan sebab itu dapat mengeluarkan ijazah tersebut. Petrus Putuhena sangat mendambakan agar anaknya juga bisa memasuki sekolah itu. Namun syarat pertama untuk memasuki sekolah itu adalah kepandaian minimal dalam bahasa Belanda.

Didirikannya *Saparoemasche School* di Saparua pada tahun 1911 terutama disebabkan oleh banyaknya golongan *burger* di kota kecil itu. Memang hampir di setiap kota kecil yang dilengkapi dengan benteng Belanda muncul golongan *burger* sejak abad ke-19. Di Saparua terkenal benteng *Duurstede* yang pernah direbut Pattimura. Di sana pula terdapat kantor residen (kemudian kontrolir) serta detasemen tentaranya. Kota Saparua adalah Kota Ambon yang kecil.

Penduduk Pulau Saparua juga termasuk penduduk Maluku yang termaju di samping penduduk Kota Ambon. Karena produksi cengkihnya yang sangat berlimpah, malah pada saat-saat tertentu yang paling tinggi di seluruh Maluku, taraf hidup penduduknya juga relatif lebih baik. Maka tidak mengheran-

kan apabila banyak yang sanggup menyekolahkan anak-anaknya ke Ambon dan malah ke luarnegeri. Sudah sejak pertengahan abad ke-19, ketika Sekolah Dokter Jawa didirikan di Batavia, calon-calon dari Maluku kebanyakan berasal dari Saparua sehingga berangsur-angsur Saparua menyaingi Ambon sebagai lumbung kaum terpelajar.

Ketika kesempatan untuk maju terbuka dengan dibukanya *Saparoeasche School* tersebut, Petrus Putuhena berupaya agar anak-anaknya bisa bersekolah Belanda pula. Tetapi ternyata syaratnya tidak terpenuhi. Mereka tidak biasa menggunakan bahasa Belanda di rumah karena bukan termasuk golongan *Burger*. Kampung mereka di Ihamahu juga berada di ujung lain dari Pulau Saparua.¹²

Namun di mana ada kemauan di situ ada jalan, kata pepatah. Pada waktu itu ada sejumlah orang yang telah memiliki ijazah *Klein Ambtenaar* membuka semacam taman kanak-kanak (*Frobelschool*) dengan maksud mengajarkan bahasa Belanda. Salah seorang yang banyak berhasil dalam hal ini adalah Tante Oya Noya yang berdiam di Desa Tiouw. Kesulitannya, letak Desa Tiouw yang cukup jauh dari Ihamahu, yaitu di jazirah Honimoa. Tetapi kebetulan di desa itu Petrus Putuhena mempunyai saudara, yaitu dua orang bibinya (tante). Tante Ete Putuhena dan Tante Mia Putuhena sebenarnya tidak tergolong kaya seperti Petrus. Mereka mencari nafkah dengan cara menjual ikan yang diawetkan dengan asap. Ikan diperoleh dengan cara membeli dari para nelayan yang naik ke darat pada pagi hari. Ikan-ikan itu diasapi, kemudian keesokan harinya dijual di pasar.

Ketika Petrus Putuhena meminta kepada para bibinya itu agar anaknya diizinkan berdiam dengan mereka, nampak tidak ada keberatan. Petrus memang sanggup membiayai anaknya. Selain itu Inong pun tidak ragu-ragu membantu nenek-neneknya itu dengan cara mencarikan kayu bakar di hutan setiap hari. Dalam istilah setempat Inong menjadi *anak piara* dari kedua ne-

neknya itu. Selain mencari kayu bakar, setiap pagi Inong juga berkewajiban mengambil air bersih dari sumur umum di Desa Tiouw.

Dengan demikian Inong berhasil pindah dari sekolah desa di Ihamahu untuk memasuki *Frobelschool van Tante Oya Noya* (Taman Kanak-kanak Bibi Oya Noya). Di situlah Inong mulai berkenalan dengan bahasa Belanda. Pada mulanya memang sulit, karena lidahnya tidak terbiasa dengan bahasa asing itu. Sesungguhnya ia samasekali tidak menyenangi pelajaran bahasa itu. Pekerjaan itu dilakukannya juga karena ayahnya menaruh banyak harapan kepadanya. Sampai dewasa nanti ternyata pelajaran ini tetap tidak disenangnya. Barangkali itu salah satu sebab mengapa ia lalu lebih menyenangi pelajaran eksakta.

Berapa lama Inong belajar pada Bibi Oya Noya tidak diketahui dengan pasti. Mungkin dari tahun 1908 sampai 1913. Setelah dianggap mahir berbahasa Belanda, ia dinyatakan lulus, dan ayahnya mencoba mendaftarkan Martinus pada *Saparoeasche School* tersebut. Ternyata Martinus diterima di kelas V. Itu berarti bahwa ia masih harus menempuh pelajaran selama tiga tahun lagi sebelum bisa menempuh ujian *Klein Ambtenaars Examen*.

Jarak Desa Tiouw dari Kota Saparua memang tidak terlalu jauh. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki menyusur pantai. Sebab itu Inong tetap berdiam bersama kedua neneknya itu, dan selama itu pula ia dengan rajin dan tekun membantu kedua nenek tersebut.

Menjadi murid *Saparoeasche School* memang bukan hal yang sepele. Sekolah itu adalah sekolah istimewa dan satu-satunya di Saparua. Malah hanya ada dua sekolah jenis itu di seluruh Maluku. Sebab itu para muridnya juga merasa dirinya orang-orang yang istimewa. Ini pertama-tama nampak dari cara mereka berpakaian harus selalu rapi. Martinus mendapat dua pasang baju baru dari orangtuanya. Selain itu ada lagi satu setel

khusus untuk masuk gereja dipakai seminggu sekali atau pada hari raya lainnya. Murid sekolah tersebut diharuskan pula memakai sepatu.

Baik sepatu maupun baju yang diterima Inong agak longgar, agar bisa dipakai lebih lama. Namun rupanya Inong kurang senang memakai sepatu. Sepatu hanya dipakainya apabila mengikuti pelajaran. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, sepatu itu dicopot. Dengan kaki telanjang ia menyusuri pantai pulang ke Tiouw. Sekali-sekali kakinya yang beberapa jam terkungkung dalam sepatu itu, terkena air laut yang segar. Badan saat-saat demikian, Inong yang berjalan sendirian itu, merasa sangat bahagia.

Memasuki sekolah baru tersebut berarti berkenalan dengan hal-hal yang juga samasekali baru. Kadang-kadang hal-hal yang dipelajarinya tidak pernah nampak di desanya atau di Saporua. Melalui pelajaran bahasa Belanda, Inong si anak desa itu memasuki dunia budaya yang lain. Dunia budaya yang aneh dan tidak jarang menakutkan.

Ada cerita lucu yang pernah disampaikannya kepada istrinya. Ketika bersekolah pada Tante Oya, antara lain ia pernah mendengar perkataan *fiets*. Tante Oya menjelaskan, kata itu berarti 'sepeda'. Keterangan itu dilengkapi dengan beberapa gerakan untuk memperjelas maksudnya. Tetapi Inong tetap tidak mengerti. Benda itu memang belum ada di Saporua. Tetapi sementara ia menerimanya saja sebagai bagian dari pendidikannya.

Pada suatu hari ketika sedang mencari kayu bakar, ia sempat terkejut bukan main. Ketika berjalan pulang dengan seikat kayu di punggungnya, dari kejauhan ia melihat seorang menunggang suatu alat yang maju dengan sendirinya. Karena rodanya demikian besar, nampaknya orang itu menjadi sangat tinggi. Pandangan serupa itu belum pernah disaksikannya. Serta-merta ia melepaskan ikatan kayunya, berlari menuju pagar, dan bersembunyi di sana. Sampai benda aneh itu lewat di depan

matanya, ia gemetar karena takut. Kemudian baru ia mengetahui bahwa benda aneh itu sebuah *fiets* atau sepeda, seperti yang dijelaskan Tante Oya kepadanya.

Tiga tahun lamanya Inong mengikuti pelajaran di *Saparoasche School* dengan tekun dan rajin. Semua pelajaran disenangnya, kecuali bahasa Belanda lagi. Akhirnya tiba juga saat yang dinanti-nantikan. Setelah menempuh ujian berhari-hari, murid-murid pun menunggu hasilnya. Menurut peraturan, mereka yang lulus dengan angka sedang hanya akan mendapat tanda penghormatan. Mereka yang lulus dengan angka yang tinggi akan menerima ijazah *Klein Ambtenaars Examen*. Selain itu yang paling pandai akan menerima beasiswa untuk meneruskan pelajaran ke sekolah menengah.

Dengan berdebar-debar, Martinus bersama kawan-kawan sekelasnya menunggu. Kepala sekolah pun muncul, diikuti staf pengajar lainnya. Ada juga beberapa orang Ambon yang menjadi guru, antara lain Oom Mester Lopies, dan Oom Mester Wattimena. *Mester* adalah perkataan Belanda *Meester* yang berarti 'guru'; seperti kebiasaannya orang Ambon, di depannya ditambahkan *oom* yang berarti "paman".

Nama-nama pun dipanggil. Ternyata Martinus Putuhena lulus dengan gemilang. Predikat yang diterimanya adalah *zeer goed* atau 'sangat baik'. Selain ijazah, ia menerima beasiswa untuk ke sekolah menengah di Tondano. Pada waktu itu sekolah menengah baru akan didirikan di Ambon (1915). Tetapi yang sudah lama berjalan antara lain di Tondano.

Sekolah menengah untuk "bumiputra" baru didirikan Belanda pada tahun 1914. Hal itu dilakukan bersamaan dengan reorganisasi pendidikan dasar yang melahirkan HIS. Sebab itu jenis sekolah itu relatif masih sangat baru. Nama sekolah menengah yang setaraf dengan SMP itu adalah *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* atau MULO. Lama pelajarannya tiga tahun, dan bahasa pengantarnya bahasa Belanda.¹³

Martinus Putuhena adalah salah satu orang Indonesia yang pertama kali memasuki MULO' Malah di antara orang Ambon ia termasuk pelopor di bidang pendidikan menengah itu. Hal itu pun akan ternyata dengan sekolah menengah lanjutan (AMS) dan sekolah tinggi teknik (THS). Seolah-olah pengalaman pendidikan Martinus mengejar pembentukan sekolah-han pendidikan Martinus mengejar pembentukan sekolah-sekolah baru di Indonesia. Mula-mula *Saparoeasche School*, lalu MULO, kemudian AMS, dan akhirnya THS.

Pada usia 16 tahun Martinus Putuhena mulai memasuki jenjang pendidikan yang pada saat itu dianggap tertinggi (AMS baru dibuka pada tahun 1919, dan THS pada tahun 1921). Hal itu jelas merupakan suatu prestasdi besar ketika itu. Pada ijazah Martinus tercantum kata-kata *den heer* Martinus Putuhena ('tuan' Putuhena). Itu menandakan bahwa ia telah tergolong orang terhormat dalam masyarakat kolonial ketika itu.

Namun Martinus Putuhena tetap sederhana, sebagaimana anjuran orangtuanya. Malam sebelum bertolak, menjelang tidur ibunya memanggil ke biliknya seperti ketika ia masih kanak-kanak. Ibunya mengajaknya berdoa. Ibunya menasihati agar ia tekun belajar, sekalipun kedua orangtuanya tidak bisa mengawasinya. "Inong tidak perlu takut. Tuhan tetap akan mendampingimu". Setelah itu ibunya menyerahkan sejumlah uang sebagai bekal perjalanan ke Tondano.

Inong meninggalkan Pulau Saparua melalui Pelabuhan Haria. Di Kota Ambon ia ditampung oleh pemerintah bersama beberapa orang lain yang juga akan berangkat ke Tondano. Mereka harus menunggu kapal yang akan menuju Manado.

Sambil menunggu di Ambon, rombongan menggunakan kesempatan untuk menikmati kota besar itu. Maklumlah Martinus Putuhena baru kali itu menginjakkan kakinya di sana. Salah seoran gkawan, yang rupanya telah mengenal kota itu, mengajaknya berjalan-jalan. Bersama kawan-kawannya ia singgah di sebuah kedai untuk minum. Karena Martinus nampak

ragu-ragu, kawannya menganjurkan agar ia memesan es parut saja. Martinus belum pernah mendengar ada minuman semacam itu. Tetapi ia tidak ingin memperlihatkan keterbelakangannya. Ia pun mengangguk. Tetapi tatkala mencicipinya, serta-merta ia berteriak, "Aduh dingiiiiin" sambil menutup kedua telinganya. Ketika menceritakan hal itu kembali kepada istrinya, ia sendiri tidak dapat menahan tertawanya sendiri.

Akhirnya kapal *van der Wijk* milik perusahaan pelayaran KPM singgah juga di Ambon. Tiket bagi Martinus dan kawannya memang sudah disiapkan pemerintah lama sebelumnya. Pelayaran pertama itu sangat mengesankan Martinus. Pada saat itulah ia mulai menyadari bahwa Nusantara ini didiami demikian banyak suku dan bangsa. Selain itu ia juga berkesempatan menyaksikan keindahan kepulauan Nusantara ketika kapal menyusur pantai Sulawesi

Setelah dua minggu berlayar, *van der Wijk* tiba di Ternate. Para penumpang diharuskan menunggu agak lama. Pekerjaan bongkar muat berjalan cukup lama. Selain itu persediaan makanan untuk perjalanan berikutnya harus dimuat pula. Juga air mandi perlu ditambahkan. Sampai sekitar satu minggu para penumpang diharuskan menunggu. Sementara itu Martinus dan kawan-kawannya menginap di sebuah keluarga Maluku yang sudah diberitahu tentang kedatangan mereka.

Perjalanan dari Ambon ke Manado seluruhnya memakan waktu satu bulan. Dari Manado mereka dijemput dan dibawa ke Tondano. Tetapi sementara itu dua hari lamanya mereka berdiam di Manado. Dengan menumpang kendaraan mereka menuju ke arah pegunungan yang sejuk. Sawah-sawah hijau memperindah lingkungan Tondano. Kota indah itu terletak di tepi danau yang indah pula. Di MULO Tondano itulah Martinus Putuhena mengenyam pelajaran selama tiga tahun penuh.

Ketika itu jumlah murid MULO Tondano sekitar 100 orang. Tersedia dua buah asrama, satu untuk pria dan satu untuk wanita. Lampu listrik sudah ada, tetapi hanya sampai pukul

22.00. Mereka yang belum menyelesaikan pekerjaan rumah, bisa mencoba-coba menggunakan lampu pelita. Tetapi kalau diketahui kepala asrama bisa sulit.

Ada suatu peraturan di sekolah itu: Sebulan sekali murid-murid harus menulis surat ke rumah masing-masing. Surat itu akan dibawa kapal yang singgah sebulan sekali pula. Dengan cara itu pula sekali-sekali Martinus mendapat kiriman uang dari rumah. Tetapi ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk berlibur ke Ihamahu. Paling-paling hanya sampai Kota Manado.

Martinus Putuhena rupanya seorang murid yang cerdas. Mata pelajaran eksakta menjadi kegemarannya. Ia naik kelas terus. Pada ujian akhir, pun ia lulus dengan pujian. Sekali lagi ia menerima beasiswa untuk meneruskan pelajaran ke sekolah menengah yang lebih tinggi, sebagai persiapan untuk keperguruan tinggi di Negara Belanda.

Ketika lulus pada tahun 1919, Martinus Putuhena memilih untuk melanjutkan sekolah ke AMS/B di Yogyakarta. Di sini pun Martinus Putuhena merupakan pelopor. *Algemeene Middelbare School* untuk pertama kalinya didirikan di Yogyakarta pada tahun 1919. Sekolah itu khusus untuk jurusan eksakta. Dalam rencana semula akan didirikan pula bagian A untuk jurusan humaniora. Tetapi baru pada tahun 1920 dibuka jurusan A2, yaitu Budaya Barat, di Bandung. Jurusan A1 untuk budaya Timur, baru muncul pada tahun 1926 di Surakarta.¹⁴

AMS bertujuan untuk mendidik para calon yang akan masuk perguruan tinggi. Karena pada tahun itu belum ada perguruan tinggi di Indonesia, harapan lulusannya adalah melanjutkan ke negara Belanda. AMS/B di Yogyakarta memang dianggap setingkat dengan kelas-kelas terakhir HBS, yaitu sekolah menengah untuk orang Belanda.

Dengan menumpang kapal laut lagi Martinus Putuhena menuju Surabaya pada tahun 1920. Dengan menumpang kere-

taapi ia akhirnya tiba di Yogyakarta. Berbeda dengan di Tondano, di Yogyakarta tidak disediakan asrama. Para murid dipersilakan mencari pemondokan sendiri. Kebetulan dari ayahnya Martinus Putuhena mengetahui bahwa di Yogyakarta berdiam seorang keponakan ayahnya. Tante Tien menikah dengan seorang Belanda bernama de Bruin. Kebetulan pula ia menjadi *amunensis* (semacam kepala administrasi) AMS tersebut. De Bruin mengetahui betul situasi di Yogyakarta sehingga Martinus dianggap aman bila mondok di rumahnya.

De Bruin ternyata seorang yang keras. Martinus dipaksa terus-menerus untuk belajar. Padahal sebagai seorang pemuda berusia 20 tahun, ia tentu mempunyai banyak keinginan lain. Ia bertahan di rumah itu hanya karena beranggapan akan mendapat banyak kesempatan untuk memahirkan bahasa Belanda.

Akhirnya Martinus Putuhena meninggalkan rumah itu dan mencari tempat pemondokan lain. Ia mulai merasa bebas. Namun segala hal diaturnya dengan teliti. Setiap tahun ia berhasil naik kelas dengan gemilang.

Ujian akhir pun tiba. Pelajaran yang diujikan kini berjumlah 14 buah. Yang terpenting di antaranya adalah tiga mata pelajaran eksakta, yaitu ilmu pasti, ilmu alam, dan ilmu kimia. Penting pula tiga pelajaran bahasa, yaitu bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jerman, dan tentu saja, bahasa dan sastra Belanda. Ujian yang dilangsungkan pada bulan Mei 1923 itu resminya dinamakan *Eindexamen van de Voorbereidende Hoogere Onderwijs, Afdeeling B der Algemeene Middelbare School te Djogjakarta* Ujian Akhir pendidikan untuk persiapan ke perguruan tinggi, Bagian B dari AMS di Yogyakarta. Untuk delapan mata pelajaran, termasuk mata pelajaran eksakta, Martinus mendapat nilai 8; untuk 7 mata pelajaran lainnya ia mendapat angka 7; hanya satu angka 5, yaitu untuk bahasa Belanda.

Dengan hasil ujian yang gemilang itu Martinus Putuhena menulis surat kepada orangtuanya bahwa ia berniat meneruskan sekolah ke Negara Belanda. Keahlian yang dipilihnya adalah kedokteran. Namun ternyata lulusan AMS tidak ada yang mendapat beasiswa sehingga Martinus harus mengusahakannya sendiri. Orangtuanya memang bersedia membantu alai kadarnya, tetapi jelas jauh dari mencukupi.

Ketika itu memang sudah banyak terbentuk organisasi yang menyediakan beasiswa. Organisasi Budi Utomo, umpamanya, mempunyai bagian yang mengurus hal itu. Demikian pula organisasi kepemudaan lainnya. Dari kalangan orang Ambon sudah sejak tahun 1908 muncul suatu organisasi beasiswa dengan nama *Ambonsche Studiefonds* (ASF). Organisasi ini dibentuk atas prakarsa seorang dokter yang terkenal ketika itu di Batavia, yaitu dr. W.K. Tehupeiory. Dana yang berhasil dikumpulkan ASF berasal dari tentera KNIL yang bersedia menyumbangkan 10 sen gajinya setiap bulan. Selain itu para pegawai lain juga melakukannya. Dengan demikian sudah banyak pemuda Maluku yang berbakat dikirim ke negeri Belanda untuk meneruskan pendidikan.

Martinus Putuhena menuju ke Batavia (Jakarta). dr. Tehupeiory mengajukan pertanyaan, "Apakah yang ingin anda pelajari?" Dengan cepat Martinus menjawab bahwa ia ingin menjadi dokter. Namun dr. Tehupeiory menjelaskan kepadanya, tahun itu ASF tidak mempunyai dana yang cukup untuk biaya ke Negara Belanda. Ia menganjurkan agar Martinus belajar teknik saja. Pada mulanya Martinus sangat kecewa, tetapi setelah dipikirkannya matang-matang, akhirnya ia menghadap Ketua ASF itu lagi dan menyatakan persetujuannya.

Sebelumnya dalam pikiran Martinus timbul hasrat untuk memasuki Stovia (*School tot Opleiding van Indische Artsen*). Sekolah itu berdiri pada tahun 1901 dan merupakan penyempurnaan dari Sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada pertengahan abad ke-19. Namun STOVIA menerima calon dari

MULO. Dengan demikian, apabila Martinus menjadi mahasiswa STOVIA, sesungguhnya ia mengorbankan masa studi di AMS. Padahal pada waktu itu cuma beberapa orang Indonesia yang sudah lulus AMS. Berdasarkan pertimbangan itulah akhirnya memilih untuk ke Bandung.

Technische Hoge School (THS), pendahulu ITB, didirikan pada tahun 1920. sebagai perguruan tinggi pertama di Indonesia. Itu pun pada mulanya dipelopori oleh pihak swasta, dan setelah setahun berdiri baru diambil alih Pemerintah Hindia-Belanda. Pada waktu itu antara lain ada jurusan Sipil Basah dan Sipil Kering. Martinus memilih jurusan Sipil Basah.

Masa perpeloncoan yang pada masa itu masih keras sekali, harus dilalui Martinus pula. Pada saat-saat itulah ia merasa seakan-akan di neraka. Ia diharuskan minum minyak ikan (kastroli) yang sangat busuk baunya itu. Kemudian ia dihajar lagi dengan telur busuk. Ia diharuskan membersihkan sepatu para seniornya. Dan lain-lain permainan keji yang dilakukan dengan harapan terbinanya suatu semangat korps di kalangan mahasiswa.

Selama masa perpeloncoan Martinus tetap sabar. Tutur-katanya tetap sopan dan lembut seperti biasa. Penggunaan bahasa Ambon sekali-sekali muncul juga, sekali pun bahasa resmi adalah bahasa Belanda. Ia mulai berkenalan dengan pelbagai kalangan yang akhirnya akan menjadi sahabatnya di kemudian hari. Jumlah orang Indonesia ketika itu sangat sedikit, antara lain dari Jawa dan Sumatra. Ia satu-satunya yang berasal dari Maluku.

Tempat pemondokannya adalah sebuah kamar yang dibaginya dengan dua orang yang sudah bekerja. Rumah itu milik Tante Emma Wattimena yang bersedia menyewakan kamar dengan harga yang tidak terlalu mahal. Rumah itu terletak cukup jauh dari tempat kuliah di Dago, yaitu di bilangan Cikudapateah. Untuk ke sekolah Martinus menggunakan sepeda. Mula-mula memang agak berat, karena jalan dari rumah

ke tempat kuliah mendaki. Inilah mungkin yang menyebabkannya sering mengantuk di sekolah. Pernah ia ditegur seorang dosen yang menganjurkan agar ia tidur saja di rumah.

Bersekolah di THS memang lebih mentereng. Tetapi untuk orang yang tidak terlalu kaya hal itu membawa konsekuensi yang sering tidak menyenangkan karena para mahasiswa THS harus membayar segala keperluannya sendiri. Juga apabila mereka ingin berlibur.

Hal itu berbeda dengan orang-orang yang belajar di STOVIA atau NIAS (*Nederlands Indische Artsen School*) di Surabaya. Kedua sekolah kedokteran itu menerima mahasiswa dari MULO. Selain itu para mahasiswanya diberi beasiswa oleh pemerintah. Asrama pun disediakan. Liburan ke kampung halaman juga mendapat fasilitas dari pemerintah. Apabila lulus, mereka diharuskan menjadi pegawai negeri untuk sekurangnya 10 tahun.

Selain di kedua sekolah itu, sejak tahun 1921 ada sejumlah wanita dari Ambon yang disekolahkan di *Frobel Kweekschool* di Bandung. Ini berawal dari kunjungan Nyonya dan Gubernur Jendral Tjarda van Starkenborg Stachouwer ke Ambon. Dalam perjalanan ke Saparua mereka mendapat sambutan istimewa. Pengalungan bunga dilakukan oleh seorang gadis yang baru lulus dari *Saparoeasche School*. Karena tidak ada biaya, gadis itu tetap tinggal di rumah membantu orang-tuanya. Pada saat pengalungan bunga itu terjadilah percakapan antara Nyonya Gubernur Jendral dengan gadis itu. Gadis itu ditanya apakah ia berkeinginan melanjutkan sekolah. Karena ia menjawab positif, sang istri gubernur jenderal pun mengusulkan agar ia mengumpulkan 10 orang kawannya yang sudah tamat sekolah untuk dikirim ke *Frobel Kweekschool* di Bandung. "Segalanya akan ditanggung pemerintah," kata istri pembesar itu.

Dengan demikian berangkatlah rombongan gadis-gadis itu ke Bandung. Asrama mereka ditanggung, demikian pula biaya liburan ke kampung halaman setahun sekali.

Bagi yang tidak bisa menikmati fasilitas pemerintah seperti Martinus Putuhena, satu-satunya jalan untuk pulang kampung adalah dengan cara menabung. Martinus, sang calon insinyur, harus puas diri dengan karcis dek atau geladak. Untuk makan ia harus antre. Tetapi kadang-kadang ada pula kawan yang menyewa kamar mengajaknya tidur di kamarnya. Perjalanan pulang kampung bersama para mahasiswa dan siswi lainnya itu sungguh mengesankan. Perjalanan yang cukup lama itu memberi kesempatan untuk saling berkenalan. Inilah kesempatan orang bisa saling jatuh cinta dan mengobrol segala macam janji yang ternyata tidak pernah ditepati.

Di masa berkuliah di Bandung itu pula Martinus Putuhena mulai berkenalan dengan politik. Terutama perkenalannya dengan Bung Karno merupakan langkah yang sangat penting ke arah dunia pergerakan nasional Indonesia. Bung Karno setahun lebih dulu di THS. Ketika Bung Karno dan kawan-kawannya membentuk *Algemeene Studie Club*, Martinus Putuhena pun menjadi anggota. Rapat-rapat yang dilakukan organisasi itu sering diadakan di sekitar Mesjid Agung. Tidak jarang Martinus mendapat giliran mengintai kalau-kalau PID, polisi rahasia Belanda, datang. Dalam kesempatan-kesempatan itulah Martinus mulai mengenal masalah bangsa Indonesia.

Sesudah keduanya lulus dari THS, kedua orang itu tetap bersahabat. Tidak jarang Martinus makan dan menginap di rumah Ibu Inggit, istri kedua Bung Karno. Hubungan keduanya memang sangat erat. Martinus juga mulai mengenal tokoh-tokoh pergerakan dari kalangan orang Ambon. Dalam kesempatan berlibur ke Jakarta, ia sekali-sekali bertemu dengan dr. Kayadu yang memimpin Yong Ambon. Juga tokoh-tokoh Sarekat Ambon (didirikan di Semanang pada tahun 1922) dikenalnya, seperti Andi Tupamahu dan Dolf Pattipeilohy.

Rupanya selama belajar di THS kepribadian Martinus Putuhena tidak banyak berubah. Ia tetap seorang pendiam, tenang, dan penuh pertimbangan. Karena sifat pendiamnya, kawan-kawannya

wan mahasiswanya sering menamakannya *Willem de Zwijger* atau Willem si Pendiam, menurut julukan salah seorang raja Eropa.

Di tahun terakhir studinya di THS, Martinus Putuhena diharuskan melakukan praktek. Tugasnya adalah menyurvei keadaan rawa-rawa di Krawang dan sekitarnya. Pada saat air naik, rawa-rawa itu akan tergenang sehingga diperlukan perahu. Tetapi kalau air laut surut, sulit orang melaluinya. Berjam-jam lamanya ia harus mengukur ketinggian air pada saat-saat yang berbeda-beda. Pekerjaan ini memang cocok baginya karena membutuhkan banyak ketegangan dan kesabaran. Ketika malam tiba ia terpaksa menginap di sebuah gubuk di tengah rawa-rawa itu, ditemani nyamuk dan sebuah lampu pelita.

Pada tahun 1927, Martinur Putuhena lulus ujian sarjana dan berhak menyandang gelar insinyur. Prestasi yang sungguh besar bagi seorang anak nelayan. Tanpa bantuan beasiswa-beasiswa tersebut di atas perjalanan hidup Martinus mungkin akan lain sama-sekali. Tetapi lebih dari beasiswa, kecerdasan dan ketekunan serta kesabarannya merupakan modal pokok untuk bisa berprestasi dalam bersekolah.

Sejarah pendidikan ir. Martinus Putuhena juga menunjukkan suatu gejala lain. Perubahan sosial dalam bagian pertama abad ke-20 di Indonesia nampaknya terutama disebabkan oleh munculnya sekolah-sekolah modern di kota-kota. Ini menyebabkan anak-anak desa, yang sebelumnya tidak mempunyai jangkauan pandangan yang melampaui desanya, bisa beranggangan untuk mencapai kedudukan yang sebelumnya hanya disediakan untuk orang Belanda.

Selain ir. Putuhena, banyak orang Ambon yang melalui jalur yang sama. Demikian pun pelbagai suku lainnya di Indonesia. Kesempatan yang diberikan oleh Belanda memang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian muncullah suatu lapisan sosial baru di Indonesia, yaitu kaum cendekiawan. Mereka mempunyai gaya hidup yang sangat berbeda dengan

gaya hidup orang-tuanya di desa-desa. Bagi banyak orang, terutama dari lapisan yang rendah seperti Martinus Putuhena, perubahan itu merupakan perubahan yang fundamental. Ini pertama kalinya, dan dalam bentuk kecil, dirasakan oleh Martinus Putuhena ketika ia menerima ijazah setelah lulus dari *Saparoeasche School*. Ketika itu untuk pertama kali seorang Belanda, yaitu Kepala Sekolah, menyapanya dengan "Meneer Martinus Putuhena, tuan Martinus Putuhena". Seakan-akan ia telah mencapai derajat yang sama dengan orang Belanda itu sendiri. Ini tidak pernah dialami ayahnya, sekalipun tergolong orang terpendang di desanya.

Namun yang menarik dari diri Ir. Martinus Putuhena adalah bahwa kedudukan yang demikian tinggi di mata penduduk desa, status yang istimewa dalam masyarakat kolonial, tidak mengubah wataknya. Ia tetap seorang yang rendah hati, penuh pertimbangan, dan jujur. Nilai-nilai ini terutama akan nampak dalam perjalanan hidupnya yang tidak kurang bergejolak dibandingkan dengan masa-masa sekolahnya.

BAB III INSINYUR SIPIL DI MASA PENJAJAHAN

Martinus Putuhena memperoleh ijazah insinyur sipilnya pada tanggal 4 Mei 1927. Ijazah itu ditandatangani oleh Ketua J. Clay, dan Sekretaris H. van Been dari *Faculteit van Technische Wetenschap* (Fakultas Teknologi) dari *Technische Hogeschool* di Bandung.

Langkah pertama dalam kariernya adalah melamar pada Jawatan *Verkeers en Waterstaat* (Jawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga), dan diterima karena memang tenaga insinyur pada masa itu masih sangat sedikit.

Tugas pertamanya ialah mengawasi pembangunan gedung Kantor Pos Besar di Bandung.

Sekitar lima tahun lamanya ir. Martinus Putuhena bertugas di Bandung. Dapat dimengerti, hubungannya dengan kawan-kawan sekuliahnya tidak putus begitu saja. Persahabatan dengan ir. Sukarno pun tidak pernah mengendor.

Sekalipun ia tidak pernah bergabung dengan partai politik yang dekat dengan Bung Karno, dalam masa-masa itu persahabatan mereka tetap erat.

Sekali-sekali Putuhena masih nampak di rumah Sukarno untuk bertamu. Pada saat-saat tertentu Sukarno mengadakan malam ramah-tamah dengan mengundang para sahabat lamanya.

Perubahan dalam hidup Putuhena mulai nampak setelah menikah. Wanita yang dipilihnya sebagai pendamping hidupnya adalah seorang wanita Indo kelahiran Solo, bernama Helena van den Berg. Perkawinan itu dilangsungkan pada tahun 1928 di Bandung. Dari perkawinan itu lahir tiga orang anak. Anak pertama, seorang putri bernama Tieneker, lahir tahun 1930. Kemudian menyusul seorang putri lagi bernama Corry, lahir pada tahun 1933, dan seorang putra yang lahir tahun 1936.

Dalam banyak hal Helena van den Berg berlainan dengan suaminya. Helena beragama Katolik, sedangkan Putuhena beragama Protestan. Karena peraturan Gereja Katolik yang demikian ketat, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu juga mengambil agama Katolik. Tetapi nampaknya dalam kehidupan rumah tangga perbedaan agama ini tidak menimbulkan keretakan yang serius. Di saat makan, umpamanya, Putuhena sering memimpin doa menurut agamanya. Anggota keluarganya ikut berdoa tetapi dengan cara mereka sendiri.¹⁶

Suatu hal yang menarik adalah kenyataan, Putuhena di masa mudanya kurang sekali mengunjungi gereja.

Selain beragama Katolik, Helena van den Berg yang lahir di Solo itu, juga sangat kejawaan. Di rumah ia sering menggunakan bahasa Jawa. Hubungan-hubungan kekeluargaan serta para sahabatnya banyak sekali orang-orang Jawa. Sebab itu Putuhena lambat-laun terbiasa pula dengan lingkungan istrinya itu. Malah hubungan-hubungan ini terus dipelihara setelah berpindah dari Bandung.

Sebagai seorang yang dibesarkan dalam kalangan budaya Jawa, Helena van den Berg —Putuhena juga terlibat dalam dunia mistik. Ia malah dikatakan mempunyai suatu kemampuan untuk meramalkan masa depan. Suaminya sendiri pernah diramalnya akan menjadi orang besar kelak. Helena van den Berg —Putuhena adalah seorang wanita yang juga sangat berambisi. Ia menginginkan kehidupan yang menyenangkan. Ia sangat senang bergaul dengan kalangan elite. Sebab itu tidak mengherankan

bila ia seringkali menjadi tenaga pendorong di belakang Putuhena.

Gaya hidup Helena van den Berg – Putuhena memang sangat mempengaruhi keluarganya.

Sekalipun menekuni dunia mistik Jawa, Helena van den Berg – Putuhena samasekali tidak meninggalkan dunia yang nyata ini. Fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan fungsi suaminya dinikmatinya dengan intens. Hampir setiap minggu malam mereka mengunjungi Sociteit, dan di situ mereka bertemu dengan kalangan sederajat, berbasa-basi, dan tentu saja, berdansa-dansi. Ini memang ciri kehidupan golongan elite di masa itu.

Dalam diri Helena van den Berg – Putuhena bergabung unsur-unsur Barat dan Timur. Penggabungan itu terjadi sangat serasi sehingga tidak menimbulkan konflik. Sesungguhnya gaya hidup ini merupakan gaya hidup khas masyarakat kolonial yang sering dinamakan "budaya Indisch".

Putuhena rupanya secara diam-diam bisa menikmati cara hidup istrinya itu. Melalui "budaya Indisch" yang dimanifestasikan istrinya itu, ia bisa mengenal lebih baik masyarakat Jawa, khususnya golongan elitnya.

Kepribadian Putuhena sendiri tidak banyak berubah. Ia tetap memperlihatkan sifat tenang dan pendiam. Satu kegemarannya, yang mungkin merupakan kegemaran setiap cendekiawan pada masa itu, adalah membaca. Malah ia tergolong kutubuku". Dalam masa berdinis di Bandung ia pernah menghasilkan suatu karya ilmiah mengenai sistem irigasi di Purwakarta.

Tahun 1933 Putuhena dipindahkan ke Batavia, lalu ke Purwakarta. Kemudian mereka dipindahkan lagi ke Cirebon. Di Cirebon lahir anak bungsunya pada tahun 1936. Menjelang Perang Dunia ke-2 Putuhena dipindahkan lagi ke Lombok. Di situlah Putuhena mencapai puncak kariernya di masa penjajahan. Ia diangkat sebagai kepala Jawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga di wilayah itu.

Pembangunan Pelabuhan Ampenan merupakan salah satu bagian dari pekerjaannya. Selain itu beberapa jalan dan jembatan juga berhasil dikerjakan.

Suatu hal yang menarik dari Putuhena dan istrinya adalah pendidikan anak-anaknya. Rupanya kebiasaan-kebiasaan yang pernah dirasakannya sendiri selama masih berada dengan orangtuanya di Ihamahu, dianggapnya sangat cocok untuk anak-anaknya juga. Mereka mendapat pendidikan rumah yang keras. Setiap minggu mereka diharuskan ke gereja. Ketika di meja makan, anak-anak tidak diperkenankan menolak makanan.

Sekalipun Putuhena mendapat mobil dinas, anak-anaknya tidak diperkenankan mengendarainya apabila ia tidak ikut. Malah pada jam-jam dinas mereka samasekali tidak diperkenankan mengendarainya.

Pendidikan semacam ini diharapkan menanamkan nilai-nilai kesederhanaan. Ini memang suatu tujuan pendidikan di daerah pedesaan di Maluku. Melalui cara-cara itu, anak-anak diharapkan bisa menghargai pemberian Tuhan, bisa menghargai apa yang diperoleh secara halal. Melalui sistem pendidikan ini pun anak-anak diharapkan akan bersikap jujur dan rendah hati sistem pendidikan non-formal dalam keluarga ini terutama bertujuan agar anak-anak bisa menghargai lingkungannya.

Melalui Nyonya Putuhena, anak-anak dibawa juga ke lingkungan budaya Jawa. Selain berbahasa Jawa, Ny. Putuhena juga berbahasa Madura karena pernah lama berdiam di Surabaya. Sebagai anak-anak dari keluarga baik-baik, kedua putrinya diharuskan mempelajari tarian Jawa.

Putuhena tergolong kelompok masyarakat baru yang muncul di Indonesia sejak paruh pertama abad ke-20. Ciri pokok golongan ini adalah pendidikannya. Karena mendapat jenjang pendidikan tinggi, mereka lebih banyak merupakan golongan cendekiawan Indonesia yang baru.

Dalam awal abad ke-20 bagian terbesar dari golongan ini muncul sebagai lulusan STOVIA dengan fungsi sebagai dokter.

Kemudian ketika pelbagai perguruan tinggi muncul di Indonesia dalam tahun 1920-an, muncul pula para ahli hukum dan ahli teknik. Tetapi nampaknya kelompok dokterlah yang lebih banyak.¹⁷

Dokter-dokter lulusan STOVIA sebagian terbesar bekerja untuk pemerintah karena biasiswa yang mereka nikmati selama masa studi. Para ahli yang muncul kemudian, terutama para ahli hukum, banyak yang membuka praktek sendiri. Kelompok ahli teknik kebanyakan bekerja untuk pemerintah, seperti Ir. Putuhena.

Sebagai tenaga ahli yang mendapat penghasilan yang relatif lebih banyak dari tenaga ahli non-akademik, mereka merupakan bagian atas lapisan khusus dalam masyarakat. Gaya hidup mereka, seperti nampak pada Ir. Putuhena, berbeda dengan gaya hidup lapisan-lapisan masyarakat lainnya. Karena praktis memegang pimpinan dalam bidang masing-masing, mereka bisa dikatakan golongan elite. Memang pada masa ini masih terdapat suatu lapisan atas yang terdiri dari orang Belanda.

Sesungguhnya mereka terdiri dari dua golongan yang dalam pandangan hidup berbeda. Golongan pertama adalah mereka yang menginginkan perubahan masyarakat, dan ini tidak puas dengan suasana politik dan masyarakat. Golongan kedua adalah mereka yang menerima situasi dan bekerja dalam pelbagai bidang pemerintahan. Golongan ini bersifat non-politik.

Umumnya golongan pertama bergabung dalam pelbagai partai politik dan organisasi masa untuk memperjuangkan ideal-idealnya. Inilah yang memungkinkan munculnya pelbagai partai politik seperti Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Pendidikan Nasional Indonesia. Idealisme golongan ini adalah Indonesia Merdeka.

Mereka yang tidak mengambil jalan politik merupakan yang paling banyak jumlahnya. Mereka mencoba menyumbangkan tenaga melalui pemerintah untuk kepentingan masyarakat juga. Mereka rupanya menerima pimpinan Belanda dalam bidang

mereka sendiri. Mereka harus dibedakan dengan golongan cendekiawan yang membentuk organisasi masa atau partai politik dengan maksud menyokong politik Belanda. Di balik sikap netral karena tidak memasuki partai politik yang menentang atau yang memihak Belanda, banyak yang menaruh simpati kepada masyarakat. Mereka yakin bahwa dengan berbuat nyata dalam bidang masing-masing, sebagian kesulitan masyarakat dapat diatasi.

Karena bekerja dalam instansi-instansi Pemerintah Belanda, dengan sendirinya golongan cendekiawan ini menikmati berbagai fasilitas yang melekat pada jabatannya. Ini jelas nampak pada Putuhena. Rumah dinas selalu tersedia baginya di mana saja ia dipindahkan. Selain itu mobil dinas dengan sopirnya juga tersedia. Sebagai golongan atasan, mereka bisa menikmati fasilitas lain yang disediakan bagi pejabat-pejabat Belanda.

Dalam kalangan atas ini jumlah orang Indonesia tidak banyak. Sampai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hanya terdapat sekitar 20 orang insinyur Indonesia. Beberapa yang langsung dikenal oleh Putuhena dan keluarganya adalah ir. Hudiono, ir. Sutoto, ir. Rooseno, dan ir. Sutedjo. Perkenalan itu pun disebabkan hubungan kerja.

Dalam masa studi di Bandung, Putuhena sangat dekat dengan Sukarno. Ia pun menjadi anggota *Algemeene Studie Club* yang didirikan di Bandung pada tahun 1925.²⁰ Tetapi setelah menikah pada tahun 1928, nampak perubahan yang besar. Putuhena lebih banyak berkecimpung dalam bidang pekerjaannya sendiri. Apalagi setelah Soekarno dibuang di tahun 1930-an dan tidak pernah muncul lagi sampai pada masa pendudukan Jepang. Itulah barangkali yang menyebabkan Putuhena tidak termasuk kelompok yang menentang politik Belanda.

BAB IV MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Revolusi Indonesia yang berlangsung antara 1945 dan 1950, menimbulkan perubahan-perubahan sosial yang tidak sedikit. Hal ini nampak sekali dalam hidup Martinus Putuhena. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada awal tahun 1942, ia berada di Lombok. Ketika itu ia telah mencapai kedudukan yang cukup tinggi, yaitu kepala Jawatan Pekerjaan Umum dan Tenaga (*Verkeer en Waterstaat*) wilayah Pulau Lombok.

Tentara pendudukan Jepang membagi Indonesia ke dalam tiga wilayah. Pertama, pulau Jawa dan Madura yang dikuasai oleh Tentara Keenambelas; kedua, Sumatra yang dikuasai Tentara Keduapuluh; ketiga, pulau-pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan "Sunda Kecil" yang dikuasai Armada Selatan Kedua dari Angkatan Laut Jepang.

Pulau Lombok termasuk wilayah Angkatan Laut Jepang yang berkedudukan di Makasar. Dalam masa ini situasi bagi mereka yang bekerjasama dengan pihak Belanda memang kurang menyenangkan. Bersama dengan orang Belanda, mereka ditawan dan dipenjarakan. Ketakutan Jepang pada segala hal yang berbau Barat nampak sekali.

Tindakan Jepang itu membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Tenaga Belanda yang telah disingkirkan ter-

paksa diganti dengan tenaga Indonesia. Bahasa Belanda yang menjadi bahasa resmi diganti dengan bahasa Indonesia. Memang kemudian para pegawai diharuskan mempelajari bahasa Jepang. Tetapi pengakuan atas bahasa Indonesia tersebut memang membawa keuntungan yang tidak sedikit bagi perasaan kebanggaan dan persatuan nasional.

Tidak semua orang Indonesia yang pernah bekerjasama dengan Belanda, dipenjarakan. Hanya mereka yang dikategorikan sebagai *gelijkgesteld* yang terkena peraturan tersebut. Golongan *gelijkgesteld* adalah orang Indonesia yang "disamakan" secara hukum dengan warganegara Belanda. Sebab itu dalam banyak hal mereka mendapat perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diberikan pada pejabat-pejabat Belanda. Dalam hal kepangkatan hal ini sudah bisa nampak. Malah anak-anak mereka pun diperkenankan memasuki sekolah-sekolah untuk orang Belanda. Rupanya golongan ini sangat ditakuti Jepang karena jelas mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dengan orang Belanda.

Di samping itu ada pula segolongan orang Indonesia yang bekerja sama dengan Belanda, tetapi tidak di *gelijkgesteld*. Secara hukum mereka sangat berbeda dengan orang-orang dari golongan pertama tersebut. Mereka jelas tidak akan menduduki posisi puncak alam pemerintahan dan administrasi pemerintahan. Demikian pun dalam bidang ketentaraan. Sebab itu sedikit-banyaknya mereka tidak terlampaui berkepentingan dalam kehidupan pemerintah kolonial.

Martinus Putuhena termasuk salah seorang yang tidak tergolong *gelijkgesteld*. Sebab itu Martinus Putuhena tidak pernah ditahan Jepang. Ia memang pernah dipanggil dan diinterogasi, tetapi kemudian disuruh pulang.

Di masa pendudukan Jepang, Putuhena tetap bekerja sebagai tenaga ahli dalam Dinas Pekerjaan Umum. Namun segala fasilitas yang pernah dinikmatinya tidak lagi diberikan. Rumah

dinasnya yang besar itu diambil oleh tentara Jepang, dan ia diharuskan mencari tempat agak ke pinggiran kota.

Kekejaman yang kemudian diperlihatkan Jepang terhadap bangsa Indonesia menimbulkan antipati Putuhena terhadap "saudara tua" itu. Ia dengan segan melakukan pekerjaan kantornya. Kalau mungkin ia mencari alasan untuk tidak ke kantor. Dengan cara mengadakan perjalanan dinas, mengunjungi tempat ini dan itu, ia menghindarkan diri bertemu dengan para atasannya. Ia nampak lebih sering di daerah-daerah kampung.

Tindakannya itu rupanya menimbulkan kecurigaan dari pihak Jepang. Pada suatu hari ia dipanggil *Kenpeitai*. Karena tidak dipenuhi keesokan harinya suatu pasukan kecil *Kenpeitai* datang menjemputnya. Ia dibawa ke lapangan besar di depan kantor pemerintahan di Mataram. Dengan tangan terikat di belakang ia berdiri di tengah-tengah lapangan kantor pemerintahan itu. Tidak berapa lama datang orang-orang dari pelbagai penjuru untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Hampir sehari penuh ia dijemur di situ.

Kemudian seorang perwira Jepang dengan samurai panjang datang mendekatinya. Putuhena mendengar bahwa ia dihukum pancung.

Seorang algojo kemudian mendekat dengan samurai. Putuhena ketika itu hanya bisa pasrah dan menyerahkan seluruh nasibnya ke tangan Tuhan. Setelah membungkukkan badannya sesuai perintah algojo tersebut, Putuhena berdoa. Tiba-tiba ia merasa udara sejuk melintasi lehernya dengan cepat, lalu menghilang. Lalu ia mendengar algojo itu berkata, "Jiwa pribumi telah lepas dari diri tuan, jiwa Nippon sudah masuk menggantinya." Hukuman pancung itu rupanya dilakukan secara simbolik. Ia dipersilakan kembali dengan peringatan agar rajin membantu Jepang. Rupanya hukuman itu disebabkan kebiasaannya untuk mengelak berhubungan dengan pihak Jepang.

Tahun 1944 Putuhena ditangkap lagi oleh Jepang. Dalam interogasi dengan *Kenpeitai*, ia mendengar bahwa ia dituduh

ikut menentang kekuasaan Jepang. Memang di masa menjelang masuknya tentara Jepang ke Indonesia, Putuhena pernah harus bergabung dengan pasukan *Vernielingscorps* (pasukan bumi hangus) yang dibentuk Belanda. Maksudnya, agar pada saat Jepang mendarat, gedung-gedung dan instalasi-instalasi vital yang bisa membantu usaha peperangan Jepang, dihancurkan. Tetapi tentu sudah lama diketahui oleh pihak *Kenpeitai*.²³

Sejak tahun 1943 tentara Jepang sudah mulai dikalahkan dalam front Pasifik. Tahun 1944 lebih parah lagi. Kubu-kubu pertahanan yang penting di Pasifik telah jatuh ke tangan Amerika Serikat. Malah jalan telah terbuka bagi Amerika Serikat untuk merebut kembali Kepulauan Pilipina. Dari tempat-tempat yang telah direbut itu, Angkatan Udara Amerika Serikat berhasil mengirim pesawat-pesawat pembomnya untuk mengebom kota-kota industri di Jepang.

Keadaan ini menyebabkan pihak Jepang berusaha keras untuk menarik simpati rakyat yang dikuasainya. Kekhawatiran akan "pengkhianatan" dari para pemimpin rakyat mulai membayang. Sebab itu di pelbagai wilayah di Asia Tenggara, Jepang mulai membentuk negara-negara boneka, seperti di Pilipina dan di Birma. Di Indonesia usaha-usaha ke arah itu dimulai sejak awal 1945.

Selain itu, bersamaan dengan kemajuan pasukan Sekutu, di pelbagai wilayah Asia Tenggara muncul gerakan-gerakan bawah-tanah yang akan menyabot pasukan Jepang apabila pasukan Sekutu mendarat. Di Indonesia gerakan-gerakan itu nampak di pelbagai tempat. Malah banyak orang Ambon yang dituduh terlibat dalam gerakan-gerakan ini. Ada gerakan yang dikendalikan oleh pihak Belanda, tetapi ada pula yang dikendalikan oleh pihak Inggris.

Salah satu gerakan yang terdapat di Jakarta dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Tempat persembunyiannya berpindah-pindah di Jawa Barat. Gerakan lainnya dipimpin oleh Amir Sjarifuddin. Gerkaan Amir ini ternyata kemudian terbongkar dan Amir ter-

tangkap. Hukuman mati yang dijatuhkan bisa dibatalkan karena campur-tangan Hatta dan Sukarno yang dekat dengan pimpinan tentara Jepang di Jawa.

Pimpinan masyarakat Ambon di Jawa, yaitu Mr. Latuharhary, juga tertangkap karena dituduh menyembunyikan orang-orang Ambon yang terlibat dalam gerakan-gerakan bawah tanah Sekutu. Salah seorang dari yang tertangkap itu, dr. Kayadu, akhirnya meninggal karena disiksa. Dokter Leimena yang ketika itu menjadi direktur Rumah Sakit Zending di Purwakarta, akhirnya ditangkap karena dituduh terlibat dalam gerakan Amir Sjarifuddin. Ia dipenjarakan di markas *Kenpeitai* (sekarang gedung Hankam, Jl. Merdeka Barat Jakarta) beberapa bulan, dan akhirnya dibebaskan karena berhasil menyembuhkan penyakit pimpinan markas tersebut.

Di Maluku sendiri muncul gerakan-gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan masuknya tentara Sekutu. Pimpinan gerakan bawah tanah di Indonesia Timur itu adalah J. Tahya, seorang anggota pasukan Belanda.

Kemungkinan besar Martinus Putuhena juga dituduh terlibat dalam gerakan-gerakan semacam ini. Setelah diinterogasi di Mataram, ia diangkut ke Denpasar, Bali. Di sana ia ditawan selama kurang lebih tujuh bulan. Perubahan terjadi karena munculnya suatu gerakan dalam tubuh tentara Jepang sendiri.

Pada suatu ketika Putuhena dihubungi seorang perwira Angkatan Laut Jepang di penjara. Perwira muda yang bernama Ida itu mengatakan, ia bisa mengusahakan agar Putuhena dipindahkan ke Jakarta. Pemindahan itu sudah tentu dilakukan secara resmi. Di Jakarta ia diharuskan bekerja di Jawatan Perkebunan, bidang yang jauh dari tugas dan keahliannya.

Mengapa tiba-tiba pihak Angkatan Laut Jepang berbaik hati kepada Martinus Putuhena, belum jelas. Mungkin hanya dokumen-dokumen resmi tentara Jepang yang bisa mengungkapkan hal ini. Tetapi dugaan-dugaan berdasarkan peristiwa-

peristiwa yang terjadi di sekelilingnya, dan analogi dengan peristiwa serupa, bisa membuka beberapa kemungkinan.

Ketika itu pihak Jepang sudah melontarkan gagasan pembentukan negara boneka di Indonesia. Malah Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada waktu itu juga sudah dibentuk. Seperti diketahui, Panitia itulah yang ditugasi memikirkan landasan-landasan bagi negara yang akan dibentuk itu. Kemudian datang berita, negara boneka yang akan dibentuk itu akan diproklamasikan pada bulan September 1945. Panitia Persiapan yang sudah merampungkan tugasnya itu dibubarkan, diganti dengan suatu Panitia yang akan memproklamasikan dan memegang kekuasaan negara baru tersebut. Untuk itu Sukarno dan Hatta diundang ke markas Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara yang ketika itu sudah dipindahkan dari Manila ke Saigon untuk mendapat restu. Dalam perjalanan pulang kedua tokoh nasional itulah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki sehingga Jepang terpaksa menyerah pada Sekutu. Perkembangan selanjutnya ternyata berada di luar kekuasaan Jepang.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Sukarno-Hatta itu ternyata berbeda dengan Panitia Persiapan sebelumnya. Panitia ini beranggotakan wakil-wakil dari Jawa maupun luar Jawa.

Para pemimpin masyarakat yang berasal dari Indonesia bagian Tengah dan Timur ketika itu memang berada di Jakarta. Banyak di antara mereka tergabung dalam organisasi Asrama Indonesia Merdeka yang dipimpin Achmad Soebardjo, yang ternyata dipilih menjadi sekretaris Panitia Sukarno-Hatta tersebut. Dokter Sam Ratulangi, umpamanya, berada di sana. Demikian pula Mr. Latuharhary mempunyai ikatan erat dengan organisasi itu.

Selain itu sudah lama pihak Angkatan Darat Jepang mengangkat Mr. Latuharhary sebagai pimpinan masyarakat Maluku

di Jawa, dan berkantor pada "Kantor Urusan Maluku" yang merupakan bagian dari Kantor Pemerintahan Jepang.²⁵

Pada saat-saat menjelang pembentukan Panitia Sukarno-Hatta tersebut, beberapa perwira Angkatan Laut Jepang menghubungi Mr. Latuharhary dan para pemimpin pemuda Ambon, dengan desakan agar bergabung dengan Sukarno-Hatta. Dengan demikian mereka mengharapkan agar wilayah Maluku juga diwakili dalam negara boneka yang akan dibentuk itu, seperti juga daerah-daerah lainnya.

Memang belum ada bukti yang ditemukan bahwa pemin-dahan Martinus Putuhena dari Denpasar ke Jakarta ada hubungannya dengan perkembangan tersebut. Ia tidak bergabung dengan organisasi yang dipimpin oleh Mr. Latuharhary yang ditugasi membimbing masyarakat Maluku di Jawa. Ia samasekali tidak terlibat dalam diskusi-diskusi yang kemudian muncul di kalangan panitia yang membicarakan dasar-dasar negara dan konstitusinya. Tetapi dalam masa itu ia telah berusaha untuk bertemu dengan kawan lamanya semasa berkuliah, yaitu Sukarno yang pada waktu itu sudah tergolong orang penting di Indonesia.

Dengan berada di Jakarta pada saat-saat yang sangat menentukan dalam sejarah Indonesia, Putuhena berhasil turut serta dalam proses yang berlangsung cepat selama bulan-bulan terakhir tahun 1945. Seperti telah diketahui umum, setelah Indonesia diproklamasikan oleh Sukarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, muncul pelbagai masalah. Pertama-tama para pemuda tidak sabar, dan menghendaki agar tentara Jepang menyerahkan segala kekuasaan kepada pemerintah Indonesia. Tetapi di pihak lain, tentara Jepang mengetahui aturan-aturan perang yang menentukan bahwa pihak yang kalah tidak diperkenankan membuat perubahan-perubahan yang merugikan pihak yang menang. Masalah lain mulai timbul ketika diketahui, bahwa Inggris akan ditugaskan ke Indonesia untuk melucuti Jepang dan memulangkan mereka. Inggris jelas kurang bersedia

berbicara dengan Sukarno-Hatta yang dituduh sebagai "kolaborator" dengan Jepang. Situasi intern Indonesia yang sesungguhnya belum diketahui Inggris ketika itu. Negara Indonesia yang baru diproklamasikan itu masih disangka buatan Jepang.

Untuk memungkinkan perundingan-perundingan dengan Inggris, pemerintah memutuskan untuk melangkahi konstitusi dan membentuk suatu Kabinet Parlementer. Suatu Komite Nasional Indonesia Pusat memang sudah dibentuk, dan dinyatakan sebagai parlemen sementara. Pada tanggal 14 Nopember 1945 dibentuk pula suatu kabinet yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir.

Sutan Sjahrir dianggap orang yang bisa diterima oleh Sekutu karena selama pendudukan Jepang tidak bersedia bekerjasama dengan tentara pendudukan itu. Ia malah dikenal sebagai seorang pemimpin gerakan bawah tanah. Selain itu, aliran politiknya yang bersifat sosialisitik tidak jauh berbeda dengan aliran politik pemerintah yang sedang berkuasa di Inggris.

Dengan sendirinya seluruh Kabinet Sjahrir itu harus terdiri dari orang-orang yang "bersih" pula. Putuhena bisa dinyatakan memenuhi syarat. Namun masalahnya tidak demikian saja. Masalah yang juga penting adalah mengikutsertakan orang-orang Ambon yang selama masa pendudukan Jepang itu juga sangat menentang tentara pendudukan tersebut. Selain itu orang Ambon juga bisa dianggap berbahaya bila tidak diikutsertakan dalam perkembangan baru. Dikhawatirkan mereka bisa dipengaruhi oleh Belanda yang sudah pasti akan kembali ke Indonesia sehingga bisa menimbulkan masalah.

Pilihan atas Putuhena sebagai menteri pekerjaan umum mungkin sekali dipengaruhi pula oleh Sukarno.

Dalam suasana sistem parlementer ini, Kabinet Sjahrir tidak tahan lama. Kabinet yang dibentuk tanggal 14 Nopember 1945 itu kemudian menyerahkan kembali mandatnya kepada **presiden** pada tanggal 12 Maret 1946. Terutama politik perundingan dengan Inggris dan Belandalah yang menyebabkannya.

Tan Malaka dan Persatuan Perjuangannya menentang segala macam kompromi. Sutan Sjahrir dipersilakan membentuk lagi Kabinet pada tanggal 12 Maret. Kabinet ini pun dibubarkan pada tanggal 2 Oktober 1946. Pada hari itu juga dibentuk Kabinet Sjahrir ke-3 yang bertahan sampai 3 Juli 1947.

Selama ketiga kabinet itu, yaitu sekitar 20 bulan, Putuhena tetap dipertahankan sebagai menteri pekerjaan umum. Pemilihan atas Putuhena memang tepat karena dia pernah secara langsung berkecimpung dalam bidang ini, dan pernah mencapai pangkat yang cukup tinggi dalam bidang ini di masa penjajahan. Dengan demikian pengetahuan teknisnya dapat diandalkan.

Kementerian Pekerjaan Umum tidak banyak berbeda dengan Jawatan *Verkeers en Waterstaat* di masa lampau. Kementerian itu dibagi empat direktorat, yaitu Direktorat Jalan-jalan Umum; Direktorat Perairan; Direktorat Ketenagaan; dan Direktorat Teknik Penyehatan. Direktorat Jalan-jalan Umum berpusat di Bandung. Dalam masa ini memang tidak banyak yang dapat dikerjakan. Pertama-tama tenaga ahli Indonesia sendiri masih sangat sedikit. Ketika itu hanya terdapat 21 tenaga teknik bangsa Indonesia, dan tidak semuanya aktif dalam bidang pemerintahan. Selain itu kebijaksanaan pemerintah dipusatkan pada memenangkan perundingan dan peperangan dengan pihak Belanda. Kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sendirinya kurang mendapat perhatian.

Jakarta dalam bulan Nopember dan Desember itu memang sangat kacau. Tentara Inggris yang mendarat untuk memulangkan tentara Jepang, diikuti oleh tentara Belanda. Pihak Belanda malah berusaha agar setelah tentara Inggris melaksanakan tugasnya, merekalah yang akan mengambil-alih kekuasaan. Masyarakat Indonesia bertekad menentang usaha tersebut.

Dalam situasi itu sejumlah pemuda Ambon di bawah asuhan Mr. Latuharhary berinisiatif membentuk Angkatan Pemuda Indonesia Ambon (API-Ambon). Selain ikut mempertahankan Proklamasi, mereka juga merasa berkewajiban untuk melindungi

masyarakat Maluku dari pertentangan kesukuan yang tentu akan meletus dalam suasana panas itu. Karena banyak orang Maluku yang tidak mengerti suasana dan terang-terangan memihak Belanda.

Ketegangan sudah mulai sejak bulan Oktober, terutama tindakan tidak bertanggungjawab dari suatu kelompok laskar tertentu yang pada suatu ketika berhasil melontarkan "Perang terhadap Ambon, Menado, dan Indo". Pernyataan ini ternyata tersiar melalui RRI sehingga situasi makin gawat. Pembunuhan terhadap orang Ambon mulai terjadi di kota Jakarta.

Dalam situasi inilah API-Ambon bertindak, antara lain dengan memberikan penerangan-penerangan mengenai keadaan yang sesungguhnya. Ketika situasi meningkat, mereka mulai mencari upaya untuk melindungi masyarakat Maluku. Mereka menyiapkan beberapa tempat di sekitar Jalan Kramat II sampai Kramat VII. Masyarakat yang merasa terancam diangkut bersama keluarga mereka dari rumah-rumah dan ditampung di wilayah tersebut. Orang-orang Menado juga dikerahkan ke sana oleh pihak KRIS (Kebaktian Republik Indonesia Sulawesi).

Atas desakan API Ambon, ir. Putuhena dan keluarga juga ditempatkan di Jl. Kramat II. Di muka rumah sang menteri Dwiwarna tetap berkibar, untuk memberi kesan bahwa tempat itu terutama adalah milik Republik Indonesia. Banyak orang di kalangan pengungsi Ambon masih mengira bahwa yang melindungi mereka pihak Belanda. Ketua API-Ambon yang pertama, Nono Tanasale, adalah seorang pemuda Ambon yang banyak berhubungan dengan gerakan bawah tanah Belanda. Dalam bulan Desember ia menunjukkan warnanya dengan terang-terangan beralih kepada Belanda dan bersama para pemudanya merebut pimpinan atas wilayah Kramat itu.

Tindakan Nono Tanasale memang sesuai dengan keinginan pihak Inggris untuk mengosongkan kota Jakarta dari unsur-unsur Republik. Sebelum pasukan Nono Tanasale menduduki

wilayah itu, markas API-Ambon yang terletak di mulut Kramat V (bekas rumah dr. Kayadu), sehari penuh digempur Inggris. Meriam-meriam Inggris menghantam gedung itu dari dua arah. Setiap setengah jam mortir dan meriamnya memuntahkan peluru sehingga rumah itu akhirnya hancur berantakan. Sesudah itulah pasukan Nono Tanasale menyerbu dan melucuti pasukan API-Ambon.²⁶

Kejadian ini memang tidak dialami ir. Putuhena. Sebelumnya seluruh anggota kabinet dan pimpinan negara telah pindah ke Yogyakarta. Hanya Perdana Menteri Sjahrir yang tetap di Jakarta untuk meneruskan perundingan-perundingan dengan Inggris. Penggempuran atas markas API-Ambon tersebut akibat organisasi itu menolak meninggalkan Jakarta seperti organisasi lasykar lainnya. Pada masa berikutnya API-Ambon memang masih mempunyai perwakilan di Jakarta, tetapi dalam Konferensi Pemuda Maluku di Yogyakarta, Februari 1946, organisasi itu melebur dengan organisasi pemuda lainnya menjadi Pemuda Indonesia Maluku. Pimpinannya adalah J.D. de Fretes, Sekretaris Gubernur Maluku mr. Latuharhary yang juga telah mengungsi ke Yogya.²⁷

Dalam tugasnya sebagai menteri pekerjaan umum, ir. Putuhena sering berhubungan dengan para pemuda itu. Ketika itu Pemuda Indonesia Maluku memiliki suatu pasukan bersenjata (laskar) yang dinamakan Pasukan Pattimura, suatu keadaan yang umum di masa itu sebelum terjadi reorganisasi TNI. Satu pasukan Pattimura beroperasi di Jawa Barat dengan markas di Cirebon, satu berada di Jawa Tengah dengan markas di Yogyakarta, dan satu lagi di Jawa Timur dengan markas di Malang.

Ketika mengunjungi pelbagai kegiatan PU di Jawa Tengah, ir. Putuhena sempat menghubungi anak-buah pasukan Pattimura tersebut. Dalam kesempatan itu ia memberi wejangan mengenai patriotisme, keharusan mempertahankan Proklamasi, dan lainnya yang penting untuk memupuk semangat perjuangan

para pemuda tersebut. Dengan cara itu ia tetap berhubungan langsung dengan masyarakat Maluku.

Di Yogyakarta ir. Putuhena bersama keluarganya berdiam di Jl. Widodo no. 1. Sekitar itu pula berdiam Amir Sjarifuddin, mr. Assaat, drs. Mohammad Hatta, dan lain-lain tokoh pemerintahan.²⁸ Tugas PU waktu itu tidak banyak karena wilayah yang dikuasai RI di Jawa hanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di wilayah lainnya Belanda makin berpengaruh.

Ada beberapa tindakan yang sangat menentukan bagi perkembangan RI kepentingan bangsa, dan masyarakat umumnya. Salah satu hal yang sangat penting adalah pengaturan bidang ketenagaan. Pada masa pendudukan Jepang perusahaan listrik dan gas diserahkan kepada pihak swasta yang dipimpin Jepang. Segera setelah Proklamasi dikumandangkan, para pemuda mulai bertindak dan mengambil-alih pelbagai lembaga yang ditangani Jepang. Sebab itu di masa Kabinet Presidensial pertama, ketika Abikusno Tjokrosujoso menjadi menteri pekerjaan Umum, pemerintah memutuskan untuk membentuk Jawatan Listrik dan Gas dengan kedudukan di Yogyakarta. Itulah modal pertama Kementerian Pekerjaan Umum.

Dalam bidang lain dapat dikatakan bahwa tugas utama adalah merehabilitasi apa yang hancur di masa pendudukan Jepang. Sebab itu ir. Putuhena juga sering mengadakan kunjungan dinas ke pelbagai pelosok di Jawa yang dikuasai RI. Salah satu pusat kementeriannya, yaitu bidang jalan-jalan umum tidak ditempatkan di Yogyakarta, tetapi di Purworejo. Baru pada bulan Juli 1947 bagian itu pun dipindahkan ke Yogyakarta.

Seperti juga jawatan lain, Kementerian Pekerjaan Umum di masarevolusi sangat memerihatinkan. Peralatan tidak memadai, tenaga ahli sangat kurang, dan dana untuk mengongkosi pekerjaan sangat minim. dalam situasi demikianlah pekerjaan tetap dilakukan.

Suatu lelucon pernah diceritakan mengenai perjalanan dinas Menteri Pekerjaan Umum ke Purworejo. Ketika itu mobil

yang dimiliki kementerian hanya beberapa buah, antara lain yang dipakai menteri. Di pertengahan jalan, salah satu ban mobil itu pecah. Bunyinya mula-mula dikira tembakan dari pihak Belanda. Setelah disadari bahwa hanya letusan sebuah ban timbul persoalan bagaimana menanganinya. Ban cadangan tidak ada, akhirnya diputuskan untuk mengisi ban yang kempes itu dengan rumput sehingga dengan guncangan-guncangan yang kuat, sang menteri akhirnya tiba juga di tujuan.

Dalam situasi ini dapat dimengerti pula bila keadaan ekonomi para pegawai, termasuk dari Kementerian Pekerjaan Umum, juga sangat memerihatinkan. Untuk meringankan beban mereka sering ir. Putuhena menawarkan jasa-jasanya.

Sekalipun pihak Belanda mulai mendesak RI dengan cara-cara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, di pelbagai tempat di Indonesia kekuatan RI tetap berusaha untuk bertahan. Untuk memupuk kesetiakawanan dan memberi semangat kepada mereka, menjelang Perang Kemerdekaan I (Juli 1947), Kabinet Sjahrir memutuskan untuk mengirim sejumlah anggota kabinetnya ke Sumatra. Dalam rombongan itu terdapat mr. Mohammad Roem (menteri dalam negeri) berserta Sekretarisnya mr. Sumarman; mr. Sjafruddin Prawiranagara (menteri pertahanan), mr. Maria Ulfah Santoso (menteri sosial), dan ir. Putuhena (menteri pekerjaan umum).

Di pelbagai tempat rombongan itu berpidato. Dalam kunjungan ke Pematangsiantar yang pada waktu itu dijadikan ibukota Sumatra Timur (Medan, seperti Jakarta sudah dikuasai Inggris), ir. Putuhena juga diharuskan berpidato. Ternyata orang yang pendiam dan tenang itu, bisa juga berpidato berapi-api. Ia mampu membangunkan semangat rakyat. Barangkali itulah kesempatan satu-satunya baginya untuk berpidato di muka umum.³⁰

Dalam masa itu Putuhena sangat tertarik pikiran-pikiran politik yang moderat dari Sutan Sjahrir. Sebab itu ia termasuk salah seorang yang gigih mendukung perundingan-perundingan

yang dipimpin Sjahrir. Pandangan serupa agaknya juga terdapat di kalangan pemimpin Maluku lainnya, seperti mr. Latuharhary yang ketika itu menjabat gubernur Maluku. Dr. Leimena pun sependapat dengan mereka.

Masalah pro dan anti perundingan itu terutama meningkat ketika hasil-hasil yang telah dicapai Sjahrir harus dirundingkan dan diratifikasi oleh parlemen. KNIP yang ketika itu bertindak sebagai parlemen, nampaknya tidak akan sanggup mendukung Sjahrir, padahal langkah yang dicapai itu sangat penting untuk menghindarkan ketegangan dengan Belanda memuncak.

Sjahrir telah sepakat dengan Belanda di Linggajati, agar setelah Inggris meninggalkan Indonesia, Belanda mengakui kekuasaan RI secara *de facto* atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Golongan Tan Malaka yang sejak semula menentang Sjahrir dan perundingannya, mengancam akan menolak ratifikasi perjanjian itu dalam KNIP. Memang kalau dilihat hasil yang dicapai itu, keadaan menyedihkan. Republik Indonesia akan hanya terdiri atas Jawa dan Sumatra saja. Di lain-lain tempat akan didirikan negara-negara bagian. Menurut Linggajati pembentukan negara-negara bagian itu harus disepakati oleh RI. Namun ternyata Belanda kemudian bertindak sendiri.

Kesepakatan Linggajati itu sebenarnya bisa terjadi karena Presiden Sukarno menyetujuinya. Ketika itu memang ada pengertian bahwa perkembangan selanjutnya akan menguntungkan RI pula. Namun rupanya golongan Tan Malaka tidak sependapat. Untuk mencegah ditolaknya Linggajati oleh KNIP, Presiden mengeluarkan peraturan untuk menambah jumlah anggota KNIP menjadi 400 orang. Setiap partai politik dan ormas diminta mengajukan calon-calonnya mengingat pemilihan umum belum bisa diselenggarakan.

Ketika itu golongan Maluku mendapat jatah dua orang lagi. Salah seorang yang diajukan adalah Putuhena; yang kedua dr. Samalo dari Rumah Sakit Bethesda di Yogyakarta. Dengan tambahan itu wakil Maluku dalam KNIP menjadi tujuh orang,

karena sebelumnya telah ada lima orang, dipimpin mr. Latuharhary.³¹

Tidak lama kemudian Kabinet Sjahrir jatuh akibat usaha untuk merebut kekuasaan dengan cara kekerasan (*coup d'etat*) oleh golongan Tan Malaka. Ketika Presiden Sukarno meminta agar Sjahrir membentuk lagi kabinet, ia menolak. Sejak itu pula Putuhena tidak menjadi menteri lagi.

Selain mewakili masyarakat Maluku dalam KNIP, Putuhena juga menjadi anggota Parkindo (Partai Kristen Indonesia). Ketika KNIP mengumumkan peraturan pembentukan partai-partai pada tanggal 3 Nopember 1945 (di Jakarta), banyak golongan menggunakan kesempatan itu untuk menghidupkan lagi partai yang pernah ada di masa pergerakan nasional. Salah satu golongan itu adalah golongan Kristen.

Pada masa pendudukan Jepang, golongan Kristen diperkenankan bergerak untuk kepentingan agama. Salah satu pusatnya di Jakarta terletak di Balai Kristen, Jl. Kramat Raya 65. Ketika pengumuman itu dikeluarkan, para pemimpin Balai Kristen berapat. Pada tanggal 10 Nopember 1945 berdirilah Partai Kristen Nasional dengan dr. Z.J. Johannes sebagai ketua umum dan Pendeta Probowinoto sebagai Wakil Ketua. Sementara itu di Sumatra Timur juga didirikan Partai Kristen Indonesia (Parki) pada awal 1946. Pada kongresnya yang pertama di Surakarta (April 1947), kedua organisasi itu bergabung dengan nama Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Pimpinannya adalah mr. Sumardi dan mr. A.M. Tambunan, dengan anggota pengurus lainnya adalah kedua anggota kabinet, dr. Leimena dan ir. Putuhena.

Sejak itu Martinus Putuhena menjadi anggota partai tersebut. Peranannya memang tidak terlalu menonjol karena sifatnya yang pendiam dan kurang senang menonjolkan diri. Namun dalam masa-masa selanjutnya sampai tahun 1950 ia tetap memegang kedudukan pimpinan dalam partai itu. Ketika diadakan kongres ke-3 di Jakarta (April 1950), dibentuk pimpinan

kolektif yang bekerja selama tiga bulan. Dalam deretan nama yang dipimpin dr. Leimena itu (9 nama), terdapat pula nama Putuhena.

Dalam kedudukannya sebagai pimpinan Parkindo ia diutus sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan-perundingan dengan BFO ketika antara RI dan BFO terjadi pendekatan. BFO atau *Bijzondere Federate Overleg* (Musyawarah Istimewa Federal) adalah wadah dari para pemimpin negara-negara bagian yang mengadakan perundingan dengan RI.³²

Negara-negara bagian yang diciptakan Belanda itu sudah mulai memperlihatkan sikap memihak RI ketika Belanda untuk kedua kalinya menyerang RI (Perang Kemerdekaan Kedua, Desember 1948), disusul dengan penahanan Sukarno-Hatta di Pulau Bangka. Sebab itu sudah sejak awal 1949 dua orang pimpinan Negara Pasundan berusaha mendekati Sukarno-Hatta. Kemudian Wakil Presiden Hatta menyatakan persetujuan agar antara RI dan BFO diadakan perundingan dengan syarat dikembalikannya Pemerintah RI ke Yogyakarta. Perundingan-perundingan itu akhirnya menelurkan persetujuan untuk mengadakan suatu Perundingan Meja Bundar antara Belanda, BFO, dan RI disaksikan wakil PBB, dengan tujuan membentuk suatu Republik Indonesia Serikat yang akan diakui Belanda. Perundingan-perundingan ini memang berhasil dengan terbentuknya RIS pada bulan Desember 1949. Pada saat itulah Putuhena mendapat tugas baru yang sangat menentukan.

Tetapi sementara itu, sejak tanggal 3 Juli 1947, Putuhena tetap dipertahankan sebagai Pegawai Tinggi Republik Indonesia dengan kedudukan di Yogyakarta. Antara bulan Juli 1947 sampai Desember 1948 ia menjabat kepala Bagian Gedung-gedung Kementerian Pekerjaan Umum.

Salah satu program dari Bagian Gedung-gedung adalah penyusunan rencana pembangunan Kota Yogyakarta. Rencana ini sepenuhnya diserahkan kepada Ir. Putuhena. Salah satu aspek rencana ini adalah pembangunan kampus Uni-

versitas Gajah Mada yang terletak di Bulaksumur. Tanah yang luas ini disumbangkan oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Pembangunan fisiknya memang belum bisa dilakukan pada saat itu. Untuk itu diperlukan biaya yang cukup. Tahun-tahun kemudianlah yang melihat perwujudan kampus tertua di Indonesia itu. Tetapi rencananya sudah diletakkan di masa itu.³³

Selain itu, sebagai seorang tenaga ahli teknik, Martinus Putuhena juga dimanfaatkan oleh Universitas Gajah Mada. Di masa itu banyak tenaga ahli yang bekerja dalam bidang pemerintahan yang menyumbangkan tenaganya sebagai tenaga pengajar. Tugas yang diberikan kepada Putuhena adalah mata kuliah Teknologi Mekanik pada Fakultas Teknik.³⁴

Pada masa itu desakan-desakan yang pernah dirasakan semasa menjadi anggota Kabinet Sjahrir terasa tetap kuat, terutama ketika Ir. Martinus Putuhena diserahi tugas oleh pemerintah pusat untuk membenahi pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai RI. Tugas itu memperlancar lalu-lintas perkapalan di pelabuhan-pelabuhan tersebut, terutama yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Tekanan datang dari golongan kiri yang kurang menyenangi sikapnya. Sering ancaman dialamatkan kepadanya melalui surat-surat kaleng. Namun akhirnya tugas itu dapat dilakukannya dengan selamat.³⁵

Dalam masa revolusi sudah tentu muncul pula banyak persoalan kemanusiaan. Salah suatu contoh yang langsung berkaitan dengan Ir. Martinus Putuhena terjadi setelah dicapainya Perjanjian Renville pada akhir tahun 1947. Perjanjian ini selain menentukan lagi sikap dalam hal pembentukan pemerintahan pusat federal, juga menggariskan batas-batas baru bagi wilayah RI. Kini sebagian besar wilayah pesisir yang sebelumnya dikuasai RI dimasukkan dalam wilayah Belanda. Di situlah kemudian dibentuk negara bagian baru untuk Jawa Tengah.

Salah satu akibat lainnya adalah diharuskannya semua unsur RI meninggalkan wilayah yang dikuasai Belanda itu. Sebaliknya semua unsur yang memihak pada Belanda harus me

ninggalkan wilayah RI. Pada saat itulah terjadi *Long March* Divisi Siliwangi dari Jawa Barat, yang termasuk dalam wilayah Negara Pasundan, ke Yogyakarta. Sementara itu orang-orang Ambon yang berada di Yogyakarta juga mendapat kesempatan untuk bertolak ke Jakarta.

Bagi orang-orang Ambon yang berada di Yogya dan yang berniat ke Jakarta timbul masalah yang sangat sulit. Di luar wilayah Yogyakarta terdapat pos-pos militer Belanda yang memeriksa setiap orang yang masuk-keluar wilayah itu. Banyak orang Ambon yang ditahan dan kereta api yang mereka tumpangi diperintahkan kembali ke Yogyakarta.

Dalam situasi itu banyak orang Ambon yang datang ke rumah Ir. Putuhena untuk meminta nasihat. Putuhena yang menyadari betapa gawatnya keadaan itu, bersedia membantu. Ia turut bersama kereta api yang ditumpangi rombongan tersebut sampai ke pos militer di luar kota. Di sana ia berbicara dengan komandannya. Kemampuan berbahasa Belanda, dan kedudukan terhormatnya dalam pemerintahan, menjamin pembicaraannya. Ia menandakan, mereka yang meninggalkan Yogyakarta itu bukan unsur-unsur perang atau mata-mata musuh. Mereka sekedar ingin bergabung dengan keluarganya di Jakarta. Keterangan-keterangannya meyakinkan sehingga kereta api tersebut diizinkan meneruskan perjalanan ke Jakarta.³⁶

Buat umumnya orang Ambon, tindakan yang dilakukan tanpa berkonsultasi dengan pemerintah itu sangat terpuji. Ir. Putuhena sendiri sesungguhnya mempertaruhkan nama baik dan jasa-jasanya ketika melakukan hal itu. Semua dilakukannya dengan kesadaran bahwa tindakan itu bukan tindakan yang menentang RI atau membela Belanda, tetapi tindakan membela kemanusiaan.

Ketika Belanda merebut Kota Yogyakarta pada bulan Desember 1948, kebanyakan pejabat pemerintahan ditangkap. Hanya pimpinan negara yang dipenjarakan, selebihnya dipersilakan kembali ke Jakarta. Kota Yogyakarta pada waktu itu

sepenuhnya dikuasai Belanda. Sebab itu Ir. Putuhena pun kembali ke Jakarta bersama keluarganya. Tetapi ketika Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta, ia pun datang lagi untuk meneruskan tugas-tugasnya pada Kementerian Pekerjaan Umum.

BAB V LIKUIDASI NEGARA INDONESIA TIMUR

Setelah melepaskan tugas-tugas sebagai menteri pekerjaan umum dalam Kabinet Sjahrir (1946 - 1947), selama beberapa bulan Putuhena kembali ke tugas-tugas rutin sebagai kepala Jawatan Gedung-gedung di Yogyakarta dan tugas sambilan sebagai dosen pada Universitas Gajah Mada. Dengan dibentuknya Kabinet Republik Indonesia Serikat pimpinan drs. Moh Hatta, oleh ir. Laoh, Menteri Pekerjaan Umum Putuhena diangkat sebagai direktur jendral pekerjaan umum. Tugasnya meliputi Jawatan Gedung-gedung dan Jawatan Jalan-jalan Umum. Ir. M. Sutoto menjadi sekretaris jendral Kementerian PU (sebelumnya menjabat kepala Jawatan Jalan-jalan Umum). Karena tugas-tugasnya yang lebih mendesak di Kementerian Pertahanan, ir. Putuhena tidak berada di kalangan PU.³⁷ Malah selama Kabinet Hatta yang berlangsung selama delapan bulan itu, Putuhena berada di Ujungpandang dengan tugas khusus.

Sejak tahun 1946 Ujungpandang diubah menjadi suatu pusat kekuasaan politik yang mirip sistem kerajaan di bawah naungan Belanda. Keadaan itu bermula dari van Mook, letnan gubernur jendral Belanda. Sejak mendarat di Batavia (Jakarta), ia mengumumkan akan membentuk negara-negara baru di pelbagai wilayah di Indonesia, dan mengusulkan agar pemerin-

tahan di Indonesia berbentuk federal yang bernaung di bawah kekuasaan Belanda.

Gagasan van Mook tidak banyak berbeda dari federalisme. Dalam perundingan-perundingan dengan Sjahrir sejak November 1945, gagasan itu dipaksakan agar diterima. Tetapi pihak RI tidak dapat menerimanya. Namun atas desakan Inggris yang bertugas memulangkan tentara Jepang dan ingin lekas-lekas kembali ke tanah airnya, akhirnya gagasan itu diterima melalui Perjanjian Linggajati.

Menurut Perjanjian Linggajati, wilayah Republik Indonesia terbatas pada Jawa-Madura-Sumatra saja. Di wilayah lain Belanda dan RI akan bersama-sama membentuk negara-negara bagian, dan paling lambat awal 1949 sudah harus terbentuk suatu pemerintahan federal.

Ternyata van Mook mengingkari janji. Pada awal tahun 1946 ia mengadakan konperensi di Malino, dekat Ujungpandang, untuk melontarkan gagasan pembentukan negara-negara bagian itu. Semua wilayah diundang, kecuali RI. Pada akhir tahun itu juga ia mengadakan Konperensi Denpasar yang melahirkan Negara Indonesia Timur. Negara-negara bagian lainnya baru muncul sejak tahun 1948.

Negara Indonesia Timur yang berpusat di Ujungpandang itu berbentuk republik-parlementer. Sebagai presiden diangkat seorang bangsawan Bali, yaitu Sukawati. Kabinet yang dibentuk di Batavia oleh van Mook dipimpin oleh seorang dari Sulawesi Selatan, Nadjamuddin. Perdana menteri pertama NIT itu hanya corong van Mook.⁴⁰

Parlemen NIT terdiri atas pelbagai golongan dari daerah-daerah Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Sunda kecil. Kalau kabinet bersama presiden NIT memihak van mook, Parlemen NIT mencerminkan situasi masyarakat. Ada yang memihak dan ada yang menentang. Mereka yang memihak van Mook membentuk Fraksi Demokrat; mereka yang memihak gagasan federalisme pada umumnya membentuk Fraksi Nasio-

nal; dan mereka yang memihak RI membentuk Fraksi Progresif dan merupakan minoritas.

Kabinet Nadjamuddin digulingkan parlemen ketika timbul Agresi Milier Belanda pada bulan Juli 1947. Golongan-golongan anti van Mook menunjukkan, dengan serangan itu pimpinan NICA sudah melanggar janji. Dr. Warrow diangkat sebagai perdana menteri, tetapi karena juga memegang garis politik Nadjamuddin, pada akhir 1947 ia pun terguling. Sebagai penggantinya diangkat seorang bangsawan Bali yang sebelumnya memegang jabatan menteri dalam negeri NIT, yaitu Anak Agung Gde Agung.⁴²

Anak Agung sejak semula mencoba mencari hubungan dengan RI. Gagasan federalisme memang menjadi dasar politiknya, tetapi ia menginginkan agar ada suatu kerjasama dengan RI untuk mewujudkan Negara Indonesia Serikat yang sejak Linggajati (1946) sudah dicita-citakan. Sebab itu ia mengangkat wakil-wakilnya untuk berhubungan dengan RI. Dalam wadah BFO (Musyawarah Istimewa Federal) yang dibentuk oleh negara-negara bagian tersebut, Anak Agung memperjuangkan cita-citanya yang terlepas dari keinginan Belanda.

Sementara itu perkembangan dalam masyarakat juga sudah mulai berubah. Pihak yang mendukung RI dan Negara Kesatuan mulai bergerak. Fraksi Progresif pimpinan Mononutu, umpamanya, membentuk Gabungan Pejuang Kemerdekaan Indonesia (GAPKI). Pelbagai organisasi lain yang sejalan juga mulai muncul.⁴³

Perubahan besar dalam politik Negara Indonesia Timur muncul ketika Belanda untuk kedua kalinya menyerang pada akhir 1948, bahkan pimpinan RI, Sukarno-Hatta, ditawan dan Yogyakarta diduduki. Timbul reaksi yang kuat di NIT, baik dalam kabinet Parlemen maupun masyarakat. Anak Agung berusaha keras membebaskan para pemimpin RI itu. Pihak PBB juga mengecam keras tindakan Belanda. Sementara itu dalam Konferensi BFO ke-3 di Bandung, Anak Agung mendesak

negara bagian lain agar mendukung tindakannya dan bersama-sama mencari jalan membentuk suatu pemerintahan federal bersama RI.

Suara-suara dalam Parlemen NIT juga sangat keras. GAPKI nampaknya seratus prosen berdiri di belakang RI. Organisasi yang terdiri dari gabungan organisasi kesukuan di Ujungpandang itu, menyetujui gagasan Konperensi Meja Bundar, tetapi sekaligus GAPKI juga menginginkan agar TNI menjadi inti tentara yag baru. Masalah itu sudah berkali-kali dibicarakan antara RI dan Belanda, dan terkenal dengan nama soal *gendarmarie* atau secara kelakar disebut juga soal *jenderal marie*.

Masalah pembentukan tentara dalam negara federal yang akan dibentuk itu menjadi soal yang mengganjal. Masalah itu kemudian merupakan masalah inti yang menyebabkan NIT bisa bertahan untuk beberapa lama. Masalah itu pun merupakan salah satu sebab terjadinya "Gerakan Rebo Pagi" dari Kapten Andi Azis, pemberotnakan MRS, dan baku-tembak di Ujungpandang pada awal Agustus 1950.

Masalah itu sudah dibicarakan beberapa kali oleh pihak-pihak negara-negara bagian (BFO) dan RI. Setelah pemerinta RI dipulihkan kembali di Yogyakarta, BFO dan RI mengadakan suatu rangkaian perundingan yang dinamakan Konperensi Inter-Indonesia. Konperensi yang pertama diadakan pada bulan Juli-Agustus 1949. Wakil Belanda tidak hadir karena hal itu semata-mata merupakan masalah Indonesia.

Dalam konperensi itu diputuskan untuk mengadakan perundingan dengan Belanda di Den Haag untuk memaksanya membentuk Republik Indonesia Serikat. Masalah *gendarmarie* juga dibahas. Konperensi akhirnya menerima gagasan RI. Ditetapkan bahwa tentara serikat yang akan dibentuk itu berintikan TNI. Pasukan-pasukan KNIL akan dibubarkan dan anggota KNIL yang berniat masuk tentara serikat, disiakan melakukan-nya secara perorangan. Berarti keutuhan TNI dipertahankan.

BFO dan RI kemudian bersama-sama menuju Den Haag untuk berunding dengan Belanda. Namun pada saat yang sama di NIT terjadi hal-hal yang luar biasa. Golongan yang menentang pembentukan RIS mulai berkampanye. Pihak yang paling menentang adalah Partai Sembilan Serangkai dari Dolf Metekohy yang tergolong Fraksi Demokrat. Mereka terutama menginginkan agar paling tidak NIT tetap menjadi negara tersendiri di luar RIS. Selain itu Jaksa Agung NIT, dr. Soumokil, juga merupakan penentang utama dari gerakan politik baru itu.

Dokter Ch. Soumokil merupakan salah satu tokoh yang gigih menentang "pengaruh Jawa" di Indonesia Timur. Sementara BFO dan RI mencari jalan keluar dari kemelut politik akibat Agresi Belanda pada akhir 1948 itu, Soumokil berhasil membentuk pasukan kepolisian semi-militer. Ia berpendapat bahwa keamanan di setiap wilayah seharusnya dapat dijamin oleh wilayah itu sendiri. Dengan sendirinya BFO dan RI menentang dan memerotes keras tindakan Jaksa Agung NIT itu.⁴⁴

Masalah kedua adalah gangguan keamanan di wilayah Sumawesi Selatan. Selain pelbagai unsur yang kurang menyenangi keadaan, juga pihak KNIL yang terhasut golongan sipil seperti Partai Sembilan Serangkai, bertindak terhadap rakyat sedemikian rupa sehingga Fraksi Progresif mulai beraksi lagi dalam parlemen.

Perundingan Meja Bundar di den Haag membuahkan Persetujuan KMB (Konperensi Meja Bundar). Pada tanggal 27 Desember 1949, berdasarkan KMB, terbentuklah pemerintahan RIS dengan Sukarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri, hal yang sebenarnya sudah disepakati sebelumnya oleh BFO dan RI.

Karena Perdana Menteri NIT Anak Agung Gde Agung dimasukkan ke dalam Kabinet RIS sebagai menteri dalam negeri, ia digantikan oleh J.E. Tatengkeng dari Fraksi Progresif⁴⁵

Salah satu masalah sangat mendesak yang harus ditangani RIS adalah keamanan. Oleh KMB, Pemerintah RIS diberi hak

da kekuasaan untuk mengatur seluruh masalah ketentaraan RIS' Kesepakatan Konperensi Inter-Indonesia di Yogyakarta pada Juli-Agustus 1948 diterima KMB secara bulat. Berarti KNIL akan dibubarkan dan TNI akan menjadi inti tentara RIS.

Tugas-tugas itu diserahkan kepada tokoh yang disegani, yaitu Sultan Hamengkubuwono. Dalam fungsinya sebagai pelaksana keputusan KMB ia disebut koordinator keamanan. Pembantunya untuk masalah-masalah militer adalah Kol. A.H. Nasution yang sebelumnya menjabat panglima komando Jawa.

Koordinator Keamanan dan staf mulai mengadakan perjalanan untuk menemui para penguasa negara bagian untuk menunjuk perwira-perwira TNI sebagai gubernur militer di setiap negara bagian. Perjalanan itu sudah rampung sebelum tanggal 27 Desember 1949, saat pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS.

Kabinet Negara Pasundan segera menerima usul sehingga Kol. Sadikin diterima sebagai gubernur militer, didampingi mr. Makmun (menteri dalam negeri Negara Pasundan). Di wilayah Negara Jawa Tengah, Kolonel Gatot Subroto diterima sebagai gubernur militer. Di Negara Jawa Timur (Surabaya), Kolonel Sungkono diterima sebagai gubernur militer. Di Medan (Negara Sumatra Timur) setelah tersendat sedikit akhirnya diterima Letkol. Kawilarang sebagai Penguasa Keamanan, dibantu oleh Kol. Jomat Purba dari NST. Di Padang (tidak ada negara bagian di Minangkabau) Letkol Dahlan Jambek ditetapkan sebagai gubernur militer. Di Negara Sumatra Selatan (Palembang) diangkat Kol. Simbolon. Untuk Kalimantan diangkat Letkol Sukanda sebagai penguasa keamanan dengan bantuan Letkol Hasan Basri. Di bangka-Belitung-Riau (Babiri) diangkat Letkol Akil Prawiradiredja.

Ketika rombongan Koordinator Keamanan tiba di Makasar, mereka ditantang oleh pelbagai pihak. Terutama Dr. Soumokil tidak bisa menerima pengangkatan Letkol Mokoginta sebagai penguasa militer atau gubernur militer. Ia mendesak

agar seorang perwira KNIL, Mayor Nanlohy, yang disertai tugas tersebut. Kol. Nasution lalu mendekati Sultan Sumbawa, Kaharuddin, agar bisa dicarikan jalan lain. Setelah diadakan perundingan lagi, muncul usul agar adik Sultan Hamengkubuwono IX yang ikut dalam rombongan diterapkan sebagai Gubernur Militer. Namun Soumokil yang waktu itu menjabat wakil perdana menteri NIT, tetap menolak. Mayor Nanlohy juga mengemukakan keberatan atas nama para anggota KNIL.

Kemudian diajukan suatu usul kompromi. Untuk NIT tidak dibentuk Gubernur Militer, hanya suatu panitia militer urusan teritorial Indonesia Timur. Kedua belah pihak menyetujui Putuhena sebagai ketua panitia itu dengan dua anggota, yaitu Letkol Mokoginta dan Mayor Nanlohy.⁴⁶

Putuhena bukan wajah baru dalam masalah pembentukan RIS. Dalam perundingan-perundingan Inter-Indonesia di Yogyakarta bulan Juli-Agustus 1949, ia telah muncul mewakili Partai Kristen Indonesia. Sebab itu perkembangan perundingan diketahuinya, termasuk keputusan yang menyangkut bidang kemiliteran yang kemudian dimasukkan juga dalam KMB. Bagi pihak RI, Putuhena adalah seorang yang selama itu berada dalam kubu perjuangan RI. Bagi pihak lawannya di Makasar ia adalah seorang tokoh Maluku yang diharapkan dapat mengerti aspirasi orang-orang Maluku dalam KNIL. Putuhena tetap melangkah sesuai dengan garis yang ditentukan pemerintah di Jakarta, yaitu Pemerintah RIS. Pengangkatannya sendiri ditandatangani oleh Koordinator Keamanan. Berarti sudah sejak awal ia akan lebih banyak bertumpu pada kepentingan nasional dari pada kepentingan segolongan kecil tokoh politik NIT yang mulai kehilangan kekuasaan.

Setelah Surat Perintah Koordinator Keamanan dikeluarkan pada tanggal 25 Desember 1949, Putuhena bersama Letkol Mokoginta bertolak ke Makasar. Dalam surat perintah itu tidak ditekankan batas tugasnya. Kesepakatan di Makasar antara Sultan Hamengkubuwono IX, Kol. Nasution, Presiden NIT

Sukawati, dan Wakil Perdana Menteri Dr. Soumokil, menegaskan bahwa:

1. Penjagaan keamanan tetap menjadi tugas pemerintah NIT;
2. Di NIT tidak ditempatkan seorang gubernur militer;
3. Kalau keadaan di NIT tidak bisa ditangani pemerintah, dibenarkan mencari bantuan dari tentara RIS; dan
4. Berhubung di NIT belum ada tentara RIS, soal keamanan dan ketertiban dibebankan pada suatu komisi yang terdiri atas: Ir. M. Putuhena sebagai Ketua Letkol Mokoginta sebagai anggota, Mayor Nanlohy sebagai anggota.⁴⁷

Jelas sekali ada ketidakserasian dalam kesepakatan itu. Pada satu pihak ditentukan pada pasal satu bahwa soal keamanan adalah tanggungjawab Pemerintah NIT, pada pihak lain, di butir empat, dibentuk suatu panitia (istilah dalam pengumuman itu adalah *komisi*) untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dapat diduga, butir pertama adalah keinginan dr. Soumokil, sedangkan butir keempat adalah keinginan Koordinator Keamanan. Dalam menjalankan tugasnya ternyata memang Putuhena mendapat kesulitan besar.

Panitia Militer itu tiba di Makasar pada tanggal 27 Desember 1949. Pada hari itu berlangsung serah-terima kekuasaan antara pihak Belanda dan Pemerintah RIS. Mohammad Hatta di Negeri Belanda menerimanya dari pihak Belanda dan di Jakarta Sultan Hamengkubuwono mendapat kehormatan itu. Tepat pada hari itu pula komandan-komandan militer Belanda di pelbagai daerah menyerahkan tampuk komando atas wilayah militernya kepada pihak perwira militer RIS yang sudah ditentukan (para gubernur militer). Di Makasar pada hari itu juga komando wilayah tentara di Indonesia Timur diserahkan dari Kol. Schotborg (pihak KNIL) kepada Letkol Mokoginta. Ketika itu hadir Perdana Menteri NIT Tatengkeng

dan Menteri Dalam Negeri NIT Sultan Jabir Sjah dari Ternate.⁴⁸ dr. Soumokil sebagai wakil perdana menteri NIT tidak nampak. Kini Panitia Militer yang dipimpin Martinus Putuhena itu berhadapan dengan pemerintah NIT saja.

Tindakan terpenting yang pertama kali dilakukan Panitia Militer pimpinan Martinus Putuhena adalah mengadakan kunjungan ke daerah-daerah. Mula-mula daerah pedalaman Sulawesi dikunjungi, sesudah itu panitia mengunjungi daerah Minahasa, Gorontalo, dan Ternate di Maluku Utara.⁴⁹

Di daerah-daerah tersebut nampak masalah keamanan yang cukup gawat. Ketika itu Panitia Militer tersebut tidak memiliki pasukan yang cukup banyak. Selain Letkol Mokoginta, hanya ada Mayor Pieters dengan beberapa orang pengawal. Sesuai keputusan KMB, seharusnya anggota KNIL yang ingin bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (Apris) melakukannya secara perorangan. KNIL waktu itu belum dibubarkan sekalipun secara hukum satuan itu tidak lagi bertanggungjawab atas keamanan di wilayah itu. Pembubaran KNIL masih dirundingkan di Jakarta antara pimpinan Apris dan pimpinan tentara Belanda. Baru pada bulan Juli 1950 pasukan Belanda itu dibubarkan.

Memang dari pihak KNIL sendiri sudah muncul suara-suara untuk bergabung dengan APRIS. Pada awal Januari 1950 tiga kompi KNIL di Bali diserahkan kepada Apris dalam suatu upacara serah-terima yang berlangsung megah. Pihak Kementerian Pertahanan RIS diwakili Letkol Ashari, sedangkan Kapten Supit mewakili TNI. NIT diwakili Mayor Nanlohy. Pimpinan pasukan Belanda diwakili Kepala Staf Mayjen van Langen,

Kol. Sugondo, dan Kol. de Vries. Dewan raja-raja di Bali juga menghadirinya.⁵⁰ Sekitar dua minggu kemudian Letkol Mokoginta mengirim Kapten Andi Jusuf ke Denpasar sebagai kepala staf teritorium Indonesia Timur bagian Sunda Kecil. Ia dibantu oleh Let. Saelan dan Let Sitanala, salah seorang komandan kompi KNIL yang bergabung itu.⁵¹

Anggota KNIL di Makasar juga mengadakan pembicaraan pada tanggal 20 Januari 1950 di gedung bioskop Alhambra. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan Apris secara sukarela, dengan beberapa prasyarat. Pertama, jaminan yang mereka peroleh di KNIL harus tetap berlangsung bila telah masuk APRIS. Mereka ingin agar dipimpin oleh staf perwira KNIL sendiri, agar dalam jangka waktu satu tahun tidak dicampurkan dengan TNI.⁵²

Beberapa kompi di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz akhirnya bergabung dalam pasukan Apris pada tanggal 30 Maret 1950. Rupanya para anggota bekas KNIL itu beranggapan bahwa keinginan mereka tersebut diterima sebagai syarat masuk dalam APRIS.

Pada saat Andi Aziz dan pasukannya bergabung dalam APRIS, di Manado anggota KNIL juga mengadakan rapat dengan maksud sama. Setelah berembuk agak lama, mereka pun memutuskan untuk bergabung dalam APRIS, malah diharapkan agar hal itu sudah terlaksana paling lambat bulan April 1950.⁵³

Rupanya banyak anggota KNIL yang masih bimbang, terutama keinginan untuk dipimpin perwira-perwira bekas KNIL serta tidak dimasukkannya TNI di Indonesia Timur dalam jangka waktu satu tahun belum mendapat ketegasan dari pihak APRIS.

Sesungguhnya yang terutama ditakuti para anggota KNIL itu adalah TNI. Berita bahwa bekas Laskar Seberang yang terdiri atas orang-orang Minahasa, Bugis-Makasar, dan Ambon akan dimasukkan ke Indonesia Timur sudah tersiar di kalangan mereka. Unsur-unsur ini, yang biasanya oleh pihak Belanda dicap sebagai *ekstremis*, memang tidak dianggap sebagai tentara yang sebenarnya. Kekacauan karena sikap kurang disiplin bisa menimbulkan pertentangan dan malah perkelahian senjata.

Martinus Putuhena sebagai ketua panitia militer untuk Indonesia Timur memberi keterangan secara luas. Sejak panitia

tiba dikeluarkan pelbagai pengumuman mengenai tugas Panitia. Ia menandakan, sesuai persetujuan dengan koordinator keamanan/menteri pertahanan RIS, tugas Panitia hanya membantu Pemerintah NIT dalam menjalankan keamanan. Panitia akan bertindak mengatasi ketegangan hanya bila diminta oleh pemerintah NIT.⁵⁴

Nampaknya di Makasar dan wilayah sekitarnya rakyat sangat gelisah. Pelbagai pihak mulai menuntut agar TNI segera dimasukkan ke Sulawesi Selatan. Usaha untuk menghubungi pimpinan Apris di Jakarta dilakukan pelbagai pihak. Letkol Mokoginta berkali-kali menerima utusan dari Ambon, Ternate, dan Tidore yang mengajukan permintaan agar TNI segera didatangkan di daerah mereka. Di Jakarta Kol. Nasution menandakan bahwa TNI memang sudah siap untuk masuk ke Indonesia Timur, walaupun sesungguhnya penyusunan tentara RIS belum rampung benar.⁵⁶

Martinus Putuhena beranggapan, para penuntut itu berpandangan keliru. Juga KNIL mempunyai persepsi yang keliru mengenai pembentukan tentara RIS. Ditandaskannya bahwa sesungguhnya yang ditakuti KNIL adalah TNI, dan yang diinginkan pelbagai pihak adalah agar TNI masuk. Usaha-usaha yang dilakukan panitia adalah secepat mungkin membentuk APRIS di Indonesia Timur seperti yang sudah terbentuk di Bali.⁵⁷

Di tengah situasi yang menegang di Sulawesi Selatan itu tiba-tiba datang berita mengenai tindakan-tindakan teror dari suatu pasukan KNIL di Ambon. Pada awal Januari 1950, suatu pasukan istimewa KNIL yang sering dinamakan *Baret* karena menggunakan baret merah dan hijau, didatangkan ke Ambon lengkap bersenjata. Tindakan itu tidak bisa dimengerti, mengingat bahwa komando atas wilayah Indonesia Timur sudah lama diserahkan oleh komandan KNIL di Makasar kepada Letkol Mokoginta. Tidak berapa lama muncul tindakan-tindakan teror itu. Mula-mula tindakan itu ditujukan kepada para pemuda yang tergabung dalam Partai Indonesia Maluku pimpinan

Pupela. Pimpinan pasukannya adalah Wim Reawaru. Rupanya pasukan Barat itu tidak bisa membenarkan meningkatnya kegiatan pro-RI di Ambon.

Untuk mengatasinya Putuhena berangkat ke Ambon didampingi Mayor Saleh Lahade. Selain itu Menteri Dalam Negeri NIT, Sultan Jabir Sjah (dari Ternate), juga turut dalam rombongan.⁵⁸

Rombongan berada di Ambon sekitar akhir bulan Januari. Baik Putuhena maupun Jabir Sjah belum melihat bahwa kerusuhan-kerusuhan oleh Barat/KNIL itu akan mempunyai akibat yang sangat luas. Ketegangan memang bisa diatasi, tetapi beberapa bulan kemudian muncul ketegangan yang lebih luas dalam bentuk "RMS". Menteri Dalam Negeri NIT malah menyalahkan Partai Indonesia Maluku sebagai biang-keladi kerusuhan.⁵⁹ Pihak Panitia Militer berpegang pada ketentuan bahwa masalah jaminan hukum yang dituntut sebagian rakyat Ambon itu adalah wewenang pemerintah NIT.⁶⁰ Pada saat itu APRIS belum berkuasa sepenuhnya di Indonesia Timur. Sekalipun telah menerima tanggungjawab dari pimpinan KNIL di Makasar, Letkol Mokoginta oleh pihak NIT belum resmi diakui sebagai pimpinan tentara di Indonesia Timur. Juga Pemerintah RIS belum memberikan kekuasaan itu kepadanya.

Baru pada awal Pebruari 1950 oleh Kementerian Pertahanan RIS Letkol Mokoginta secara resmi dijadikan komandan Teritorium dan Tentara Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Dengan demikian Panitia Militer untuk Indonesia Timur dibubarkan. Martinus Putuhena sejak tanggal 11 Pebruari 1950 dijadikan penasihat Komandan Teritorium Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Tugas itu dipegangnya selama beberapa minggu, kemudian ia kembali ke Jakarta untuk berdinas lagi di Kementerian Pekerjaan Umum.

Keadaan di Indonesia Timur pada pertengahan Pebruari 1950 itu nampaknya aman. Ketika berkunjung ke Jakarta, Per-

dana Menteri NIT memberitahukan kepada pers bahwa keamanan pada umumnya baik. Kekacauan oleh pihak Barat di Ambon sudah dapat diatasi. Selain itu usaha pembentukan APRIS juga berjalan lancar.⁶¹

Sesungguhnya keadaan tidak aman. Masyarakat luas menganggap situasi di Sulawesi Selatan sangat rawan. Pasukan KNIL sebagian besar masih berada di luar Apris dan bersenjata lengkap pasukan APRIS sendiri praktis belum ada selain staf Komandan Teritorium. Pada tanggal 7 Pebruari 1950 partai-partai dan laskar-laskar mengadakan rapat besar di Polombangkeng, di pinggiran Kota Makasar. Mereka memutuskan untuk membentuk pasukan laskar dengan nama Biro Pejuang Pengikut RI. Sewaktu-waktu mereka bisa bertindak bila diperlukan masyarakat.⁶²

Dalam pada itu penggabungan anggota KNIL ke dalam APRIS tidak berjalan sebagaimana semestinya. Ada dugaan bahwa Mayor Nanlohy telah menyebarkan berita agar anggota KNIL jangan bergabung⁶³ barangkali akibat perkembangan terakhir di Jakarta. Pada waktu itu mungkin sekali APRIS telah memutuskan untuk mengirim pasukan TNI asal Sulawesi dan Maluku ke Indonesia Timur. Selain itu, di bidang politik sudah mulai muncul suara-suara agar bentuk pemerintahan RIS dibubarkan dan dikembaldikan ke bentuk Negara Kesatuan RI. Perkembangan itu pun terasa sekali dalam Parlemen NIT, terutama di kalangan Fraksi Progresif yang berhaluan Negara Kesatuan itu. Tekanan-tekanan itu akhirnya menyebabkan Kabinet Tatengkeng jatuh pada akhir bulan Februari 1950. Sebagai penggantinya diangkatlah Kabinet Diapari.⁶⁴

Namun mulai bulan Maret, dan terutama dalam awal April 1950, desakan-desakan untuk membubarkan NIT makin kuat. Pelbagai daerah di sekitar Makasar Majene, Cenrana, Mapili, Polowali, Balanipa, dan lain-lain⁶⁵ menuntut bergabung dengan RI. Dalam situasi itu tiba-tiba di perairan Makasar muncul dua buah kapal, *Bontekoe* dan *Waikelo*, mengangkut Batalion Worang.

Sebelum pasukan Worang mendarat di Makasar, pada pagi hari tanggal 5 April terjadi perubahan besar di Makasar. Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang telah bergabung dengan APRIS (sekitar 800 orang), menembaki pasukan TNI pimpinan Letkol Mokoginta yang bermarkas di Klapperlaan. Itulah apa yang dinamakan "Gerakan Rebo Pagi".⁶⁶ Pasukan Andi Aziz dibantu pasukan KNIL lainnya sehingga praktis daerah Makasar bisa mereka kuasai.

Rupanya anggota KNIL telah bertindak sendiri untuk menjamin keamanan mereka. Kehadiran Pasukan Worang dianggap sebagai pelanggaran atas tuntutan mereka, yaitu bahwa dalam jangka waktu satu tahun pasukan TNI tidak akan dimasukkan ke Indonesia Timur. Sekalipun syarat itu mungkin tidak pernah diterima oleh Panitia Militer, bagi anggota KNIL hal itu dianggap sudah jelas.

Kapten Andi Aziz menyatakan bahwa gerakannya itu untuk mencegah TNI masuk ke Makasar. Rupanya sudah sejak tanggal 26 Januari, sebelum ia bergabung dengan APRIS, ia telah mengirim telegram ke Jakarta dengan permintaan agar syarat tersebut dipenuhi.⁶⁷

Selama sekitar 20 hari "Gerakan Rebo Pagi" dapat bersimaharajalela di Makasar. Kapten Andi Aziz sekitar seminggu setelah pemberontakan itu menyerahkan diri kepada Letkol Mokoginta, tetapi pasukan KNIL lainnya tetap tidak mau berdamai.

Pasukan-pasukan KNIL waktu itu nampaknya tidak ada hubungan dengan pimpinan tentara Belanda. Mereka bergabung dalam pelbagai organisasi seperti "Perserikatan Menado", "Kesatuan Militer Maluku", "Untuk Keperluan Kita". Melalui organisasi-organisasi itu mereka mengumumkan bahwa mereka hanya akan taat para pimpinan tentara Belanda. Soumokil, yang dalam Kabinet Diapari hanya menjabat sebagai Jaksa Agung, nampaknya secara diam-diam menyokong gerakan itu. Namun ketika pasukan TNI mulai mendarat di sekitar Makasar,

pada tanggal 19 April ia melarikan diri dengan sebuah pesawat pembom milik tentara Belanda.⁶⁸

Sementara itu di Jakarta terjadi hal-hal yang penting. Kabinet RIS berapat dengan Kabinet NIT dan Kabinet RI. Diapari nampak pada mulanya bersimpati terhadap Andi Aziz. Selain itu sejak tanggal 7 April 1950 Kementerian Pertahanan RIS membentuk suatu pasukan di bawah pimpinan Kol. Kawilarang untuk menuju Makasar. Sejak tanggal 19 April pasukan Kawilarang mulai memasuki Makasar. Kemudian menyusul pasukan lain sehingga semuanya berjumlah sekitar 8 batalyon. Dengan bantuan perwira Belanda, para anggota KNIL berhasil diasramakan. Sementara itu pada tanggal 15 April 1950 Kol Kawilarang ditunjuk menjadi pengganti Letkol Mokoginta sebagai komandan Teritorium dan Tentara Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.⁶⁹ Untuk beberapa lamanya di Kota Makasar diberlakukan pemerintahan militer.

Tidak lama setelah pasukan *Kawilarang* mendarat, Parlemen NIT juga mulai bergerak. Pada tanggal 20 April Ketua Fraksi Kerakyatan, E.U. Pupela, mengajukan mosi tidak percaya atas kebijaksanaan Kabinet. Presiden NIT Sukawati dan Perdana Menteri NIT Diapari rupanya menyadari keadaan. Dalam salah satu wawancara mereka mengumumkan, mereka menyetujui rencana-rencana pembubaran NIT.⁷⁰ Nampaknya seluruh kekuatan sosial pada waktu itu menyetujui pembubaran NIT. Kabinet Diapari pun dinyatakan demisioner.

Ketua Fraksi Kerakyatan, Pupela, menyatakan bahwa kabinet baru yang akan dibentuk harus mengikuti keinginan rakyat, yaitu pembubaran NIT. Ia mengajukan dua calon sebagai perdana menteri yang dibebani tugas itu, yaitu Andi Baharuddin atau Martinus Putuhena.⁷¹

Ketika itu Putuhena berada di Makasar, tetapi dengan tugas lain, berkenaan dengan meletusnya pembontakan "RMS" Pembontakan itu diprakarsai dr. Soumokil dan Partai Sembilan Serangkai yang menentang baik RIS maupun NIT. Pada

tanggal 25 April 1950, setelah TNI menguasai Makasar, mereka mengumumkan pembentukan "Republik Maluku Selatan". Pemerintah membentuk suatu panitia yang terdiri atas dr. J. Leimena, ir. Putuhena, dan A.M. Peluupessy, untuk berunding dengan pihak pembrontak. Ketika situasi politik di Makasar sangat kritis, panitia tersebut tiba.

Pilihan sebagai perdana menteri NIT ternyata jatuh pada Putuhena. Ia dilantik segera setelah kembali dari misi ke Ambon pada awal Mei 1950. Nampaknya tugas yang dibebankan kepadanya tidak terlampau sulit. Pelbagai pihak terus-menerus mendesak agar NIT segera dibubarkan. Tetapi sebagai Perdana Menteri Putuhena lebih mengutamakan langkah-langkah yang diambil di Jakarta sehingga menyebabkan pelbagai pihak kurang sabar mencoba bertindak. Kongres Rakyat di Makasar, umpamanya, sangat menentang apa yang dinamakan kebijaksanaan "Putuhena-Jakarta-Yogya". Mereka mengeluarkan resolusi agar dibentuk "dewan-dewan propinsi" masing-masing untuk Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Sekretariat dewan-dewan itu diberi hak untuk mengawasi Pemerintah NIT. Putuhena menolak saran itu, sebaliknya ia menyarankan agar Parlemen NIT menambah 15 kursi untuk wakil-wakil dari Kongres Rakyat tersebut. Namun parlemen pun menolak usul itu.⁷²

Sementara itu Putuhena mengadakan perjalanan-perjalanan dinas ke pelbagai wilayah, bertemu dengan para raja di daerah-daerah Sulawesi Selatan untuk menjelaskan proses pembubaran NIT. Ia juga berkunjung ke Sulawesi Utara, antara lain ke Tondano, Tomohon, dan Kakaskasen.⁷³ Pada pertengahan bulan Juli 1950 ia mengunjungi Pulau Lombok. Ia disambut dengan gembira oleh sekitar 10.000 orang, sekalipun Kepala Daerah datang agak terlambat.⁷⁴

Langkah yang diambil oleh Martinus Putuhena selalu seiring dengan langkah-langkah di Jakarta. Sejak bulan Maret mulai diadakan persiapan untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet RIS sangat aktif dalam hal

itu. Persiapan berupa pembuatan undang-undang dasar sementara dan lainnya dilakukan dengan sabar di Jakarta. Dapat dimengerti kalau pelbagai pihak dalam masyarakat tidak selalu sabar dengan langkah-langkah yang lamban itu. Tugas Putuhena tak menyabarkan mereka melalui perundingan atau tindakan politik. Sikapnya yang tenang dan sabar sangat cocok untuk tugas itu.

Berdasarkan pertimbangan keamanan, pada mulanya Putuhena kurang setuju kalau Indonesia Timur dalam Negara Kesatuan dibagi dalam tiga propinsi, yaitu Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Mungkin sekali situasi di Maluku Tengah yang menyebabkan ia mengambil sikap itu. Ia memang sudah mengangkat dr. Rehatta sebagai kepala daerah Maluku Tengah dengan kedudukan di Piru. Tetapi pada waktu itu pertempuran-pertempuran masih terus berlangsung di sana. Akhirnya ia menerima juga keputusan yang diambil oleh Kabinet RIS.⁷⁵

Setelah Undang-Undang Dasar Sementara dirampungkan pada tanggal 25 Juli 1950, pembubaran NIT sudah di ambang pintu. Apalagi ketika Presiden Sukarno mengunjungi Sulawesi pada akhir Juli 1950 itu.

Pada awal Agustus mulai nampak perubahan politik di Makasar. Sejak tanggal 1 Agustus Kabinet Putuhena diubah menjadi Panitia Penyelenggara Tatanegara. Sekalipun pembubaran NIT pada saat itu sudah terjadi, kabinet belum dinyatakan bubar. Ketika itu Martinus Putuhena sedang berada di Jakarta untuk membicarakan langkah-langkah pembubaran NIT dengan Menteri Dalam Negeri Anak Agung Gde Agung. Pada saat itulah ia menerima tugas akhir untuk melikuidasi NIT dan menjadikan wilayah itu tiga propinsi Republik Indonesia. Seorang pejabat pusat akan dikirim ke Makasar untuk mengawasi proses likuidasi itu. Putuhena juga mendapat tugas untuk mengangkat pegawai-pegawai tinggi di ketiga wilayah tersebut guna menyiapkan pemerintahan propinsi.⁷⁶

Sementara Putuhena berada di Jakarta, di Makasar terjadi lagi kerusuhan KNIL yang sebenarnya secara resmi telah dibu-

barkan pada tanggal 26 Juli 1950. Mereka yang belum bergabung dengan APRIS, atau belum dipensiunkan, sejak saat itu mendapat status KL (*Koninklijke Leger*) atau tentara Kerajaan Belanda. Pihak Belanda akan mengusahakan penyelesaiannya dalam beberapa waktu kemudian. Tetapi pada saat itu pasukan KNIL di Makasar menolak perintah pembubaran. Mereka tetap berada dalam asrama-asrama, dan tidak bersedia menyerahkan senjata. Malah pada tanggal 26 April terjadi insiden bersenjata sehingga seorang perwira APRIS gugur.⁷⁷

Pada tanggal 5 Agustus terjadi lagi pertempuran. Pihak KNIL menyatakan bahwa mereka ditembaki pihak gerilyawan. Sebanyak 16 buah mobil lapis baja muncul dari asrama KNIL dan mulai menembaki asrama pasukan Pattimura dan Worang yang bermarkas tidak jauh dari asrama mereka. Pasukan KNIL sepanjang siang bersimharajalela dalam kota. Pelbagai perusahaan dan toko dibakar dan ditembaki. Para perwira Belanda rupanya tidak sanggup menghentikan tindakan tersebut. Keesokan harinya pertempuran terus berlangsung. Kolonel Kawilarang kemudian bertolak ke Jakarta untuk berunding dengan pimpinan tentara Belanda. Bersama Mayjen Scheffelaer pada tanggal 7 Agustus ia kembali ke Makasar. Karena tidak bisa memasuki kota, perundingan dilangsungkan di Maros, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di lapangan udara Mandai. Diambil keputusan yang menentukan: anggota pasukan KNIL, apabila tidak kembali ke asrama, status mereka sebagai KL tidak akan diakui lagi. Itu berarti mereka kehilangan segala-galanya.⁷⁸

Hal yang kemudian menjengkelkan Kementerian Pertahanan RIS adalah dikirimkannya kapal perang Kortenaer ke Makasar, padahal pada waktu itu kapal tersebut diperbantukan kepada APRIS. Selain itu ada ketentuan, gerakan militer Belanda harus dilaporkan dulu kepada Kementerian Pertahanan RIS. Masalah itu menjadi perselisihan antara kedua pihak selama beberapa waktu. Pasukan KNIL dengan status KL itu pada akhir Agustus baru berhasil diberangkatkan dari Makasar. Sebanyak

sekitar 7.000 orang (termasuk keluarga) diberangkatkan ke Jawa Barat, dan ke Negara Belanda.⁷⁹

Putuhena kembali ke Makasar setelah situasi militer di kota itu pulih. Tugas pembubaran NIT kini berjalan lancar sesuai dengan perkembangan di Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus, dengan suatu upacara di Jakarta, Presiden Sukarno mengumumkan dibubarkannya RIS dan dibentuknya kembali Negara Republik Indonesia. Sukarno sebelumnya telah dipilih sebagai presiden RI. Kabinet RIS (Hatta) dinyatakan demisioner sampai terbentuknya kabinet baru.

Sehari setelah diumumkannya pembentukan kembali Negara Kesatuan RI, Putuhena menyatakan Kabinet NIT bubar. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1950, ia kembali ke Jakarta. Tugasnya di Makasar diambil alih oleh W.B. Lapien yang berpangkat residen tetapi berfungsi sebagai gubernur Sulawesi.

BAB VI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA

Setelah berbulan-bulan menjalankan tugas-tugas yang lebih banyak bersifat politik, Martinus Putuhena kembali di lingkungan Pekerjaan Umum.

Perkembangan politik di Jakarta menjelang pembentukan kembali Negara Kesatuan terutama ditandai oleh percaturan untuk membentuk kabinet. Undang-undang Dasar Sementara RI yang disepakati terutama bersifat parlementer. Sebab itu pemerintah dibentuk oleh komposisi kepartaian yang paling kuat dalam parlemen. Untuk membentuk pemerintah parlementer tersebut dibutuhkan "perdagangan sapi" yang cukup ramai antara pelbagai pihak yang berkepentingan. Perkembangan tersebut tidak diikuti secara langsung oleh Putuhena yang ketika itu sedang bertugas sebagai perdana menteri Negara Indonesia Timur dalam peleburan.

Kekuatan-kekuatan politik yang menentukan dalam tahun-tahun 1950-an itu bersikap lunak. Kebanyakan masih menganalkan sistem liberal dari Eropa. Sebab itu sikap politik terhadap negara-negara Barat juga sangat baik. Belum terjadi konfrontasi yang menentukan dengan kekuatan-kekuatan Barat, khususnya yang bersangkutan dengan masalah Irian Jaya. Ketika itu kekuatan komunis di Indonesia belum berarti.

Suasana politik itu rupanya cocok dengan kepribadian Martinus Putuhena. Sejak lama ia telah mengagumi pandangan politik Sjahrir yang juga tidak menyukai konfrontasi dengan Barat. Putuhena beranggapan, perkembangan teknologi di Indonesia bisa mendapat banyak manfaat dari kerjasama yang harmonis dengan kekuatan Barat yang memiliki budaya teknologis yang tinggi.

Sebab itu ketika Kabinet Natsir terbentuk (6 September 1950 – 27 April 1951), ia menerima tawaran dari Prof. Ir. Herman Johannes untuk menjabat sekretaris jendral Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Hal itu memang menimbulkan sedikit pertentangan. Pihak-pihak tertentu kurang menyetujui pengangkatan itu. Mereka lebih menginginkan seorang sekretaris jendral yang termasuk "golongan Yogya" Martinus Putuhena dianggap sebaga orang NIT (federal).⁸¹ Pandangan yang kurang tepat itu menunjukkan betapa kurangnya informasi yang tepat dalam masa-masa itu.

Namun betapapun pengangkatan sebagai sekjen itu tetap dipertahankan. Malah enam tahun berikutnya kedudukan iu masih dipegang Martinus Putuhena. Selama masa tersebut terdapat lima kabinet yaitu Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951); Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952); Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 1 Agustus 1953); Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 Agustus 1953 – 12 Agustus 1955; dan Kabinet Burhanuddin Harapan (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956). Selama itu pula enam menteri pekerjaan umum dan tenaga bergantian memimpin departemen itu, yaitu Prof. Ir. Herman Johannes, ir. Ukar Bratakusuma, ir. Suwarto, Prof. Ir. Roosseno (lalu diganti Mohammd Hassan); dan RP Suroso.

Selama menjadi sekjen bagi keenam menteri yang berlainan aliran kepartaian itu Martinus Putuhena menunjukkan sikap profesional. Nampaknya selama itu ia tidak banyak berpolitik. Dengan kata lain ia bisa menerima kebijaksanaan pemerintahan yang berlaku, khususnya mengenai masalah-masalah teknik.

Memang di awal tahun 1950, selama bulan-bulan April sampai Juli, ia terpilih sebagai salah satu dari anggota Presidium Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Namun masa tersebut lebih banyak dilaluinya di Makasar, dengan tugas yang samasekali tidak berasal dari Parkindo.

Karena sikapnya itu, orang sering mengatakan bahwa Martinus Putuhena tidak berpolitik. Nampaknya selain menyetujui kebijaksanaan pemerintah selama enam tahun itu, ia juga menganut pendapat yang mengatakan "berdiam diri berarti menyetujui"

Sifat pribadinya yang pendiam, luwes, dan terbuka bagi setiap golongan pegawai, menyebabkan Putuhena mudah diterima oleh pelbagai aliran sehingga memungkinkannya melakukan tugas-tugas yang dianggapnya telah diamanatkan kepadanya, yaitu membangun pekerjaan umum pemerintah RI. Seolah-olah ia mengerti bahwa tujuan hidupnya, setelah melalui pelbagai jenjang pendidikan dan mendapat pelbagai pengalaman teknik, adalah menyumbang perkembangan tugas-tugas teknik Indonesia.

Sebagai sekjen Putuhena mendapat kepercayaan yang cukup besar dari para menteri pekerjaan umum. Kelanjutan kegiatan kementerian tersebut memang sangat banyak bergantung padanya. Para menteri bisa saja diganti, aliran politik mereka bisa saja berbeda sekalipun mereka semua memiliki pengalaman dalam bidang teknik, tetapi kelanjutan pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat mendasar apabila hasil-hasil yang kongkrit ingin dicapai. Dalam hal inilah peranan Martinus Putuhena harus dilihat.

Selama menjabat sebagai menteri pekerjaan umum di tahun 1946 dan 1947, memang tidak banyak yang dapat dilakukannya. Situasi bangsa dan negara yang senantiasa berada dalam ancaman peperangan, tidak memungkinkannya. Selain itu dalam tahun-tahun itu pula wilayah RI mengalami pencutian yang luar biasa besarnya. Perjanjian Linggajati (1946) membatasi

kekuasaan RI hanya sampai Jawa-Madura-Sumatra saja. Kemudian Perjanjian Renville (1947) memperkecilnya hanya sampai Jawa Tengah saja, tidak termasuk wilayah pesisir utaranya.

Tetapi setelah Perjanjian KMB tercapai, terutama setelah RI kembali berdiri dengan wilayah antara Sabang-Merauke, tugas-tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga mulai terasa berat.

Program keenam kabinet tersebut memberi tempat yang sangat penting pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Di antara pelbagai program, masalah peningkatan kemakmuran rakyat dianggap sangat penting. Dalam bidang inilah dapat dikatakan terletak tugas-tugas yang harus dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Terutama diinginkan agar perekonomian rakyat menjadi kokoh sebagai landasan untuk pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dianggap bisa menyediakan prasarana untuk maksud itu.

Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dari masa sebelumnya mengalami perubahan penting. Kalau di masa Revolusi Kementerian Pekerjaan Umum juga melaksanakan tugas-tugas perhubungan, di tahun-tahun 1950-an itu diadakan pembagian lain. Tugas-tugas perhubungan dikelola oleh suatu kementerian sendiri, sedangkan tugas-tugas pekerjaan umum dan tenaga dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. Struktur ini berlaku sampai tahun 1970-an.

Dalam mencapai tujuan-tujuan pemerintah tersebut, tugas-tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga terutama bersifat rehabilitasi.⁸² Selama Perang Kemerdekaan, banyak fasilitas pengairan, jalan, dan tenaga listrik mengalami kerusakan atau terbenkangal. Agar sarana tersebut bisa digunakan sebagai penunjang usaha kemakmuran, rehabilitasinya merupakan sesuatu yang paling mendesak. Sebab itu tidak mengherankan bila dalam periode ini belum ada pembangunan proyek baru. Memang ada rencana-rencana, dan juga ada peningkatan volume

dan kapasitas perlistrikan dan lainnya, tetapi belum ada rencana terperinci untuk meningkatkan pembangunan. Namun demikian apa yang telah dihasilkan dalam masa itu memang sangat berguna bagi kemakmuran rakyat pada umumnya. Tanpa prasarana yang memadai, perekonomian Indonesia bisa terhenti sama sekali.

Salah satu kelemahan yang menonjol dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga adalah kurangnya tenaga ahli. Kebanyakan tenaga teknis yang ada berkebangsaan Belanda.

Menghadapi situasi ini, langkah pertama yang diambil Martinus Putuhena adalah menciptakan tenaga ahli. Untuk itu pada tahun 1951 ia membentuk suatu Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga (Akademi PUT).⁸³ Lembaga yang didirikan di Bandung itu menerima lulusan SMA bagian Ilmu Pasti untuk dididik selama tiga tahun sebagai tenaga Sarjana Muda Teknik. Setelah itu mereka disebarluaskan ke pelbagai pelosok tanah air. Selain itu kursus kader juga diselenggarakan di antara para pegawai Kementerian untuk memperoleh tenaga yang terampil.

Pembentukan Akademi PUT ternyata dianggap berhasil. Sebagai langkah praktis, sambil menunggu lulusan perguruan tinggi bidang planologi (yang baru dibuka tahun 1952), tindakan tersebut dianggap tepat. Tidak mengherankan bila kemudian kementerian lain juga mengikuti sejak kementerian PUT dengan membuka akademi kedinasannya. Dalam hal ini Putuhena bisa dianggap sebagai pelopor.

Salah satu bagian yang juga sangat lemah di Kementerian PUT pada waktu itu adalah dalam masalah bangunan. Melalui kerjasama dengan lembaga PBB, Putuhena membangun Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan. Proyek yang dimulai pada tahun 1953 ini memang membawa banyak hasil bagi tugas-tugas PUT. Lebih dari itu, langkah tersebut menunjukkan bahwa tugas-tugas bisa berjalan lancar apabila terdapat penelitian yang sesuai.⁸⁴ Inilah langkah awal dari Bagian Penelitian dan

Pengembangan yang kini terdapat di semua kementerian/departemen.

Untuk mendapatkan tenaga yang terlatih, Putuhena juga mulai memprakarsai pengiriman para insinyur untuk mendapat pendidikan lanjutan di luar negeri. Rencana itu dimulai pada tahun 1954. Ketika itu tenaga insinyur pada Kementerian PUT hanya 8 orang. Sebab itu pembagian jatah pengiriman ke luar negeri bisa diatur sebaik mungkin. Tenaga-tenaga yang kembali ke tanah air inilah yang berhasil mempertinggi kapasitas dan ruang-lingkup pekerjaan kementerian.⁸⁵

Untuk mendapat informasi yang mutakhir mengenai bidangnya, serta untuk menggalang kerjasama dengan pelbagai instansi di luar negeri, Martinus Putuhena juga mendapat tugas untuk berkunjung ke luar negeri. Hal itu sudah dilakukannya sejak tahun 1951. Salah satu perjalanan ke luar negeri yang mengesankan dan bermanfaat adalah kunjungan ke Portugal untuk menghadiri *International Road Congress* ke-9 di Lisabon. Rombongan yang dipimpin Putuhena terdiri dari J.A.H. Ondang dan Kusudianto Hadinoto. Selain itu turut pula tiga insinyur Belanda yang dipekerjakan pada Balai Penelitian Karet di Bogor.⁸⁶

Kongres Jalan Raya ke-9 itu yang pertama diadakan setelah Perang Dunia ke-2. Peserta dari 35 negara berjumlah sekitar 2000 orang. Pertukaran pikiran yang berlangsung ternyata banyak bermanfaat bagi kegiatan PUT kelak. Masalah yang dibahas meliputi penggunaan beton yang waktu itu sangat langka di Indonesia, khususnya untuk jalan raya dan lapangan terbang. Juga sangat penting informasi mengenai stabilisasi tanah di daerah lembek yang akan digunakan untuk jalan raya, konstruksi jalan yang baru dan yang disesuaikan dengan volume kendaraan, cara-cara baru untuk merencanakan pembuatan jalan, dan pemeliharaan jalan khususnya di daerah yang penduduknya jarang. Termasuk salah satu topik adalah konstruksi jalan *by-pass* yang di Indonesia baru dimulai pembangunannya pada tahun 1960-an.

Suatu peristiwa kecil di Lisabon sangat mengesankan Martinus Putuhena.⁸⁷ Ketika kongres telah usai, rombongan berjalan-jalan untuk menikmati udara dan pemandangan. Mereka mampir di sebuah kafe untuk sekedar minum. Ketika meninggalkan kedai itu, tiba-tiba terdengar orang berseru, "*Mister, mister . . . your capeo.*" Dengan heran Putuhena membalik. Ia menjadi lebih heran lagi ketika nampak olehnya sebuah topi di tangan orang yang berseru itu. Kata *capeo* juga digunakan untuk topi di Maluku. Rupanya itu salah satu peninggalan dari masa penjajahan Portugis di Maluku di abad ke-16. Kata-kata pinjaman lainnya dari bahasa Portugis yang dikenal di Maluku adalah *lenso* (saputangan), *kalsang* (celana), *canela* (sepatu wanita), *kadera* (kursi) dan lain-lain. Juga terdapat nama orang yang berasal dari Portugal seperti de Fretes (dari de Freitas), Dakosta (dari da Costa), Gomiees (dari Gomez), dan Muskita (dari Mesquitta).

Namun selain dari nama dan kata tersebut, bagi Putuhena tidak nampak persamaan lain antara daerah asalnya dan Portugal. Portugal tetap merupakan negeri yang asing baginya. Kebudayaannya adalah kebudayaan Eropa, dan sangat sedikit, atau boleh dibilang tidak ada, persamaannya dengan keadaan di Maluku.

Dalam darmawisata yang diselenggarakan panitia kongres, Martinus Putuhena berkesempatan menyaksikan hal-hal lain yang tidak kurang menarik. Salah satu hal yang mengesankannya adalah seni bangun yang berupa percampuran arsitektur Islam atau "Moor" dan arsitektur Barat, terutama di Kota Seville. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh kerjaan Magribi yang pernah menjajah wilayah Iberia selama beberapa abad.

Tidak berapa lama setelah kembali ke Jakarta, Martinus Putuhena mendapat tugas untuk mengunjungi Paris. Resminya ia diangkat sebagai penasihat ahli dalam delegasi Indonesia ke Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di kota itu. Selain

Putuhena, juga bertindak sebagai penasihat ahli Mr. Tadjuddin Noor dan Pendeta Rotti.⁸⁸

Setelah sidang-sidang usai (dan setelah rombongan berdarmawisata sekedarnya untuk menyaksikan kota Paris). Martinus Putuhena mengadakan serangkaian pembicaraan dengan para ahli bidang pengairan di Perancis. Pembicaraan itu sangat bermanfaat; dalam tahun-tahun berikutnya para ahli tersebut dimanfaatkannya untuk membantu proyek-proyek pengairan Indonesia. Itulah awal dari kerjasama antara dua bangsa itu, yang antara lain menghasilkan Waduk Jatiluhur.

Dalam tahun-tahun berikutnya, Martinus Putuhena sebagai sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga mendapat banyak kesempatan untuk berkunjung ke luar negeri, terutama ke Eropa dan Amerika. Dari tempat-tempat itu ia berhasil menimba pelajaran dari praktek-praktek bangsa-bangsa asing itu. Selain itu hubungan kerja demi kemajuan kementeriannya dapat dijalin.

Dalam masa enam tahun Martinus Putuhena menjadi sekjen, tugas-tugas PUT terutama adalah merehabilitasi prasarana yang hancur semasa sebelumnya. Pembangunan proyek-proyek baru masih terbatas pada peningkatan apa yang telah ada. Bidang perlistrikan, umpamanya, mengalami peningkatan yang cukup besar.

Kapasitas alat-alat pembangkit listrik di jaman pendudukan Jepang sangat merosot, dari 180.000 KW menjadi 40.000 KW, terutama akibat pertempuran-pertempuran yang terjadi pada masa itu. Dengan mengontrakkan pekerjaan kepada pihak swasta, PUT berangsur-angsur bisa merehabilitasi instalasi yang rusak. Malah PUT sanggup pula membangun instalasi baru di seluruh Indonesia.⁸⁹

Pekerjaan itu memang memerlukan dana yang besar. Pekerjaan penelitian untuk mencari lokasi yang tepat tidak kurang membutuhkan tenaga. Selain itu peralatan yang rusak perlu diperbaiki. Pada akhir tahun 1955 PUT berhasil menambahkan

107.000 KW, dan daya yang terpasang dengan demikian menjadi 247.000 KW, berarti peningkatan 76%, atau setiap tahun 13%.

Sebagian terbesar proyek pembangkit tenaga listrik itu dibangun di Sumatra (23 buah) dan Jawa (26 buah). Sebuah dibangun di Ambon (560 KW) dan dua buah dibangun di Minahasa (5120 KW). Seluruh proyek tersebut termasuk Pusat Listrik Tenaga Diesel, kecuali di Tonsea Lama, Mendalan, Jelok, dan Ubrug.

Selama masa revolusi banyak perusahaan listrik swasta yang berhasil diambil alih oleh pihak RI. Setelah Perjanjian KMB ada keharusan untuk mengembalikannya kepada perusahaan yang bersangkutan, umpamanya perusahaan NIGM di Aceh. Tetapi perusahaan ANIEM di Yogyakarta tetap dipercayakan kepada pemerintah yang lalu membentuk Kantor Listrik Yogyakarta.

Hasil KMB tersebut rupanya kurang bisa diterima masyarakat sehingga pada tahun 1950 muncul suatu mosi dalam parlemen untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta itu.

Usaha nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik swasta itu baru berhasil pada tahun 1953. Pada tahun itu pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa perusahaan EMA dan EMBP di Balikpapan dinyatakan sebagai milik negara. Setahun kemudian perusahaan OGEM di Jakarta dan Cirebon serta perusahaan ANIEM di Jawa pada umumnya dinyatakan sebagai milik negara.⁹⁰

Selain bidang perlistrikan, bidang pengairan sangat penting. Malah bisa ditinjau dari segi sistem perekonomian Indonesia yang masih agraris, bidang inilah yang paling penting. Tugas-tugas bidang pengairan adalah mengelola air di daratan untuk kepentingan produksi makanan, termasuk peningkatan areal yang telah ada dan membuka areal persawahan baru. Mengingat dalam tahun-tahun 1950-an (dan 1960-an) Indonesia masih

sangat kekurangan beras, bisa dimengerti betapa pentingnya tugas yang dibebankan kepada PUT. Hambatan-hambatan non-teknis cukup besar, terutama dalam bentuk gangguan keamanan di daerah pedesaan sehingga tidak mengherankan kalau perluasan areal persawahan tidak terlalu besar. Hanya sekitar 37.000 ha sawah saja yang berhasil dibuka, peningkatan dari 3.430.000 ha dari masa sebelum revolusi menjadi 3.467.000 ha pada tahun 1955.⁹¹

Mengenai bidang Jalan-jalan Umum dan Bangunan dapat dikatakan bahwa pekerjaan yang terutama adalah merehabilitasi apa yang hancur di masa pendudukan Jepang dan Revolusi. Dalam masa-masa itu prasarana jalan dan gedung menderita kerusakan yang paling berat. Penghancuran jembatan-jembatan dan gedung-gedung vital untuk menghambat musuh terutama sekali terjadi di daerah Jawa dan Sumatra. Sampai tahun 1951 Jawatan Jalan-jalan dan Gedung-gedung masih berkedudukan di Yogyakarta; setelah itu dipindahkan pula bersama jawatan lainnya. Bagian jalan, jembatan, dan konstruksi tetap dipertahankan di tempat semula (di masa penjajahan) yaitu di Bandung. Pada akhir masa bakti Martinus Putuhena pada tahun 1955, jawatan itu langsung dipegangnya sendiri sampai tahun 1959.⁹²

Bidang Teknik Penyehatan sangat banyak mendapat perhatian dari Martinus Putuhena.⁹³ Dapat dikatakan, dalam bidang ini muncul usaha-usaha pelopor dalam pembangunan, terutama di Jakarta dan Jawa Barat.

Kota Jakarta memang istimewa. Di situ terdapat pusat pemerintahan RI sejak tahun 1950. Kalau dalam tahun 1948 jumlah penduduknya hanya 800.000 orang, sejak tahun 1950-an jumlah itu meningkat menjadi sekitar 2.000.000 orang. Dalam waktu 4 atau 5 tahun saja penduduk Jakarta bertambah lebih dari dua kali lipat, antara lain sebagai akibat gangguan keamanan di daerah pedesaan dan hasrat untuk mencoba nasib di kota itu.

Pertambahan penduduk yang sangat pesat itu membawa pelbagai masalah. Pertama-tama perumahan terasa makin kurang sehingga muncul pemukiman liar. Lapangan Monas yang pada waktu itu merupakan padang alang-alang, penuh dengan gubuk liar. Di pinggiran kota muncul pula pemukiman liar yang dihuni orang miskin.

Pertambahan penduduk yang demikian pesat itu menimbulkan masalah tanah. Peremajaan kota sangat sulit karena setiap jengkal tanah praktis telah diduduki orang.

Namun di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Utara, terdapat banyak daerah yang berawa-rawa, khususnya antara Tanjungpriok dan Rawamangun. Dalam pandangan Martinus Putuhena, wilayah-wilayah itu masih bisa digunakan bila ditangani dengan baik.⁹⁴

Masalah lain akibat kepadatan penduduk adalah banjir. Pada musim hujan pelbagai pelosok kota Jakarta kebanjiran. Kampung berubah menjadi sungai atau rawa yang becek sehingga menimbulkan kesulitan. Penyakit malaria pada waktu itu merupakan yang paling berbahaya dan menjadi pembunuh nomer satu.

Perkembangan ibukota Jakarta juga menuntut dibangunnya jalan-jalan raya baru. Pertambahan jumlah kendaraan tidak akan dapat ditampung oleh jalan-jalan yang ada. Di tahun-tahun 1950-an itu jalan-jalan trem masih bersimpangsiur dengan jalan-jalan mobil.

Bagi Putuhena pembangunan Jakarta Raya menjadi prioritas. Secara umum pekerjaan Kementerian PUT memang masih terbatas pada rehabilitasi dan peningkatan, khususnya peningkatan kapasitas tenaga listrik. Tetapi Jakarta dikecualikan mengingat kota itu menjadi ibukota negara, dan kepadatan penduduknya menyebabkan pelbagai masalah sosial tersebut.

Pertama-tama bidang Jalan Umum dan Gedung-gedung mendapat tugas untuk meneliti kemungkinan membenahi jalan-

jalan di kota itu. Setelah diteliti, dibuat rencana yang mungkin dilaksanakan dalam waktu lima tahun (Rencana Lima Tahun).⁹⁵

Dalam rencana itu antara lain dicantumkan pembuatan jalan *by-pass*. Jalan *by-pass* Tanjungpriok-Jatinegara, misalnya baru terwujud pada tahun 1960-an, setelah Putuhena pensiun. Jalan lintas Pasar Senen – Karawang pun ketika itu telah dipikirkan yang ternyata tidak diwujudkan karena diganti dengan rencana lain.

Rencana pembinaan daerah pemukiman juga dibebankan kepada Putuhena. Salah satu daerah pemukiman yang baru dibuka ketika itu adalah wilayah Kebayoran Baru. Proyek itu sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah Belanda sebelumnya (Nica). Setelah tahun 1950 proyek itu diambil alih oleh Pemerintah RI.⁹⁶

Masalah utama Kementerian PUT ketika itu adalah masalah pembebasan tanah. Pemerintah telah menyediakan dana untuk membeli tanah dari rakyat yang mendiaminya, termasuk bangunan dan tumbuhan di atas tanah itu. Ternyata banyak penduduk yang menggunakan kesempatan itu untuk memperoleh uang lebih. Tanah yang telah diukur, ditanami pelbagai tanaman dengan harapan akan mendapat ganti. Luas tanah juga sering dipersolkan.

Pembangunan Kebayoran Baru merupakan usaha pembangunan pemukiman yang pertama. Di situ banyak pegawai pemerintah ditampung. Beberapa kementerian mendapat jatah tanah untuk perumahan pegawainya.

Suatu wilayah baru yang juga dibuka di bawah pimpinan Martinus Putuhena adalah Kampus Universitas Indonesia di Rawamangun. Ketika itu pihak UI merasakan sekali kekurangan ruang kuliah bagi beberapa fakultas. Selain itu asrama mahasiswa warisan dari zaman penjajahan juga sudah terlalu sempit.⁹⁷

Untuk mengawasi pembangunan kampus Universitas Indonesia di Rawamangun, dibentuk panitia: Ir. Putuhena mewakili

Kementerian PUT, Prof. Ir. Roosseno dari Fakultas Teknik (waktu itu di Bandung, sekarang ITB) sebagai unsur yang mewakili Universitas Indonesia, dan mr. R. Sugiarto mewakili Kementerian Keuangan.

Tugas mencari tempat dan pembangunannya diserahkan kepada Martinus Putuhena. Daerah Rawamangun pada waktu itu masih sangat tipis penduduknya. Jalan dari Salemba ke wilayah itu masih sederhana, dan belum ada hubungan kendaraan bermotor. Harga tanah relatif masih sangat murah, yaitu F 25,00 untuk setiap km.

Selain asrama mahasiswa, dibangun juga dua kompleks perkuliahan yang sekarang ditempati oleh Fakultas Sastra UI dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tidak jauh dari kampus itu Kementerian PUT juga membangun perumahan untuk karyawannya, khususnya untuk tenaga listrik.

Dengan demikian, selain di Jakarta Selatan, juga di Jakarta Timur terjadi perubahan sejak tahun 1950-an itu. Pusat-pusat itu kemudian meluas dalam tahun-tahun berikutnya.

Masalah lain yang juga dirasakan sangat mendesak di Kota Jakarta adalah masalah air minum. Dengan penambahan penduduk yang demikian pesat, persediaan air minum yang dibangun pada masa penjajahan jelas sudah tidak memadai lagi. Ketika itu tempat penampungan air minum untuk penduduk Jakarta terletak di pinggiran kota, tepat di pinggir jalan raya Jakarta – Bogor. Airnya berasal dari daerah Bogor.

Kekurangan air minum pertama-tama dirasakan oleh Kementerian Kesehatan. Karena banyak orang menggunakan air sungai untuk mandi sekaligus minum, bahaya penyakit menular sangat besar.

Menteri Kesehatan waktu itu dr. J. Leimena, mengemukakan masalah itu di kabinet dan kabinet menyerahkannya ke Kementerian PUT yang kemudian menugasi Putuhena untuk menanganinya.

Setelah mengadakan penyelidikan mendalam, Martinus Putuhena menyimpulkan bahwa daerah Pejompongan di Jakarta Selatan paling tepat sebagai tempat penampungan air minum. Air dari Banjir Kanal bisa ditampung dan dijernihkan di situ.

Untuk pembangunan waduk air minum yang besar itu dibutuhkan teknologi maju, dan Perancis dipercayakan melaksanakannya. Itulah langkah pertama pemanfaatan tenaga ahli Perancis untuk proyek-proyek besar Kementerian/PUT.

Setelah dimulai dengan penuh optimisme, pembangunan waduk Pejompongan terpaksa dihentikan karena tidak ada dana. Martinus Putuhena tidak bersedia meninggalkan proyek yang sudah dimulainya itu. Pejompongan merupakan proyek pertama yang dilakukan secara besar-besaran sehingga tidak mudah dilupakan begitu saja. Lagi pula dari bidang Teknik Penyehatan itu merupakan proyek kebanggaannya.

Atas inisiatifnya, Kementerian PUT mengijinkannya untuk meminjam dana dari bank. Pembayaran kembali bersama bunganya ditentukan 10 tahun. Dengan demikian proyek air minum yang sekarang dinamakan Perusahaan Air Minum DKI itu dapat dirampungkan.⁹⁸

Dengan keberhasilan proyek Pejompongan, Kementerian PUT ditantang untuk memikirkan suatu sistem pengendalian banjir yang menyeluruh untuk wilayah pantai utara Jawa Barat dengan membangun waduk yang jauh lebih besar. Tugas mencari lokasi yang tepat untuk waduk raksasa itu dipercayakan kepada Martinus Putuhena.⁹⁹

Mencari tempat yang tepat untuk pembangunan waduk raksasa ternyata tidak mudah. Ketika itu di Jawa Barat masih berkecamuk gangguan keamanan dari gerombolan DI/TII padahal daerah yang ideal untuk waduk tersebut justru terletak di tempat yang sering dikacau itu.

Akhirnya ditentukan, waduk itu akan dibangun di Jati-luhur, tempat pertemuan dua pegunungan, yang apabila ditutup bisa menjadi waduk yang diairi Sungai Citarum.

Perusahaan Perancis yang diajak Martinus Putuhena untuk menjajaki pembangunan Jatiluhur adalah perusahaan Degree Emont. Namun pembangunan waduk yang sesungguhnya baru dimulai setelah Martinus Putuhena pensiun, dan selesai pada tahun 1970-an. Ternyata selain berhasil membendung banjir di wilayah pantai Jawa Barat, waduk itu sangat bermanfaat juga bagi para petani di sana. Dengan saluran-saluran yang melintasi wilayah mereka, hasil pertanian dapat ditingkatkan. Berarti PUT berhasil membantu meningkatkan produksi pangan, khususnya beras.

Martinus Putuhena tidak secara langsung mengawasi pembangunan Waduk Jatiluhur, tetapi sebagai penasihat. Oleh perusahaan Perancis ia dinilai sangat berhasil, demikian juga oleh Departemen Pekerjaan Umum, pada tahun 1976 Departemen tersebut menyerahkan tanda penghargaan kepadanya.

Selain pembangunan Kota Jakarta dan waduk Jatiluhur, Putuhena juga sangat tertarik pada masalah pembangunan di Maluku.

Pertama kali ia mengunjungi Maluku segera setelah kekuasaan "RMS" dipatahkan pada tahun 1951. Kota Ambon ternyata sudah hancur. Pada masa pendudukan Jepang kota itu berkali-kali dibom oleh pihak Sekutu, kemudian dalam masa pembrontakan "RMS" sekali lagi kota itu dihancurkan oleh TNI. Praktis kota itu telah rata dengan tanah.

Masalah pembangunan di Maluku dalam tahun-tahun 1950 itu bukan saja merupakan masalah ekonomis dan teknis. Masalah politis lebih penting, mengingat sebagian besar penduduk masih berkabung karena musibah yang baru dialami. Banyak pula perasaan anti RI-nya yang meningkat karena tidak sanggup mengerti perkembangan jaman. Dalam situasi demikian, pemikiran mengenai pembangunan tentu belum mantap.

Sebagai seorang yang berasal dari Maluku, Putuhena mengenal benar jiwa orang Ambon. Ia tahu dalam situasi yang demikian menekan, agama merupakan tempat berlindung yang

aman. Malah dapat dikatakan, agama merupakan satu-satunya masalah yang bisa digumuli tanpa memikirkan pelbagai soal politis dan sosial lainnya. Selain itu, bagi orang Ambon yang beragama Kristen, agama sama saja dengan budaya masyarakat.

Dalam kunjungan pertama itu muncul gagasan Martinus Putuhena untuk membangun kembali gereja pusat yang terletak di Kota Ambon. Dengan cara itu ia membuktikan kepada masyarakat bahwa RI tidak bermusuhan dengan mereka. RI malah mencoba memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama dalam masalah agama. .

Gereja pusat di Kota Ambon memang merupakan kebanggaan orang Ambon. Gereja yang dihancurkan waktu Perang Dunia ke-2 itu sangat megah. Bangunan dari batu yang merupakan salah satu keindahan Kota Ambon itu, dibangun di masa Hindia Belanda. Peralatannya termasuk mewah. Mimbar tempat pendeta berkhotbah sangat anggun, dihiasi ukiran yang sangat halus. Mimbar itu terletak di tempat ketinggian dan ditunjang oleh tiang yang berhias ukir para malaikat dan kembang leli. Demikian pula bangku yang digunakan para jemaat. Bahannya terpilih dan diukur secara halus pula. Di depan mata para jemaat tergantung sebuah kayu salib yang juga dihiasi ukiran bermotif kembang leli yang sangat elok. Yang paling mengesankan, barangkali, adalah perangkat organ yang mengiringi jemaat pada saat bernyanyi. Ukurannya besar, dengan pipa-pipa suatu dari yang kecil sampai besar dan mengilat. Peralatan perjamuan kudus terbuat dari perak mengilat. Selain itu terdapat pula suatu sudut khusus bagi orkes suling, orkes yang sudah membudaya di Maluku dan terdapat di semua desa di sana.

Gereja kebanggaan orang Ambon itulah yang hendak dibangun kembali oleh Martinus Putuhena. Sekembali ke Jakarta ia menghadap Presiden Sukarno dan membicarakan rencananya serta alasannya. Dijelaskannya, pembangunan kembali gedung gereja itu akan menarik simpati masyarakat Ambon pada pemerintah. Hal itu akan membantu memulihkan ke-

tenteraman, dan dengan demikian pembangunan akan bisa dimulai.

Presiden Sukarno menyetujui gagasan itu sepenuhnya. Malah secara pribadi ia menyumbangkan uang sebanyak 1 juta rupiah. Dengan uang itu, pembangunan gereja itu bisa dimulai. Martinus Putuhena sendiri menyumbangkan gambar yang dirancangnya sendiri. Kemudian dibentuk panitia pembangunan di Ambon. Masyarakat dikerahkan untuk secara gotong-royong membangun gedung gereja mereka. Ada yang mengambil pasir dan batu dari pantai. Ada yang menyumbangkan keahlian sebagai tukang. Pendeknya pembangunan gereja kebanggaan itu dilakukan secara *masohi* gotong-royong. Gedung gereja yang kemudian diberi nama "Maranatha" itu, diresmikan oleh Presiden Sukarno sendiri dalam kunjungannya ke Ambon.¹⁰⁰

Kunjungan yang terakhir ke Maluku dilakukan Putuhena pada tahun 1956, beberapa saat sebelum ia pensiun, untuk memeriksa proyek-proyek PUT di Maluku yang dipimpin Ir. Hadinoto (kemudian Prof. ir Kusdianto Hadinoto).

Tempat yang paling mengesankan Putuhena adalah Bandaneira. Di situ ia menyaksikan peninggalan para *perkeniers* dari masa jayanya di abad ke-17 dan ke-18. Masih nampak sisa rumah mewah, jalan raya yang serba luas, dan lain-lain. Daerah yang demikian makmur itu dalam abad ke-19 dan ke-20 menjadi sangat terbelakang. Demikian mundurnya sehingga Pemerintah Hindia Belanda pernah menjadikannya sebagai tempat pengasingan bagi Bung Hatta dan Bung Sjahrir, serta mr. Iwa Kusumasumatri, dr. Tjipto Mangunkusumo, dan lain-lain.

Perjalanan diteruskan ke Pulau Seram. Kota yang disinggahi adalah Amahai, di pantai selatan pulau itu. Putuhena masih menyaksikan betapa suburnya pulau itu. Beberapa tempat seperti Kairatu malah telah dijadikan daerah transmigrasi dari Jawa. Ia yakin benar, pada suatu ketika, apabila pembangunan Indonesia berjalan lebih lancar, Pulau Seram bisa kembali menjadi "lambung makanan" bagi pulau-pulau lain di Maluku. Ke-

padatan penduduk di Pulau Ambon karena penanaman cengkih bisa diatasi dengan transmigrasi lokal ke Seram.

Pulau Buru ketika itu juga sudah dibuka oleh Kementerian PUT sebagai daerah transmigrasi. Tempat-tempat yang telah dibuka itu pun dikunjungi Putuhena. Dengan berjalan kaki rombongan sempat menyaksikan kesuburan tanah pulau yang sangat luas itu.

Perjalanan ke Ternate mengingatkan Putuhena pada sejarah lama Maluku. Daerah itu pernah menjadi pusat kerajaan yang kaya karena perdagangan cengkihnya. Kekayaan itu berangsur hilang setelah penjajahan masuk. Di tahun 1950-an itu masih nampak peninggalan dari masa lalu itu. Rombongan dijamu oleh bekas Sultan Ternate yang dikenal Putuhena semasa bertugas di Ujung pandang. Setelah upacara sambutan, muncul acara tarian keraton yang lemah-gemulai. Setelah itu semua hadirin diharapkan turun dan mencari pasangan untuk menari. Tarian itu merupakan lambang manunggalnya para pemimpin dengan rakyatnya.¹⁰¹

Perjalanan masih diteruskan ke Sulawesi Utara untuk memeriksa proyek-proyek PUT di sana.

BAB VII MASA PURNABHAKTI

Pada tahun 1956 Ir. Martinus Putuhena pensiun. Ia telah berkecimpung dalam bidang teknik selama 29 tahun, 14 tahun di antaranya setelah kemerdekaan. Usianya baru memasuki 55 tahun, dan kekuatan fisiknya masih baik sehingga belum ada niat samasekali untuk berhenti bekerja.

Ketika hendak dipensiunkan, pemerintah berniat mengangkatnya sebagai duta besar untuk Birma atau menjadi wakil pemerintah dalam dewan direksi perusahaan timah *Billiton Maatschappij* di Negeri Belanda. Setelah berunding dengan istrinya, Martinus Putuhena memutuskan untuk menerima tawaran kedua. Ia menjadi ketua *Raad van Beheer* 'Dewan Penguasa' perusahaan itu selama beberapa tahun.

Keputusannya untuk menjadi wakil pemerintah dalam dewan direksi perusahaan timah tersebut berdasarkan alasan yang menarik. Rupanya ia hendak menyenangkan istrinya yang selama itu dengan rela hidup menderita dalam masa-masa sulit ketika ia menjadi menteri dan pejabat tinggi RI selama revolusi.¹⁰²

NV. *Gemeenschappelijk Mijnbouw Maatschappij Billiton* didirikan di masa Hindia Belanda untuk memproduksi timah di Pulau Belitung, Sumatra Selatan dengan patungan antara peme-

rintah dan swasta. Konsesinya akan habis tahun 1958, dan menurut perundang-undangan kelanjutan konsesi itu harus dirundingkan dengan Pemerintah RI. Inilah tugas utama yang dibebankan kepada Martinus Putuhena.

Sebenarnya, sebagai akibat dari Perjanjian KMB, dan terutama setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, modal dari Pemerintah Belanda (50%) telah dialihkan kepada pemerintah Indonesia. Sisanya masih tetap di tangan swasta Belanda, sedangkan kantor pusatnya pun masih tetap di Negara Belanda sehingga Martinus Putuhena harus ke sana.

Selama menjadi ketua *Raad van Beheer* di Negara Belanda, Martinus Putuhena melakukan perundingan. Pemerintah ingin membeli modal dari pihak swasta itu sehingga perusahaan itu sepenuhnya menjadi milik pemerintah Indonesia. Perundingan berhasil. Setelah masa konsesi *Billiton Maatschappij* habis pada tanggal 28 Februari 1958, seluruh perusahaan itu menjadi milik RI dan merupakan modal awal PT. Timah.

Ketika perusahaan timah negara itu baru muncul, orang tidak teringat akan jasa Putuhena, mungkin karena pengaruh perusahaan itu bagi perekonomian Indonesia belum nampak. Tetapi 16 tahun kemudian, di masa Orde Baru, jerih-payah Putuhena itu diakui, antara lain dengan memberinya penghargaan tertentu, seperti yang juga pernah ia peroleh untuk jasanya yang lain, yaitu merundingkan pengambilalihan perusahaan listrik dan gas yang dimiliki pihak swasta Belanda pada tahun 1953 dan 1954.

Ketika berada di Negeri Belanda, Putuhena tertimpa musibah: pada tahun 1957 istrinya yang tercinta, Helena van den Berg, meninggal dunia, mungkin karena serangan jantung.¹⁰⁵

Dalam tahun 1958 Martinus Putuhena kembali ke tanah air. Kini ia benar-benar bebas dari tugas-tugas pemerintah. Namun demikian ia tetap berhasrat melanjutkan pekerjaan sebagai swasta.

Setelah mempertimbangkan masak-masak, Putuhena memutuskan untuk bergera di bidang pembangunan/pemborongan karena kesempatan untuk itu memang ada. Ketka itu Dr. G.A. Siwabessy, ketua Badan Tenaga Atom, sedang memikirkan pembangunan sarana bagi lembaga yang didirikan pada tahun 1961. Sebidang tanah di Pasar Jumat, Jakarta Selatan, disediakan pemerintah untuk Komplek Batan. Siwabessy yang sudah sejak lama mengenal Putuhena mengajaknya untuk mengawasi pembangunan komplek itu.

Sebelumnya Martinus Putuhena telah mendirikan biro konsultasi kecil dengan nama CV. Hatawano. Modal kerja perusahaan itu diperolehnya dari menjual mobilnya yang berasal dari pemerintah. Perusahaan kecil itu mengerjakan empat orang berpendidikan STM.

Awal tahun-tahun 1960-an itu merupakan permulaan baru dalam riwayat Putuhena. Ia menikah lagi dengan seorang wanita yang telah dikenalnya semasa mahasiswa, Helena Wattimena janda almarhum Tetelepta. Helena menjadi guru di sebuah sekolah di Bandung. Sebelum menikah berkali-kali Putuhena mondar-mandir Jakarta – Bandung untuk menemui calon istrinya. Mereka kemudian menikah di Bandung. Dari perkawinan itu Putuhena tidak mendapat anak. Tetapi istri barunya itu punya empat orang anak dari perkawinannya yang pertama. Keluarga baru ini tetap berdiam di Jl. Telukbetung 11, Jakarta. ¹⁰⁷

Pembangunan komplek Batan di Pasar Jumat itu berlangsung sampai tahun 1965. Tugas yang ditangani Putuhena memang tidak kecil. Di atas bidang tanah yang luas itu harus dibangun rumah tinggal para pegawai, gedung laboratorium, dan jalan. Pembangunan laboratorium sangat pelik karena perlu tembok yang istimewa agar bisa menahan sinar gama yang digunakan di dalamnya. Tempat penampungan air, *greenhouse*, serta taman juga diperlukan, dan tentu saja jaringan listrik untuk kompleks itu.

Pekerjaan besar itu dilakukan Martinus Putuhena dengan mengontrak empat perusahaan pemborong. Berangsur-angsur bidang tanah di Pasar Jumat yang ditumbuhi alang-alang itu berubah menjadi kompleks penelitian beserta perumahannya. Salah satu tugas yang paling mendebarakan adalah pembangunan gedung isotop. Terutama pengamanannya sangat diperhatikan. Gedung itu harus benar-benar kedap cahaya agar radiasi tidak bocor keluar.

Peristiwa G-30-S/PKI pada tahun 1965 serta akibatnya sangat dirasakan oleh CV. Hatawano. Karena perubahan politik yang menyusul percobaan perebutan kekuasaan komunis yang gagal itu, untuk sementara semua proyek pemerintah dihentikan. Pukulan yang paling berat adalah ketika diadakan pemotongan nilai nominal uang. Pemotongan itu berarti Rp. menjadi hanya Rp. 1000,00

Untuk sementara CV. Hatawano dibekukan. Para pegawainya diberhentikan, tetapi Putuhena tidak sampai hati melepaskan mereka begitu saja. Ia berusaha mencari pekerjaan lain bagi mereka. Ada yang dipekerjakan di Pertamina, ada yang beralih profesi menjadi guru STM, dan ada yang disalurkan ke perusahaan lain.

Dalam situasi yang serba sulit itu, Martinus Putuhena memutuskan untuk menjual rumah di Jl. Telukbetung 11, Jakarta. Ketika itu banyak bekas pejabat yang melakukan hal yang sama. Nampak suatu perkembangan yang menarik ketika itu, ketika bekas pejabat tinggi pemerintahan yang berdiam di bilangan Menteng (daerah elit) berpindah ke daerah pinggiran. Sebagai gantinya masuklah para pedagang atau pejabat baru.

Dari uang penjualan rumah itu, Putuhena membeli sebuah rumah sederhana di bilangan Tebet, wilayah yang ketika itu relatif baru dan sebab itu harga tanahnya pun masih murah. Sisa uang penjualan dititipkan di bank untuk mendapatkan bunganya.¹⁰⁸

Dalam keadaan sulit begitu, Putuhena tidak berusaha mencari kesempatan kepada bekas bawahannya di Departemen Pekerjaan Umum untuk mendapat proyek atau kesempatan lain. Malah ketika istrinya mengusulkan agar ia menggunakan namanya untuk meminjam uang di bank bagi kelanjutan perusahaannya itu, ia menolak.¹⁰⁹ Ia tidak mempunyai jaminan material bagi pinjaman dari bank. Nama baiknya, baginya, bukan jaminan. Bahwa ia telah bekerja dengan baik, tanpa cacat, bukan merupakan jasa baginya, tetapi kewajiban.

Ketika menjadi direktur perusahaan kecil itu banyak kesempatan untuk memperkaya diri. Sebagai pemegang konsesi pembangunan kompleks Pasar Jumat, ia sering didekati oleh para pemborong dengan pelbagai hadiah. Maksudnya tentu saja untuk mendapat kesempatan yang lebih besar daripada seharusnya. Tetapi godaan-godaan itu selalu dihindarinya. Padahal kebiasaan "memberi hadiah" itu sudah merupakan kebiasaan dalam dunia usaha ketika itu.¹¹⁰

Dalam keadaan yang terjepit itu Martinus Putuhena memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan konsultan yang dipimpin oleh seorang bekas anak-buahnya, yaitu Ir. Hadianto (kemudian menjadi gurubesar). Koleganya itu pun ketika itu telah memasuki masa pensiun. Untuk menyambung hidupnya ia berhasil membentuk perusahaan, *PT. Investors Development Consultant Ltd. (IDC)*.

Pengalaman dan tenaga Martinus Putuhena sangat dihargai dalam perusahaan konsultan tersebut. Ia langsung dijadikan direktur bidang teknis yang mengawasi pelaksanaan proyek. Namun hidupnya ketika itu jauh dari mewah. Ia tidak punya mobil, sehingga terpaksa harus menggunakan kendaraan umum dari Tebet ke kantornya di bilangan Kramat Raya. Ia pernah ditabrak sepeda motor dan terpaksa menginap beberapa hari di rumah sakit."

Berangsur-angsur keadaan Martinus Putuhena dan keluarganya kembali, terutama akibat perkembangan perekonomian

Indonesia pada umumnya di tahun-tahun 1970-an itu. PT. *Investors Development Consultan Ltd.* berhasil memenangkan beberapa tender dari proyek pemerintah sehingga Putuhena mulai sibuk lagi.

Beberapa proyek yang dipercayakan kepada perusahaan konsultan itu dibiayai dengan hibah dari Pemerintah Belanda. Salah satunya adalah proyek irigasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Tengah. Perusahaan IDC dipercayakan untuk mengadakan studi kelayakan di sana. Tugas itu membawa Putuhena ke wilayah itu. Ia juga diharuskan mengawasi studi kelayakan untuk pembangunan bendungan Wlingi di Kali Brantas (Jawa Timur), pembangunan jalan-jalan baru di Pontianak.

Kemudian muncul pelbagai proyek pembangunan di Kota Jakarta. Pembangunan gedung untuk Pasar Induk dari Bulog di Cipinang dilakukan di bawah pengawasan Ir. Putuhena. Proyek pembangunan Pelabuhan III di Tanjung Priok juga diawasinya. Salah satu proyek pembangunan pelabuhan yang cukup besar adalah di Banjarmasin. Pekerjaan itu memang membutuhkan pikiran dan tenaga yang sangat banyak. Tetapi untunglah PT. *Investors Development Consultant* mempekerjakan tenaga-tenaga ahli dari luar negeri yang senantiasa membantu dalam hal teknologi maju.

Beberapa proyek lain di Jakarta adalah pembangunan gedung PT Serat yang terletak di Pasar Rumpit. Kemudian PT Serat mempercayakan IDC lagi untuk merencanakan pembangunan gedung-gedungnya di Asem Reges Bagus (Jakarta) dan di Bondowoso (Jawa Timur). Ini semua menjadi tanggung jawab langsung Ir. Putuhena.

Proyek yang ditangani PT IDC Ltd. yang menarik bagi Ir. Matinus Putuhena adalah pembangunan Kampus Universitas Pattimura di Ambon. Proyek itu mulai dibangun dengan bantuan Rusia dan oleh tenaga Rusia. Tetapi ketika G-30-S/PKI pecah, hubungan kerja dengan pihak Rusia itu dihentikan. Sementara itu beberapa gedung telah siap, dan beberapa lagi masih

berupa kerangka beton bertulang. Beberapa tahun lamanya proyek itu dibiarkan. Alang-alang mulai meninggi, alat-alat besar menjadi karatan, dan besi-besi beton mulai membengkok. Seluruh kompleks yang terletak di Poka, Ambon, itu seolah-olah reruntuhan kota yang dihancurkan peperangan.

Dalam tahun-tahun 1970-an pemerintah pusat memutuskan untuk meneruskan pembangunan kompleks Poka tersebut. Rencana yang dibuat di masa Orde Lama, yaitu pembangunan Institut Oseanologi, dibatalkan. Gedung yang telah ada diperbaiki dan yang sedang dibangun dirampungkan. Maksudnya untuk tempat Universitas Pattimura yang belum mempunyai kampus yang memadai. Selain itu sebagian kompleks itu juga dipakai untuk kepentingan Lembaga Oseanologi Nasional, LIPI.

Di tengah kesibukan dalam dunia swasta itu, Martinus Putuhena banyak juga menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi usaha-usaha amal dan sosial. Hal itu terutama dilakukannya sesuai dengan profesinya sebagai insinyur sipil. Demikian banyaknya sumbangan dalam bidang itu sehingga memberi kesan tersendiri bagi kita. Nampaknya kegiatan itu memberi kepuasan tersendiri baginya. Mungkin juga keyakinan agamanya mendorongnya untuk mendarmabhaktikan tenaganya bagi kepentingan rohaniyah, di samping usaha untuk menjamin kebutuhan materialnya.

Kegiatan bidang amal yang paling menonjol dari Martinus Putuhena adalah pembangunan atau rehabilitasi gedung-gedung gereja. Hal itu sudah dilakukannya segera setelah ia pensiun. Ketika itu ia bersama keluarganya masih berdiam di Jl. Telukbetung 11, Jakarta. Bagi mereka yang berdiam di sekitar Menteng, tempat beribadah yang terdekat adalah Gereja Paulus di Jl. Sunda Kelapa. Berangsur-angsur anggauta jemaat gereja itu bertambah sehingga perluasan gedung mulai sangat terasa dibutuhkan. Dalam situasi itu Ir. Putuhena menerima ajakan majelis gereja untuk mengetuai Panitia Pembangunan Gereja Paulus. Ia berhasil membangun ruangan baru dan perkantoran di kompleks gereja itu.

Dalam tahun 1967 keluarga Putuhena menjual rumah di Menteng dan pindah ke Tebet. Di sini keadaan gereja lebih pelik lagi. Wilayah Tebet sebenarnya merupakan daerah pemukiman yang baru dibuka sejak pembangunan kompleks olahraga di Senayan. Penduduk Selayan ketika itu dipindahkan ke Tebet yang sebelumnya masih rawa. Sebab itu tidak mengherankan bila gedung gereja pun ada. Untuk melakukan ibadah, jemaat Tebet menggunakan suatu ruangan dari rumah seorang dermawan. Sementara itu dibentuk Panitia Pembangunan Gereja dengan tugas mengumpulkan dana untuk membeli tanah dan pembangunan gedung gerejanya. Ketika berpindah ke Tebet, Putuhena didekati majelis jemaat di sana untuk menjadi penasihat panitia tersebut.

Dalam beberapa tahun dikumpulkan. Tanah di ujung Jl. dr. Soepomo, pada perempatan tugu, dibeli. Pembangunannya, mulai dari pembuatan gambar sampai pengawasan pembangunan fisik, dilakukan oleh Ir. Putuhena. Ketika gedung gereja "Muria" itu selesai dibangun pada tahun 1970, pada upacara pembukaannya Ir. Putuhena mendapat piagam kenangan dari majelis gerejanya.

Sebenarnya, ketika berdiam di Tebet, sudah beberapa kali Ir. Putuhena diminta tenaganya untuk membantu panitia pembangunan gereja. Ketika gedung gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Menteng Pulo memerlukan rehabilitasi dan perluasan, ia juga didekati. Ketika itu yang menjadi anggota panitia adalah pengusaha mobil terkenal, almarhum Panggabean. Pekerjaan ini pun dilakukannya dengan baik.

Gereja Pasundan yang terletak di Jl. Sawah Besar juga mengalami perubahan. Panitia pada waktu itu diketuai Ny. Dr. Leimena. Panitia bermaksud membangun rumah bersalin di samping gedung gereja tersebut. Pekerjaan itu tidak mudah karena tempatnya sangat sempit. Di tempat itu pula harus dibangun asrama putri untuk para perawat. Tidak jarang orang melihat Putuhena naik-turun tangga yang sempit dan dibuat secara darurat itu, untuk mengawasi pembangunan.

Sekalipun sering membantu pembangunan gereja lain, rupanya pembangunan gereja di Tebet itulah yang dianggap paling mengesankannya. Kalau gedung yang lain hanya mengalami rehabilitasi atau peluasan, gedung di Tebet dibangun sejak awal. Sebab itu tidak mengherankan bila ketika Ir. Putuhena meninggal pada tahun 1982, ia dibaringkan untuk terakhir kalinya di gedung gereja di Tebet itu. Itu merupakan ucapan terimakasih yang terbesar yang diberikan jemaat itu kepadanya.

Sebenarnya ada beberapa kegiatan sosial lain Ir. Putuhena yang tidak kurang penting. Ketika Universitas Kristen Indonesia didirikan, umpamanya, ia menerima permintaan dari Dewan Penyantun untuk menjadi dekan Fakultas Teknik yang pertama. Ketika itu pekerjaannya sebagai sekjen Kementerian Pekerjaan Umum menyita banyak waktunya sehingga pekerjaan sebagai dekan itu banyak diabaikan. Ketika pada tanggal 25 Nopember 1979 universitas itu merayakan dies natalisnya, Putuhena diundang untuk menerima penghargaan sebagai dekan pertama tersebut. Namun dengan rendah hati ia mengatakan, ketika itu sebenarnya ia tidak terlalu banyak berjasa bagi universitas tersebut. Sikap keterusterangan ini memang merupakan sifat khasnya.

Tenaga dan namanya juga membantu menghidupkan kembali proyek rumah sakit kanker yang pernah dirintis oleh Prof. Dr. Siwabessy. Yayasan Penyakit Kanker Indonesia itu mula-mula berkantor di Jl. Jawa (Jl. Mangunsarkoro sekarang). Setelah berhasil mengumpulkan dana, yayasan membeli sebidang tanah di bilangan Slipi, untuk membangun sebuah gedung rumah sakit. Ketika gedung itu setengah rampung, meletuslah G-30-S/PKI. Segala kegiatan ketika itu dihentikan sama sekali.

Ketika beberapa tahun kemudian usaha yayasan tersebut dihidupkan kembali, bantuan Ir. Putuhena diminta. Setelah mengadakan peninjauan di Slipi, ia memutuskan untuk mengubah fungsi gedung yang telah rampung 60% itu. Sebagian

dipakai untuk rumah sakit, lainnya untuk bagian administrasi, dan sisanya untuk asrama perawat. Namanya tercantum sebagai salah seorang dari pelopor pembangunan rumah sakit itu, bernama Dr. W.A. Tambunan, Dr. Liem Khe Loen, Dr. G.A. Siwabessy, Dr. R. Suwarno, dan Suwahjo Sumodilogo SH.

Sumbangsih lainnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Maluku, adalah dalam bidang pendidikan. Dalam tahun 1971 beberapa tokoh masyarakat yang berasal dari Maluku berkumpul di kediaman Dr. Leimena untuk membicarakan usaha membantu anggota masyarakat Maluku yang kekurangan. Martinus Putuhena adalah salah seorang yang diundang ketika itu. Setelah berembuk beberapa lama, Poetiray yang ketika itu menjabat direktur Bank Ekspor Impor Indonesia, mengusulkan untuk membentuk yayasan yang menyediakan dana beasiswa bagi para mahasiswa Maluku yang ingin menyelesaikan studinya. Pada tahun 1972, May. Jen. J. Muskita, yang pada waktu itu menjabat dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, meresmikan pendiriannya, dengan nama Yayasan Beasiswa Maluku. Dalam usaha pengumpulan dana, Putuhena sangat banyak membantu. Mungkin sekali ia teringat akan *Ambonsche Studiefonds* yang selama empat tahun (1923-1927) membantu studinya di THS Bandung.¹¹²

BAB VIII MAHAPUTRA UTAMA

Pada tahun-tahun terakhir masa hidupnya, Ir. Martinus Putuhena mendapat penghargaan tertinggi dari negara dalam bentuk Bintang Mahaputra Utama. Penghargaan itu diterimanya dalam situasi yang cukup memprihatinkan. Ketika itu ia telah pindah ke Jl. Pasar Minggu, setelah menjual lagi rumahnya di Tebet Timur Dalam. Rumah itu malah pernah dipotong karena perluasan Jalan Pasar Minggu. Di rumah itulah ia menghabiskan sisa-sisa waktunya bersama istrinya.¹¹³

Ketika itu Ir. Putuhena sudah dilupakan, kecuali oleh keluarganya yang terdekat. Barangkali itulah konsekuensi dari hidup seorang pejabat yang tidak bersedia menonjolkan dirinya dan menuntut balas budi bagi sumbangsihnya di masa sedang jaya. Hidupnya sederhana dengan pensiun dan honorarium yang halal. Ketika itu ia telah melepaskan tugasnya sebagai direktur teknik pada PT. *Investors Development Consultant Ltd.* Usianya yang sudah tua, dan keadaan fisiknya yang lemah, menyebabkan ia tidak bisa bekerja giat lagi.

Tidak mengherankan bila pada suatu ketika Ir. Idris dari Departemen Pekerjaan Umum datang dengan usul untuk mencalonkannya sebagai penerima bintang jasa dari pemerintah.¹¹⁴ Ir. Idris kebetulan duduk sebagai anggota (apa?) bintang jasa di

departemen tersebut. Ketika itu memang banyak orang di departemen itu yang sudah tidak ingat lagi bahwa pernah ada seorang sekjen di sana yang bernama Ir. Martinus Putuhena. Malah kenyataan bahwa dia pernah menjabat menteri Pekerjaan Umum di masa revolusi sudah menghilang dan hanya sekali-sekali muncul dalam buku sejarah atau buku peringatan.

Suatu kebiasaan sampai sekarang, mereka yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa harus dicalonkan untuk mendapat penghargaan dari pemerintah. Untuk itu ada suatu panitia dan ada pula prosedurnya.

Upacara penyematan Bintang Maha Putra Utama itu dilaksanakan di Istana Merdeka pada tanggal 13 Agustus 1976 oleh Presiden Soeharto,¹¹⁵ antara lain bersama W.B. Lopian yang pernah menjalankan tugas sebagai penguasa wilayah Sulawesi Utara di masa revolusi, W.B. Lopian menerima Bintang Maha Putra Pratama. Kedua bintang itu tergolong yang paling tinggi di Indonesia dan hanya diberikan kepada orang yang sangat besar jasanya bagi bangsa dan negara. Dalam rangka perayaan 17 Agustus 1976 itu, dibagikan lebih dari 1000 bintang dari pelbagai tingkatan yang lebih rendah.

Dalam pidatonya Presiden Soeharto mengatakan, Bintang Mahaputra Utama yang dianugerahkan kepada Ir. Putuhena itu didasarkan pada "sumbangannya yang sangat besar, tidak saja dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi juga menunjang derajat negara di mata internasional."¹¹⁶

Penghargaan tertinggi negara atas jasanya yang diberikan di haritunya itu sungguh mengharukan. Ketika itu ia bersama istrinya berada di Istana Merdeka yang dikenalnya betul ketika bertugas sebagai pejabat negara. Saat itu memang merupakan saat yang berbahagia bagi seorang yang selama bertahun-tahun menyumbangkan tenaganya, terutama di masa yang produktif, bagi bangsa dan negara.

Kemudian datanglah saat yang tidak bisa dielakkan dalam hidup seseorang. Tahun 1981 Ir. Putuhena mulai sakit-sakitan,

sehingga pernah diharuskan beristirahat panjang di rumah sakit. Setahun kemudian ia jatuh sakit lagi, bahkan lebih parah. Sangat menyedihkan, tidak seorang kerabat pun yang mengetahui keadaannya yang demikian parah itu. Berbulan-bulan ia harus dirawat istrinya di rumah. Berita kecil di *Kompas* tanggal 29 Agustus 1982 mengejutkan banyak orang sehingga mulai berdatanganlah orang yang merasa masih keluarga atau pernah berhutang budi kepada tokoh nasional yang telah demikian lanjut usianya itu.¹¹⁷

Keadaannya tidak pernah pulih kemali. Bulan September 1982 sekali lagi ia terpaksa dimasukkan ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Pada saat-saat terakhir istrinya berada di sampingnya. Suatu ketika ia bertanya kepada istrinya, "O ya, tanggal 19 September nanti ada apa? Saya bermimpi tentang tanggal itu." Istrinya penuh keheranan menjawab, "Seingat saya pada tanggal itu tidak ada hal-hal yang istimewa bagi kita." Ternyata pada tanggal itulah ia mulai tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, tanggal 20 September 1982, pukul 04.00, ia menghembuskan napasnya yang penghabisan.¹¹⁸

Upacara keberangkatannya ke tempat istirahat yang terakhir dilakukan menurut tatacara gereja dan tatacara negara. Dari rumah duka di Jl. Pasar Minggu, rombongan berangkat ke Gereja "Bukit Muria" di Tebet. Jemaat gereja itu merasa bahwa jenazahnya berhak disemayamkan untuk terakhir kalinya di gereja yang turut dibangunnya itu. Setelah upacara gereja usai, upacara kenegaraan dimulai. Ketika peti jenazah yang diusung para pemuda tiba di pintu gereja, Cosmas Batubara, menteri muda Perumahan Rakyat, telah berdiri untuk menerimanya atas nama negara. Melalui regu kehormatan militer, peti yang dibungkus bendera nasional itu diantarkan ke mobil jenazah. Rombongan resmi yang diikuti kendaraan para kerabat dan keluarga bergerak menuju Taman Pahlawan Kalibata.

Di makam pahlawan itu telah menunggu Menteri Pekerjaan Umum Dr. Purnomosidi HS. yang bertindak sebagai inspektur

upacara. Pembacaan riwayat hidup singkat pun dilakukan. Inspektur Upacara menyampaikan pidato atas nama negara:

"Almarhum Ir. M. Putuhena adalah seorang pejuang yang konsekwen sepanjang hayatnya, mendarmabaktikan dirinya pada nusa dan bangsa, khususnya di bidang Pekerjaan Umum. Sebagai seorang pengabdian bangsa dan negara, almarhum turut berpartisipasi secara terus-menerus, sejak zaman perjuangan sampai masa pembangunan sekarang ini. Pengabdianannya yang luar biasa pada negara, dan buah pikirannya yang cemerlang, tidak hanya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi juga mengharumkan nama Republik Indonesia di mata dunia."

Pidato itu mirip sekali dengan pidato Presiden Soeharto ketika menyematkan Bintang Mahaputra Utama pada ir. Putuhena enam tahun sebelumnya.

Kalau suatu biografi adalah pertemuan antara watak individu dan tema sejarah, sebagai purnakata dalam biografi ir. Martinus Putuhena dapat dikemukakan kesimpulan berikut. ir. Putuhena adalah seorang yang berwatak tenang, jujur, dan sangat pendiam. Profesi sebagai seorang insinyur sipil tidak banyak mengubah watak dasar itu, malah dalam memilih tugas ia cenderung mengutamakan yang sesuai dengan watak tersebut. Pengaruh istrinya yang pertama, Helena van den Berg, juga tidak banyak mengubahnya. Namun istri yang pertama itu banyak memberi dorongan agar ir. Putuhena mencoba usaha baru yang membawanya ke jenjang karier yang lebih tinggi. Melalui istrinya yang pertama pula ir. Putuhena yang berasal dari Ihamahu (sebuah desa di Maluku Tengah) bisa berkenalan dengan pelbagai unsur dari budaya Jawa. Itu memudahkannya kelak dalam pergaulan dengan para rekannya yang kebanyakan berasal dari Jawa pula.

Wataknya yang tidak senang menonjolkan diri, pendiam, dan tenang itu menyebabkannya sangat cocok dengan sikap politik Sjahrir yang moderat. Keikutsertaan ir. Putuhena dalam Kabinet Sjahrir sejak Nopember 1945 mungkin saja berkat

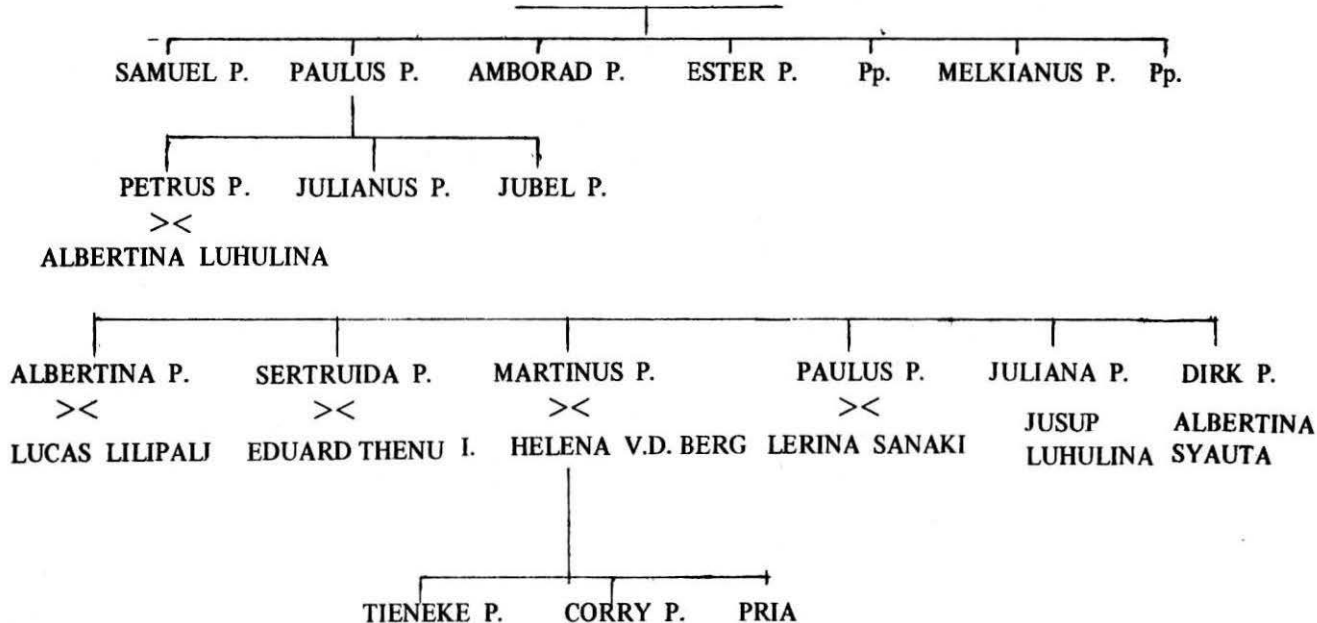
dorongan kawan lamanya dari THS, yaitu Presiden Sukarno. Namun Ir. Putuhena tidak terlampau cocok dengan gaya politik presiden Indonesia yang pertama itu. Itulah mungkin sebabnya ia mengundurkan diri setelah Sjahrir tidak memimpin kabinet lagi. Itu pula mungkin yang menyebabkan ia berhenti sebagai pegawai negeri pada tahun 1956, ketika keadaan politik di Indonesia mulai meningkat ramai, dan adu kekuatan serta intrik menjadi yang pokok.

Sementara itu sifat-sifatnya tersebut menyebabkan ir. Putuhena juga cocok bagi pelbagai tugas *ad hoc* seperti yang dilakukannya di Ujungpandang pada tahun 1950. Sikap itulah yang memungkinkannya berdialog dengan pelbagai golongan di sana sehingga akhirnya Negara Indonesia Timur terlebur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat-sifat itu pula yang menyebabkan ia dipakai beberapa kali untuk merundingkan ambil-alih beberapa perusahaan Belanda untuk dijadikan usaha Pemerintah RI.

Selain itu Ir. Martinus Putuhena juga memiliki kemauan yang keras dan sifat pantang mundur, terutama dalam menghadapi tugas profesionalnya. Pembangunan waduk air minum di Jakarta, pencarian lokasi untuk bendungan Jatiluhur, adalah beberapa di antaranya yang bisa digolongkan berguna bagi kemakmuran rakyat banyak. Sebagai seorang teknokrat dapat dikatakan ia cukup berhasil. Malah sekalipun sudah memasuki masa pensiun, ia masih terus menyumbangkan keahliannya bagi proyek-proyek pemerintah Orde Baru. Ditinjau dari hal itu semua, memang tepatlah bila ia dianugerahi Bintang Mahaputra Utama. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang.

Lampiran 1

SILSILAH IR. M. PUTUHENA
LUKAS PUTUHENA



2. HELENA WATTIMENA

Lampiran 2.

SURAT PERINTAH KOORDINATOR KEAMANAN

No. 02/KK/1949

KOORDINATOR KEAMANAN

Memerintahkan kepada: Ir. P U T U H E N A,

Untuk : 1. Segera berangkat ke Makasar.

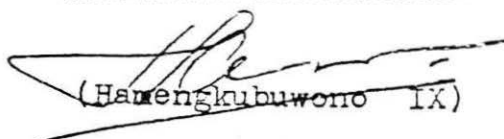
2. Memegang jabatan Ketua *Panitia Militer Urusan Territorial Negara Indonesia Timur* seperti yang telah dirembug antara Pemerintah Negara Indonesia Timur dengan kami sebagai Koordinator Keamanan pada tanggal 23 Desember 1949.

3. Tiap-tiap bulan dan sewaktu-waktu ada keperluan yang penting memberi laporan kepada kami tentang terlaksananya kewajiban Panitia tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 25 Desember 1949.

KOORDINATOR KEAMANAN


(Hamengkubuwono IX)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Staf Angkatan Perang RIS.
2. Pemerintah Negara Indonesia Timur.
3. Arsip.

Lampiran 3

**MENTERI PERTAHANAN
TENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN.
No. : 64/MP/50.**

Menimbang : perlu untuk merobah pertanggungangan jawab mengenai ketentaraan di Negara Indonesia Timur sesuai dengan keadaan zaman.

Mengingat : 1. tingkatkan keadaan Negara Republik Indonesia Serikat pada dewasa ini.
2. Surat keputusan Menteri Pertahanan mengenai pembubaran Panitia Territorium Negara Indonesia Timur di bawah pimpinan P.Tn. Ir. Putuhena.

MEMUTUSKAN :

Mulai keluarnya surat keputusan ini menetapkan menjadi *penasehat Komandan Territorium dan Tentara Sulawesi/Maluku serta Sunda Kecil: P.Tn. Ir. Putuhena.*

Dikeluarkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 11 - 2 - 1950.
Pada jam : 14.00.

MENTERI PERTAHANAN



(HAMENGKU BUWONO IX - LETNAN JENDERAL)

Kepada Yth.:

P. Tn. Ir. Putuhena.

Tembusan surat keputusan ini disampaikan
untuk menjadi periksa kepada:

1. P.J.M. Presiden.
2. P.T. Letn. Kol. Mokoginta.
3. J.M. Menteri Dalam Negeri.
4. P.T. Fg. K.S.A.P.
5. P.T. K.S.A.D.
6. P.T. K.S.A.U.
7. P.T. K.S.A.L.

CATATAN

1. Z.J. Manusama, Hikayat Tanah Hitu. Desertasi Universitas Leiden 1971.
2. Wawancara dengan Drs. Frans Hitupeuw, 1984, 1985.
3. G.E. Rumphius, Ambonsche Landbeschrijving. Suntingan Dr. Z.J. Manusama, Arsip Nasional R.I. 1983.
4. Wawancara dengan Drs. Frans Hitupeuw, 1984, 1985.
5. Wawancara dengan Drs. Frans Hitupeuw dan dengan Ny. Putuhena Wattimena, 1984, 1985.
6. Ibid.
7. R.Z. Leirissa, "Midras dan Ambonsche Burgerschool: Dua bentuk sekolah yang bertolak belakang di Maluku Tengah di abad ke-19"
Makalah Seminar Sejarah Lokal di Medan, tanggal 17 – 20 September 1984.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Ibid.
12. Bagian dalam bab ini dikutip dari naskah buku Ny. Putuhena Wattimena berjudul "Tr. Putuhena yang kukenal". Dibandingkan pula dengan wawancara dengan Drs. Frans Hitupeuw, 1985.

13. E.J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indie*, Jakarta-Groningen: J.B. Wolters 1938, hlm. 327, 335, 337.
14. Ibid. hlm. 339.
15. Wawancara dengan Ny. Putuhena Wattimena, 1984, 1985.
16. Bagian ini dan selanjutnya berdasarkan keterangan-keterangan dalam wawancara dengan Ny. Corry Wardoyo, putra ke-2 dari Ir. Martinus Putuhena, 1985.
17. R. van Niel, *The Emergence of Modern Indonesian Elite*, The Hague: van Hoeve, 1970.
18. Wawancara dengan Ny. Corry Wardoyo, 1985.
19. R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, Jakarta 1975, hlm. 73 – 85.
20. John Engleson, *Road to Exile. The Indonesian Nationalist Movement 1927 – 1934*, Singapore: ASAA Southeast Asia Publ. Series, 1979, 19 – 52.
21. "Biografi Dr. J. Leimena", dalam *Kewarganegaraan Yang Bertanggung-jawab* 'i Buku kenangan Dr. Leimena, Jakarta: Penerbit Kristen Gunung Mulia, 1981.
22. Ibid.
23. Mengenai keadaan di Lombok: wawancara dengan Ny. Putuhena Wattimena dan dengan Ny. Corry Wardoyo, 1985.
24. Biografi Dr. Leimena, loc. cit; Wawancara dengan J.D. de Fretes (alm.) 1983.
25. Wawancara dengan J.D. de Fretes (alm.) 1983.
26. Ibid.
27. Ibid.
28. Wawancara dengan Ny. Corry Wardoyo, Jakarta 1985.
29. Naskah buku Ny. Putuhena – Wattimena.
30. Ibid.
31. Leirissa, loc. cit.
32. Naskah buku Ny. Putuhena – Wattimena.
33. Ibid.
34. Ibid.
35. Ibid.
36. Ibid.

37. Antara, 19 Januari 1950.
38. Perjanjian-perjanjian politik antara VOC dengan pelbagai kekuasaan di Asia antara abad ke-17 dan abad ke-18 sebagian besar telah diterbitkan dalam *Corpus Diplomaticum Neerlandico Indicum* (7 jilid).
39. G.J. Resink, "Inlandsche Staten in den Oosterschen Archipel", *Bijdragen*, 116, 1960, hlm. 313 – 349.
40. Leirissa, op. cit. hlm. 141 – 144.
41. Ibid.
42. Ibid.
43. Ibid. hlm. 145 – 149.
44. Ibid. hlm. 152 – 156.
45. Ibid. hlm. 153.
46. Atmakusumah (ed), *Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 184 – 185.
A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid XI
Bandung: Penerbit Angkasa 1979, hlm. 412.
47. Antara, 26 Desember 1949.
48. Antara, 29 Desember 1949.
49. Indonesia Timur, 5 Januari 1950.
50. Indonesia Timur, 4 Januari 1950.
51. Indonesia Timur, 21 Januari 1950.
52. Indonesia Timur, 23 Januari 1950.
53. Indonesia Timur, 30 Maret 1950.
54. Pidato Radio Ir. Putuhena pada tanggal 7 Januari 1950 pk. 20.00 di RRI Makasar, Indonesia Timur, 10 Januari 1950.
55. Indonesia Timur, 5 Januari 1950.
56. Indonesia Timur, 9 Januari 1950.
57. Pidato Radio Ir. Putuhena, loc. cit.
58. Indonesia Timur, 26 Januari 1950.
59. Indonesia Timur, 26 Januari 1950.
60. Pedoman, 30 Januari 1950.
61. Antara, 14 Pebruari 1950.

62. Leirissa, loc. cit. hlm. 164.
63. Wawancara dengan Bapak C.P.F. Luhulima, M.A., Jakarta 1985.
64. Leirissa, loc. cit.
65. Indonesia Timur, 2 April 1950, 5 April 1950.
66. Indonesia Timur, 5 April 1950, 6 April 1950.
67. Indonesia Timur, 6 April 1950.
68. Indonesia Timur, 18 April 1950, 19 April 1950.
69. Indonesia Timur, 10 April 1950, 12 April 1950, 15 April 1950, 18 April 1950, 19 April 1950, 20 April 1950, 21 April 1950.
70. Indonesia Timur, 21 April 1950.
71. Indonesia Timur, 28 April 1950.
72. Indonesia Timur, 20 Juni 1950, 5 Juli 1950.
73. Wawancara dengan Ny. Corry Wardojo, Jakarta 1985.
74. Indonesia Timur, 14 Juli 1950.
75. Indonesia Timur, 22 Juli 1950, 24 Juli 1950, 25 Juli 1950.
76. Antara, 3 Agustus 1950, 19 Agustus 1950.
77. Keterangan resmi Kementerian Pertahanan RIS, Antara 12 Agustus 1950.
78. Ibid.
79. Antara, 25 Agustus 1950.
80. Pedoman, 18 Maret 1950.
81. Pedoman, 27 September 1950, 4 Oktober 1950.
82. 20 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid V, hlm. 713.
83. 'Kita Mengenang Jasa Ir. Putuhena', dalam Majalah dwiwulan Pekerjaan Umum, XX, 1, Des. 1982, hlm. 35 – 38.
84. Ibid.
85. Ibid.
86. Naskah buku Ny. Putuhena – Wattimena.
87. Ibid.
88. Ibid.
89. 20 Tahun Indonesia Merdeka, op. cit. hlm. 722 – 727.
90. Ibid.

91. Ibid. hlm. 705 – 706.
92. Ibid. hlm. 712.
93. Ibid. hlm. 756 – 758.
94. Naskah buku Ny. Putuhena – Wattimena.
95. Ibid.
96. Ibid.
97. Ibid.
98. Ibid.
99. Ibid.
100. Ibid.
101. Ibid.
102. Wawancara dengan Ny. Corry Wardojo, Jakarta 1985.
103. Wawancara dengan Ny. Putuhena – Wattimena, Jakarta 1984.
104. Wawancara dengan Ny. Putuhena – Wattimena, Jakarta 1984.
105. Wawancara dengan Ny. Corry Wardojo, Jakarta, 1985.
106. Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Upuleru. Memoar. Jakarta: Gunung Agung 1981.
107. Naskah Ny. Putuhena – Wattimena.
108. Ibid.
109. Ibid.
110. Ibid.
111. Ibid.
112. Ibid.
113. Wawancara dengan Ny. Putuhena – Wattimena, Jakarta 1984.
114. Wawancara dengan Ny. Putuhena – Wattimena, Jakarta 1984.
115. Sinar Harapan, 13 Agustus 1976.
116. Ibid.
117. Wawancara dengan Ny. Putuhena – Wattimena, Jakarta 1984.
118. Naskah Ny. Putuhena – Wattimena.

DAFTAR SUMBER

Wawancara

Ny. Putuhena – Wattimena, Jakarta September – Desember 1984, Januari 1985.

Ny. Corry Wardoyo, Jakarta, Januari 1985.

Drs. Frans Hitupeuw, Bogor Desember 1984, Jakarta Januari 1985.

Bapak C.P.F. Luhulima, Jakarta, Januari 1985.

Bapak J.D. de Fretes, Januari 1983.

Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Jakarta 1980.

Suratkabar dan Majalah

Antara (Jakarta) 1950.

Indonesia Timur (Makasar), 1949, 1950.

Pedoman (Jakarta), 1950.

Kompas (Jakarta), 1982.

Sinar Harapan (Jakarta), 1976.

Pekerjaan Umum (Jakarta), 1982.

Naskah

Ny. Putuhena – Wattimena, "Ir. Martinus Putuhena Yang Kukenal" akan diterbitkan oleh Sinar Harapan pada tahun 1985.

Buku

Atmakusumah (ed). Tahta Untuk Rakyat. Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta : Gramedia 1982.

- I.J. Brugmans. *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*. Batavia-Groningen: J.B. Wolters, 1938.
- Corpus Diplomaticum Neerlandico-Indicum. Den Haag : Martinus Nijhoff. Frans Hitupeuw, "Kerajaan Iha berinteraksi dengan segala suku-bangsa di abad ke-XVII dalam perjuangan nasional" Makalah Seminar Sejarah Lokal di Medan, 17-20 September 1984.
- John Ingleson. *Road to Exile. The Indonesian Nationalis Movement 1927-1934*. Singapore: ASAA Southeast Asia Publication Series, 1979.
- "Kita Mengenang Ir. Martinus Putuhena", dalam *Majalah dwi-wulan Pekerjaan Umum*, XX, 1, Des. 1982, hlm. 53-58.
- Kewarganegaraan Yang Bertanggung-jawab. Kenangan atas Dr. J. Leimena. Jakarta : Penerbit Kristen Gunung Mulia, 1981
- R.Z. Leirissa. *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta 1975.
- R.Z. Leirissa, "Midras dan Ambonsche Burgerschool: Dua bentuk sekolah yang bertolak belakang di Maluku Tengah dalam abad ke-19", Makalah Seminar Sejarah Lokal di Medan, 17 – 20 September 1984.
- Z.J. Manusama, *Hikayat Tanah Hitu*. Disertasi di Universitas Leiden, 1971.
- A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1979, Jilid XI, hlm. 412.
- R. van Niel. *The Emergence of Modern Indonesian Elite*. The Hague: van Hoeve 1971.
- G.J. Resink, "Inlandsche Staten in den Oosterschen Archipel", *Bijdragen*, 116, 1960, hlm. 313 – 349. Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia Negara-Negara Pribumi di Kepulauan Timur, Jakarta: Bhratara 1973.
- G.J. Rumphius, *Ambonsche Landbeschrijving*. Suntingan Z.J. Manusama, Jakarta: Arsip Nasional R.I. 1983.
- G.A. Siwabessy. *Upuleru: Memoar*. Jakarta: Gunung Agung 1981. 20 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid V.

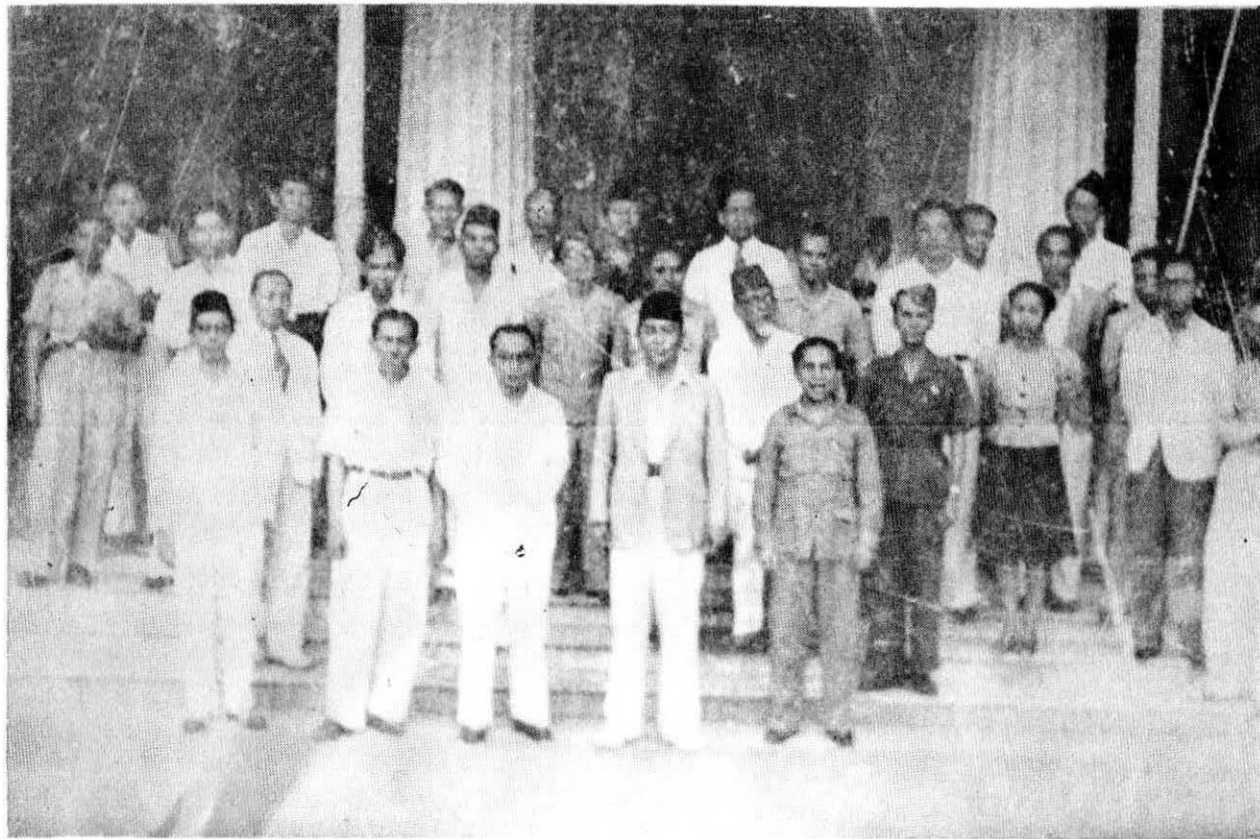


Foto Bab IV Kabinet Syahrir pada tahun 1947 (bulan Maret)



Foto Bab V Tatangkeng sedang berbicara di depan corong; Ir. Putuhena duduk kedua dari kiri (Makassar, Januari 1950)



Foto Bab VIII.

Penyematan Bintang Mahaputra kepada Ir. Putuhena pada tanggal 13 Agustus 1976 oleh Presiden Soeharto di Istana Negara

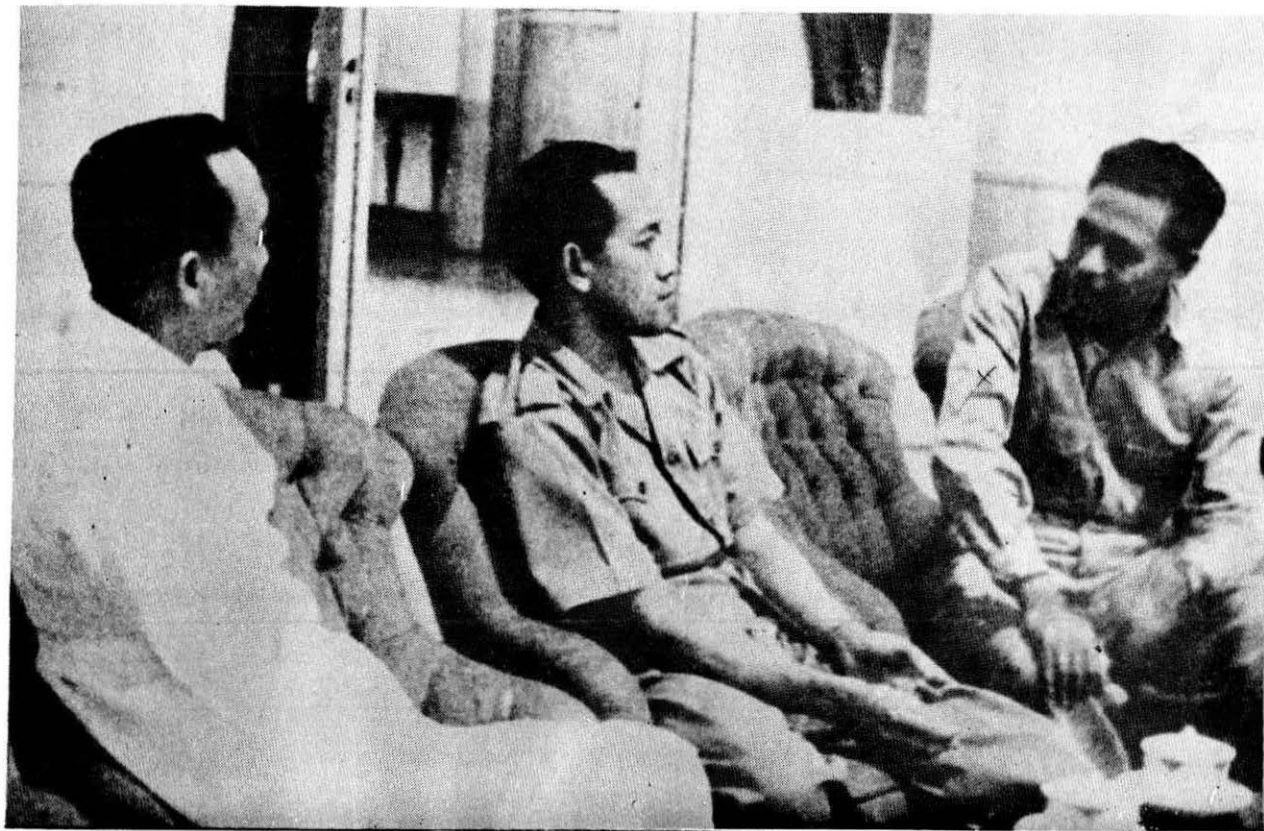


Foto Bab V Krisis Kabinet Syahrir (Juni 1947)

Perp
Jer